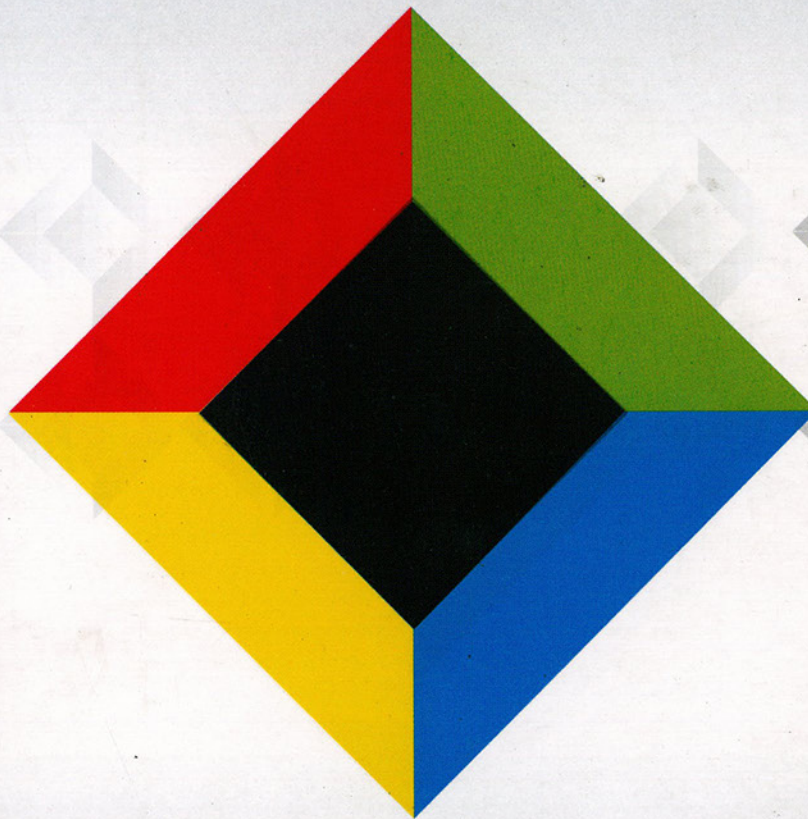


LAPORAN **AKHIR**

Buku Induk Statistik
Pekerjaan Umum(BIS PU)

6

Buku Induk Statistik Pekerjaan Umum (BIS PU)



Tahun 2007

ku
an Kem. PU
go.id



DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM
SEKRETARIAT JENDERAL
PUSAT PENGOLAHAN DATA (PUSDATA)

KATA PENGANTAR

Data dan informasi statistik infrastruktur untuk mendukung perencanaan pembangunan dan pengembangan infrastruktur PU dirasakan perlu untuk disebarluaskan kepada masyarakat, mengingat banyaknya permintaan masyarakat akan hal ini. Penyediaan data dan informasi yang meliputi seluruh Provinsi di Indonesia disajikan dalam bentuk buku yang untuk selanjutnya disebut sebagai Buku Induk Statistik Pekerjaan Umum (BIS-PU). Diharapkan BIS-PU ini dapat digunakan sebagai acuan guna mendukung pengambilan kebijakan dalam rencana pembangunan terpadu, khususnya yang terkait pada bidang ke-PU-an.

Dalam penerbitan BIS-PU ini, disajikan rencana strategis dan program pembangunan, disamping itu data serta informasi Prasarana dan Sarana Dasar Pekerjaan Umum (PSDPU) yang telah dibangun di seluruh Indonesia dengan dilengkapi informasi terkait yang mendukung perencanaan pembangunan tersebut. Data dan informasi yang diperoleh berasal dari internal Departemen PU dan instansi lain yang terkait.

Kami menyadari, bahwa dalam penyusunan BIS-PU ini masih terdapat banyak kekurangannya, sehingga perlu lebih disempurnakan dan dikembangkan lagi. Untuk itu saran serta masukan dari para pengguna buku ini sangat diharapkan demi penyempurnaan BIS-PU selanjutnya.

Jakarta, Oktober 2007

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iv
Daftar Gambar	ix
Daftar Singkatan	xi
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tujuan dan Manfaat	2
1.3 Ruang Lingkup Kegiatan	3
BAB II INFORMASI STATISTIK PENDUKUNG PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA KE-PU-AN	
2.1 Wilayah Indonesia	4
2.1.1 Luas Wilayah	4
2.1.2 Wilayah Administrasi	5
2.2 Penduduk dan Tenaga Kerja	5
2.2.1 Penduduk	5
2.2.2 Ketenaga Kerjaan	8
2.3 Sosial, Budaya, dan Ekonomi	13
2.3.1 Sosial	13
2.3.2 Budaya	14
2.3.3 Ekonomi	16

2.4	Potensi Lahan	19
2.4.1	Penggunaan Lahan Pertanian	19
2.4.2	Perluasan Areal Tanam	20
2.5	Perumahan, Lingkungan Hidup dan Bencana Alam ...	21
2.5.1	Perumahan	21
2.5.2	Lingkungan Hidup	24
2.5.3	Bencana Alam	26
2.6	Angkutan	28
BAB III	INFORMASI STATISTIK KINERJA PEMBANGUNAN PRASARANA DAN SARANA KE-PU-AN	
3.1	Prasarana dan Sarana Sumber Daya Air	29
3.1.1	Bendungan	29
3.1.2	Irigasi	30
3.1.3	Sungai dan Wilayah Sungai	33
3.1.4	Rawa dan Pantai	34
3.1.5	Danau	35
3.1.6	Embung	36
3.1.7	Air Tanah	37
3.2	Prasarana dan Sarana Bina Marga.....	37
3.2.1	Jalan.....	37
3.2.2	Jalan Tol	43
3.2.3	Jembatan	44
3.3	Prasarana dan Sarana Cipta Karya	45
3.3.1	Penyediaan Air Minum	45
3.3.2	Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman	48
3.4	Penataan Ruang	51
BAB IV	: PENUTUP	
4.1	Kesimpulan	56
4.2	Saran	57

DAFTAR TABEL

I. STATISTIK UMUM

1. Wilayah Indonesia

Tabel 2.1	: Rekapitulasi Data Pulau di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 2004	A-1
Tabel 2.2	: Luas Wilayah Di Indonesia Tahun 2005	A-2
Tabel 2.3	: Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi Seluruh Indonesia Tahun 2005	A-3
Tabel 2.4	: Data Wilayah Pemekaran Menurut Provinsi	A-4
Tabel 2.5	: Penduduk Dan Laju Pertumbuhan Penduduk Menurut Provinsi Tahun 2000-2005	A-5

2. Penduduk dan Tenaga Kerja

Tabel 2.6	: Distribusi Presentase dan Kepadatan Penduduk Menurut Provinsi Tahun 2000 - 2005	A-6
Tabel 2.7	: Rumah Tangga dan Rata-Rata Banyaknya Anggota Rumah Tangga Menurut Provinsi Tahun 2000 - 2005	A-7
Tabel 2.8	: Jumlah Penduduk dan Keluarga Tahun 2006	A-8
Tabel 2.9	: Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas Menurut Provinsi Dan Jenis Kegiatan Selama Seminggu yang Lalu, 2005	A-9
Tabel 2.10	: Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas Yang Bekerja Selama Seminggu yang Lalu Menurut Provinsi dan Lapangan Pekerjaan Utama, 2005	A-10

Tabel 2.11	: Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas Yang Bekerja Selama Seminggu yang Lalu Menurut Status Pekerjaan Utama Dan Lapangan Kerja Utama Tahun 2005	A-11
Tabel 2.12	: Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas yang Bekerja Menurut Jumlah Jam Kerja Pada Pekerjaan Utama Dan Lapangan Kerja Utama Tahun 2005.....	A-12
Tabel 2.13	: Pekerja Menurut Upah/Gaji Bersih Selama Sebulan dengan Jenis Kelamin dan Wilayah (Desa Kota) Tahun 2006	A-13

3. Sosial, Budaya, dan Ekonomi

Tabel 2.14	: Sekolah Dasar (SD) Dibawah Departemen Pendidikan Nasional Menurut Provinsi, Tahun 2002/2003 – 2004/2005 ..	A-14
Tabel 2.15	: Sekolah Menengah Pertama (SMP) Dibawah Departemen Pendidikan Nasional Menurut Provinsi, Tahun 2002/2003 – 2004/2005	A-15
Tabel 2.16	: Sekolah Menengah Atas (SMA) Dibawah Departemen Pendidikan Nasional Menurut Provinsi, Tahun 2002/2003 – 2004/2005	A-16
Tabel 2.17	: Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Dibawah Departemen Pendidikan Nasional Menurut Provinsi, Tahun 2002/2003 – 2004/2005	A-17
Tabel 2.18	: Perguruan Tinggi ¹⁾ Negeri dan Swasta Dibawah Departemen Pendidikan Nasional Menurut Provinsi Tahun 2004-2005	A-18
Tabel 2.19	: Banyaknya Sarana Tempat Ibadah Menurut Provinsi Tahun 2005	A-19
Tabel 2.20	: Banyaknya Fasilitas Kesehatan Menurut Provinsi Tahun 2005	A-20
Tabel 2.21	: Produk Domestik Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha, 2002-2005 (Miliar Rupiah)	A-21

Tabel 2.22	: Produk Domestik Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2000 Menurut Lapangan Usaha, 2002-2005 (Miliar Rupiah)	A-22
Tabel 2.23	: Produk Domestik Regional Bruto Per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Provinsi, 2001-2004 (Rupiah)	A-23
Tabel 2.24	: Produk Domestik Regional Bruto Per Kapita Tanpa Migas Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Provinsi, 2001-2004 (Rupiah)	A-24

4. Potensi Lahan

Tabel 2.25	: Penggunaan Lahan Menurut Provinsi Tahun 2004, (Ha)	A-25
------------	--	------

5. Perumahan, Lingkungan Hidup dan Bencana Alam

Tabel 2.26	: Kualitas Bangunan Rumah dan Permukiman Kumuh di Indonesia Tahun 2005	A-26
Tabel 2.27	: Permukiman Mewah dan Permukiman Kumuh di Indonesia Tahun 2006	A-27
Tabel 2.28	: Tempat Tinggal di Bantaran/Tepi Sungai di Indonesia Tahun 2005/2006	A-28
Tabel 2.29	: Tempat Tinggal di Bawah Jaringan Listrik Tegangan Tinggi (> 500 KV) di Indonesia Tahun 2005/2006	A-29
Tabel 2.30	: Daerah Rawan Bencana Alam Beserta Keluarga yang Tinggal di Lokasi Tersebut Tahun 2005	A-30
Tabel 2.31	: Rekapitulasi Kejadian Bencana Alam Musim Hujan Tahun 2005-2006 (Status per 15 Juni 2006)	A-31

6. Angkutan

Tabel 2.32	: Kendaraan Bermotor Menurut Polda dan Jenis Kendaraan Tahun 2002 – 2004, (Unit).....	A-32
------------	---	------

II. STATISTIK PRASARANA DAN SARANA

1. Sumber Daya Air

Tabel 3.1	: Daftar Bendungan Indonesia Berdasarkan Provinsi	B-1
Tabel 3.2	: Rekapitulasi Daerah Irigasi Tahun 2006	B-2
Tabel 3.3	: Skala Irigasi dari Berbagai Tingkatan di Seluruh Provinsi Indonesia Tahun 2005	B-3
Tabel 3.4	: Resume Luasan Irigasi dan Rawa di Seluruh Indonesia Tahun 2006	B-4
Tabel 3.5	: Data Sungai Berdasarkan Wilayah Sungai di Indonesia	B-5
Tabel 3.6	: Data Rawa Berdasarkan Provinsi di Indonesia	B-6
Tabel 3.7	: Data Danau Berdasarkan Provinsi di Indonesia	B-7

2. Bina Marga

Tabel 3.8	: Panjang Jalan Negara Menurut Provinsi dan Jenis Permukaan Tahun 2005	B-8
Tabel 3.9	: Panjang Jalan Provinsi Menurut Provinsi dan Jenis Permukaan Tahun 2005	B-9
Tabel 3.10	: Panjang Jalan Kabupaten/Kota Menurut Provinsi dan Jenis Permukaan Tahun 2005	B-10
Tabel 3.11	: Panjang Jalan Negara Menurut Provinsi dan Kondisi Jalan Tahun 2005	B-11
Tabel 3.12	: Panjang Jalan Provinsi Menurut Provinsi dan Kondisi Jalan Tahun 2005	B-12
Tabel 3.13	: Panjang Jalan Kabupaten/Kota Menurut Provinsi dan Kondisi Jalan Tahun 2005	B-13

Tabel 3.14	: Kondisi Jalan Nasional Hasil Survai Tahun 2006 Berdasarkan Rata-Rata IRI Dalam Satu Ruas Jalan Status 15 Januari Tahun 2007	B-14
Tabel 3.15	: Kondisi Jalan Provinsi Tahun 2006 (Status 1 Maret 2006) Berdasarkan Kriteria IRI	B-15
Tabel 3.16	: Kondisi Jalan Kabupaten Tahun 2006 (Status 1 Maret 2006) Berdasarkan Kriteria IRI	B-16
Tabel 3.17	: Jalan Nasional Jalan Tol	B-17
Tabel 3.18A	: Jalan Nasional Jalan Tol Pulau Jawa Tahun 2005-2010.....	B-18A
Tabel 3.18B	: Jalan Nasional Jalan Tol Pulau Sumatera Tahun 2005-2010.	B-18B
Tabel 3.18C	: Jaringan Jalan Tol Pulau Sulawesi Tahun 2005-2010	B-18C
Tabel 3.18D	: Jaringan Jalan Tol Pulau Bali Tahun 2005-2010.....	B-18D
Tabel 3.19	: Statistik Jembatan di Pulau Jawa	B-19

3. Cipta Karya

Tabel 3.20	: Perkembangan Perusahaan Air Minum (PAM), 2001-2005 ...	B-20
Tabel 3.21	: Persentase Rumah tangga Menurut Provinsi dan Sumber Air Minum Tahun 2005	B-21
Tabel 3.22	: Lokasi IPA Hingga Tahun 2007 PDAM	B-22
Tabel 3.23	: Lokasi IPAL Hingga Tahun 2007.....	B-23
Tabel 3.24	: Lokasi IPLT Hingga Tahun 2007	B-24
Tabel 3.25	: Banyaknya Desa Menurut Provinsi Dan Jenis Tempat Membuang Air Besar Sebagian Besar Keluarga	B-25
Tabel 3.26	: Lokasi TPA Hingga Tahun 2007.....	B-26
Tabel 3.27	: Banyaknya Desa Menurut Provinsi Dan Jenis Tempat Membuang Sampah Sebagian Besar Keluarga	B-27

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 : Jumlah Penduduk Daerah Perkotaan dan Perdesaan Indonesia, Tahun 2000 - 2025	6
Gambar 2.2 : Penduduk Usia Kerja Menurut Golongan Umur di Wilayah Desa dan Kota, Tahun 2006	9
Gambar 2.3 : Penduduk Usia Kerja Menurut Pendidikan di Wilayah Desa dan Kota, Tahun 2006	9
Gambar 2.4 : Angkatan Kerja Menurut Golongan Pendidikan di Wilayah Desa dan Kota, Tahun 2006	10
Gambar 2.5 : Angkatan Kerja Menurut Golongan Umur di Wilayah Desa dan Kota, Tahun 2006	11
Gambar 2.6 : Jumlah Pekerja Menurut Klasifikasi Pekerja Tahun 2006	12
Gambar 2.7 : Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara, Tahun 2005 - 2006	15
Gambar 2.8 : Jumlah Kunjungan Wisatawan Nusantara (000 orang) dan Jumlah Perjalanan (000), Tahun 2001 - 2006	15
Gambar 2.9 : Jumlah Total Pengeluaran Wisatawan Nusantara (Rp.Triliun), Tahun 2001 - 2006	16
Gambar 2.10 : Produk Domestik Bruto per Kapita, 2001 - 2005 (Ribu Rupiah)	17
Gambar 2.11 : Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2000 Menurut Provinsi (persen), 2001 - 2004	18
Gambar 2.12 : Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto per Kapita Atas Dasar Harga Konstan 2000 Menurut Provinsi (persen), 2001 - 2004	19

Gambar 2.13 : Sasaran Perluasan Areal Tanam (Ha), Tahun 2003-2005	21
Gambar 2.14 : Persentase Rumah Tangga Menurut Tempat Penampungan Air Limbah/Mandi/Dapur/Cuci dan Daerah, Tahun 2004	25
Gambar 2.15 : Persentase Rumah Tangga Menurut Cara Pembuangan Sampah dan Daerah, Tahun 2004	26
Gambar 2.16 : Kendaraan Bermotor Rakitan Dalam Negeri (Unit), Tahun 2000 - 2004	28
Gambar 3.1 : Target dan Pencapaian Program 2005	32
Gambar 3.2 : Target dan Pencapaian Program 2006	33
Gambar 3.3 : Jumlah Embung Berdasarkan Provinsi di Indonesia	36
Gambar 3.4 : Jumlah Embung Berdasarkan Jenis di Indonesia	36
Gambar 3.5 : Jumlah Air Tanah Berdasarkan Provinsi di Indonesia	37
Gambar 3.6 : Panjang Jalan Menurut Jenis Permukaan dan Tingkat Kewenangan, 2005	39
Gambar 3.7 : Panjang Jalan Menurut Tingkat Kewenangan dan Jenis Permukaan, 2005	39
Gambar 3.8 : Panjang Jalan Menurut Kondisi Jalan dan Tingkat Kewenangan, 2005	40
Gambar 3.9 : Panjang Jalan Menurut Tingkat Kewenangan dan Kondisi Jalan, 2005	41
Gambar 3.10 : Jalan Nasional Bukan Jalan Tol dan Jalan Tol di Indonesia ..	44
Gambar 3.11 : Tahapan Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah	52

DAFTAR SINGKATAN

- B** BIS – PU = Buku Induk Statistik Pekerjaan Umum
- D** DAS = Daerah Aliran Sungai
 DPKTI = Dewan Pengembangan Kawasan Timur Indonesia
- H** Ha = Hektar
 H_{bend} = Height (Tinggi Bendungan)
- I** IPA = Instalasi Pengolahan Air
 IPAL = Instalasi Pengolahan Air Limbah
 IPLT = Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja
 IRI = International Roughness Index
- K** KAPET = Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu
 KBI = Kawasan Barat Indonesia
 KEKI = Kawasan Ekonomi Khusus Indonesia
 KPS = Kerjasama Pemerintah Swasta
 KTI = Kawasan Timur Indonesia
 KV = Kilo Voltage
- L** L/td = Liter/detik
- M** MCK = Mandi Cuci Kakus
 MDG's = Millenium Development Goals
- O** OMS = Organisasi Masyarakat Setempat
 OP = Operasi dan Pemeliharaan
 OPL = Optimalisasi Pemanfaatan Lahan

P	PAM	=	Perusahaan Air Minum
	PBL	=	Penambahan Baku Lahan
	PDAM	=	Perusahaan Daerah Air Minum
	PDB	=	Produk Domestik Bruto
	PDRB	=	Produk Domestik Regional Bruto
	PHBS	=	Perilaku Hidup Bersih dan Sehat
	PSDPU	=	Prasarana dan Sarana Dasar Pekerjaan Umum
R	RDTR	=	Rencana Detail Tata Ruang
	Renstra	=	Rencana Strategis
	RKL	=	Rehabilitasi dan Konservasi Lahan
	RPJMN	=	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
	RTR	=	Rencana Tata Ruang
	RTRW	=	Rencana Tata Ruang Wilayah
	RTRWN	=	Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional
	RTRWP	=	Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi
S	SDA	=	Sumber Daya Air
	SDI	=	Surface Distrees Index
	SPAM	=	Sistem Penyediaan Air Minum
T	TA	=	Tahun Anggaran
	TPA	=	Tempat Pembuangan Akhir
	TPAK	=	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja
V	V_{waduk}	=	Volume Waduk (Isi)
W	WS	=	Wilayah Sungai

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Program pembangunan Departemen Pekerjaan Umum dilaksanakan secara terpadu dan menyeluruh, serta memberikan dukungan pada sektor-sektor lain secara maksimal. Aktivitas pembangunan prasarana dan sarana yang dikelola dan ditangani oleh Departemen Pekerjaan Umum selama ini adalah bagian dari pelaksanaan program-program di sektor lain. Dalam proses pembangunan bidang ke-PU-an tersebut diperlukan adanya informasi literal untuk membantu perencanaan umum, disain, pelaksanaan, serta pemanfaatan pembangunan. Data beserta informasi statistik sangat dibutuhkan disini terutama bila Pimpinan Departemen atau Lembaga/Instansi terkait ingin mengetahui data atau informasi statistik tentang prasarana dasar ke-PU-an dengan cepat.

Data serta informasi yang sesuai dengan bidang ke-PU-an ini dapat diperoleh ke Departemen Pekerjaan Umum melalui Pusdata - Pekerjaan Umum. Data yang dibutuhkan tersebut merupakan rekapitulasi data secara keseluruhan per wilayah (Provinsi, Kabupaten, dan Kota).

Pusat Pengolahan Data (PUSDATA) Departemen Pekerjaan Umum memiliki tugas melaksanakan pembinaan, pengembangan, pengelolaan serta penyediaan data infrastruktur bidang pekerjaan umum dan penyelenggaraan sistem informasi mendukung manajemen Departemen PU, dengan demikian dalam melaksanakan tugasnya Pusdata menyelenggarakan beberapa fungsi, antara lain penyusunan program pengolahan data beserta pembinaan dan pengembangannya, kemudian penyelenggaraan sistem informasi, pengelolaan dan penyediaan data spasial serta literal. Data literal disini meliputi data literal dan kestatistikan infrastruktur Pekerjaan Umum beserta data literal dan kestatistikan pendukung infrastruktur Pekerjaan Umum.

Dalam kaitannya dengan fungsi tersebut, maka Pusdata menyiapkan dan menyediakan data tentang ke-PU-an beserta pendukungnya yang diharapkan bisa memberi gambaran perkembangan pembangunan secara menyeluruh. Hal ini dimaksud supaya perencanaan yang dibuat dapat terlaksana dengan baik dan program kegiatan yang direncanakan dapat terwujud sesuai dengan yang diinginkan, sehingga pembangunan dan pengelolaan prasarana yang telah ada dapat diwujudkan. Diharapkan, dengan adanya dukungan data ini, pelaksanaan pembangunan prasarana tersebut dapat terwujud sesuai dengan kebutuhan.

1.2 Tujuan dan Manfaat

Buku Induk Statistik PU ini dibuat dengan tujuan menyediakan informasi statistik di bidang ke-PU-an beserta informasi statistik tentang sektor-sektor lainnya dan diperuntukkan bagi para Pimpinan di dalam lingkup Departemen Pekerjaan Umum maupun instansi-instansi lainnya serta untuk masyarakat pengguna. BIS-PU ini dilengkapi dengan data statistik yang terdiri dari data statistik bidang Sumber Daya Air, Bina Marga, Cipta Karya, Penataan Ruang, dan data statistik bidang lainnya yang terkait.

Dengan disusunnya buku ini, diharapkan dapat membantu dalam kegiatan perencanaan dan pelaksanaan program-program pembangunan Departemen Pekerjaan Umum. Sehingga perencanaan pembangunan dapat lebih tepat pada sasaran serta dapat dilaksanakan sesuai dengan yang diharapkan.

Disamping itu, penerbitan BIS-PU adalah untuk memberikan gambaran umum tentang pelaksanaan pembangunan Prasarana dan Sarana Dasar Pekerjaan Umum (PSDPU), sehingga dapat diketahui kondisi dan kebutuhan untuk masa mendatang. Diharapkan masyarakat luas dapat mengetahui dan memanfaatkan data serta informasi yang tersaji melalui buku ini serta memberikan masukan bagi Departemen Pekerjaan Umum.

1.3 Ruang Lingkup Kegiatan

Buku Induk Statistik PU ini menyajikan data dan informasi tentang kinerja Departemen Pekerjaan Umum di seluruh provinsi di Indonesia. Adapun data dan informasi dari BIS-PU ini meliputi data ke-PU-an dan pendukungnya untuk seluruh provinsi di Indonesia. Ruang lingkup data dan informasi ke-PU-an adalah sebagai berikut :

1. Prasarana dan Sarana Dasar Bidang Sumber Daya Air
2. Prasarana dan Sarana Dasar Bidang Bina Marga
3. Prasarana dan Sarana Dasar Bidang Cipta Karya
4. Penataan ruang

Sedangkan untuk data dan informasi pendukung, meliputi :

1. Wilayah Indonesia
2. Kependudukan dan Ketenagakerjaan
3. Sosial, Budaya, dan Ekonomi
4. Potensi Lahan
5. Perumahan dan Lingkungan Hidup
6. Angkutan.

Penyajian data tersebut ditampilkan dalam bentuk tabulasi, grafik, serta bentuk lainnya.

BAB II

INFORMASI STATISTIK PENDUKUNG PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA KE-PU-AN

2.1 Wilayah Indonesia

Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia yang mempunyai ribuan pulau. Posisi strategis ini mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap kebudayaan, sosial, politik, dan ekonomi. Selain itu Indonesia merupakan salah satu negara yang paling banyak berubah wilayah geologinya di dunia.

2.1.1 Luas Wilayah

Indonesia adalah Negara kepulauan terbesar di dunia yang mempunyai 17.504 pulau, 7.870 bernama dan sekitar 9.634 diantaranya belum memiliki nama (Tabel 2.1). Sebagai suatu negara kesatuan, Indonesia terletak antara 6° 08' Lintang Utara sampai dengan 11° 15' Lintang Selatan serta antara 94° 45' Bujur Barat sampai dengan 141° 05' Bujur Timur, serta terletak antara dua benua, yaitu benua Asia dan Australia. Panjang garis pantai Indonesia ± 81.000 Km. Wilayah Indonesia juga terbentang sepanjang 3.977 mil antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Negara kesatuan yang berbentuk Republik ini (semenjak tahun 1999 Timor Timur tidak lagi merupakan wilayah Indonesia) memiliki daratan seluas 1.860.360 kilo meter persegi (km²), terdiri dari pulau Kalimantan (pulau terbesar ketiga di dunia) dengan luas 507.412,18 km² (27,27%), Maluku 87.310,41 km² (4,70%), Papua dan Irian 424.500,80 km² (22,82%), Sumatera 446.686,68 km² (24%), Sulawesi 193.847,09 km² (10,42%), Jawa dan Bali 134.755,85 km² (7,23%) serta Nusa Tenggara 65.846,66 km² (3,54%). Sedangkan provinsi-provinsi yang paling besar adalah Papua dengan luas 309.934,40 km² (16,66%), Kalimantan Timur 194.849,08 km² (10,47%), Kalimantan Tengah 153.564,50 km² (8,25%), dan Kalimantan Barat 120.114,32 km² (6,46%) (Tabel 2.2).

Indonesia merupakan negara bahari dengan luas lautnya sekitar 7,9 juta km² (termasuk daerah Zona Ekonomi Eksklusif) atau 81% dari luas keseluruhan dan mempunyai garis pantai nomor dua terpanjang di dunia setelah Kanada. Daratan Indonesia yang mempunyai luas lebih dari 1,86 juta km², mempunyai puluhan atau mungkin ratusan gunung api dan sungai. Sehubungan dengan letak negara Indonesia yang dikelilingi beberapa samudera, serta banyak terdapat gunung berapi yang masih aktif, menyebabkan Indonesia sering kali dilanda gempa.

2.1.2 Wilayah Administrasi

Indonesia terdiri atas 33 provinsi, 4 diantaranya memiliki status khusus, yaitu provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Papua. Sejak tahun 2005 ada 3 (tiga) tambahan provinsi, yaitu Kepulauan Riau, Sulawesi Barat dan Irian Jaya Barat. Dari jumlah provinsi tersebut terdapat 349 kabupaten, 91 kota, 5.641 kecamatan, dan 71.555 desa (Tabel 2.3). Di beberapa provinsi telah terjadi pemekaran wilayah kabupaten/kota sesuai dengan peraturan Undang-Undang yang telah ditetapkan (Tabel 2.4).

2.2 Penduduk Dan Tenaga Kerja

2.2.1 Penduduk

Sinergi yang kuat antara pembangunan dengan kependudukan harus terus dibangun, mengingat persoalan kependudukan dan pembangunan demikian kompleks. Permasalahan kependudukan yang masih harus diselesaikan adalah persebaran penduduk yang tidak merata, utamanya antara kota dan desa. Disamping itu laju pertumbuhan penduduk yang terus meningkat, kesejahteraan penduduk, derajat kesehatan penduduk, serta meningkatkan mutu pendidikan. Untuk itu pemerintah terus bekerja keras memperbaiki dan meningkatkan mutu kehidupan penduduk atau kualitas manusia Indonesia.

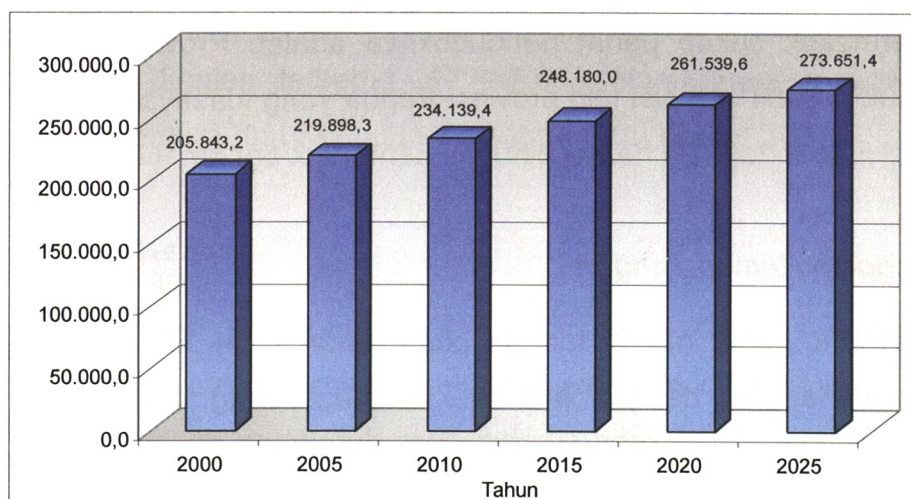
a. *Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk.*

Jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2005 sebesar 219,898 juta jiwa dan diperkirakan akan terus meningkat menjadi sekitar 273,65 juta jiwa pada tahun 2025, tetapi laju pertumbuhan penduduk diperkirakan akan terus mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2000-2005 terjadi penurunan 1,36 persen dan diperkirakan menjadi 0,98 persen pada tahun 2020-2025. (Bapenas, 2006)

Sedangkan berdasarkan data Statistik Indonesia 2005/2006 (BPS), pada tahun 2005 jumlah penduduk Indonesia adalah 219,204 juta, dengan laju pertumbuhan penduduk 1,34 persen pertahun selama periode 2000-2005. Sebagian besar mengalami kenaikan laju pertumbuhan penduduk.

Tingkat pertumbuhan penduduk telah turun secara cepat sejak tahun 1990 dari 1,45 persen pada periode 1990-2000 menjadi 1,34 persen per tahun selama periode 2000-2004. Pada periode 2000-2005, laju pertumbuhan penduduk per tahun tertinggi di Provinsi Riau (4.30%) dan terendah di Provinsi Jawa Tengah (0.42%) (Tabel 2.5).

Gambar 2.1 Jumlah Penduduk Daerah Perkotaan dan Perdesaan Indonesia, Tahun 2000 – 2025



Sumber : Bapenas

b. *Persebaran dan Kepadatan Penduduk*

Jumlah penduduk yang begitu besar dan terus bertambah setiap tahun tidak diimbangi dengan pemerataan penyebaran penduduk, karena sebagian besar penduduk masih terpusat di Pulau Jawa. Berdasarkan Data tahun 2000, 2004, dan 2005 menunjukkan sekitar 59% penduduk tinggal di Pulau Jawa. Dari jumlah tersebut, sekitar 17,82% penduduk tinggal di Provinsi Jawa Barat, 16,22% di Jawa Timur, serta 14,55% di Provinsi Jawa Tengah. Sedangkan luas Pulau Jawa sendiri secara keseluruhan hanya 7% dari seluruh wilayah daratan Indonesia. Ironisnya pada Provinsi Maluku, Maluku Utara dan Papua yang memiliki luas sekitar 27% dari luas total Indonesia hanya dihuni sekitar 2,13% penduduk. Gambaran ini menunjukkan tidak meratanya penyebaran penduduk, kenyataan ini menggambarkan bahwa daya dukung lingkungan yang kurang seimbang di provinsi-provinsi di Pulau Jawa dan luar Jawa. (Tabel 2.2 dan 2.6).

Besarnya jumlah penduduk di Pulau Jawa menyebabkan kepadatan penduduk pulau tersebut menjadi sangat tinggi yaitu 951 penduduk per kilometer persegi (km^2) di tahun 2000 dan 991 penduduk per kilometer persegi (km^2) di tahun 2004 dan menjadi 1.002 penduduk per kilometer persegi (km^2) di tahun 2005. Untuk Provinsi DKI Jakarta sendiri pada tahun 2005 kepadatan penduduknya mencapai lebih dari 13.102 penduduk per km^2 . Provinsi di luar Pulau Jawa yang termasuk cukup padat penduduknya adalah Provinsi Bali, yaitu 600 penduduk per km^2 . Di sisi lain provinsi Papua yang luasnya hampir 17 persen dari total luas Indonesia hanya dihuni 7 penduduk per km^2 (Tabel 2.6).

c. *Anggota Rumah Tangga*

Banyaknya anggota rumah tangga pada tahun 2004 tercatat sebesar 58,2 juta rumah tangga, dengan rata-rata besarnya anggota rumah tangga 3,7 orang. Dibandingkan dengan tahun 2000, rata-rata besarnya anggota rumah tangga pada tahun 2004 ini mengalami penurunan. Untuk tahun 2005 terlihat jumlah rumah tangga sebesar 59,9, sedangkan rata-rata banyaknya anggota

rumah tangga di tahun 2005 ini tidak mengalami perubahan. Data rumah tangga untuk tahun 2004 dan 2005 merupakan hasil estimasi berdasarkan data hasil Sensus Penduduk 2000. Dibandingkan dengan tahun 2000, rata-rata besarnya anggota rumah tangga pada tahun 2004 dan 2005 ini mengalami penurunan (Tabel 2.7).

d. Keluarga Miskin

Pengentasan kemiskinan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat. Yang termasuk keluarga miskin adalah Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera Satu.

Keluarga Pra Sejahtera, yaitu keluarga yang belum dapat memenuhi kebutuhan dasarnya secara minimal, seperti menjalankan ibadah sesuai dengan agamanya, makan minimal 2 kali sehari, pakaian lebih dari satu pasang, sebagian besar lantai rumahnya tidak dari tanah, dan jika sakit tidak dibawa ke sarana kesehatan. Keluarga Sejahtera Satu, yaitu keluarga yang telah dapat memenuhi kebutuhan dasarnya secara minimal, tetapi belum dapat memenuhi kebutuhan sosial psikologis, seperti kebutuhan pendidikan, KB, interaksi dalam keluarga, interaksi dengan lingkungan tempat tinggal, dan transportasi. Pada tahun 2005/2006, jumlah keluarga di Indonesia mencapai 53.890.224. Dari jumlah tersebut, 17.657.563 diantaranya adalah jumlah Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera Satu (Tabel 2.8).

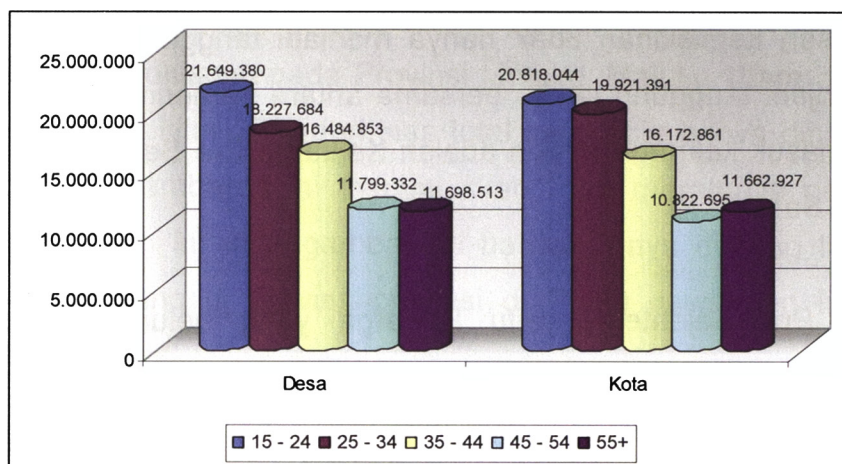
2.2.2 Ketenaga Kerjaan

Pertumbuhan tenaga kerja yang kurang diimbangi dengan pertumbuhan lapangan kerja akan menyebabkan tingkat kesempatan kerja cenderung turun. Meski demikian jumlah penduduk yang bekerja tidak selalu menggambarkan jumlah kesempatan kerja yang ada. Hal ini dikarenakan sering terjadinya ketidakcocokan dalam pasar kerja.

a. Penduduk Usia Kerja

Penduduk usia kerja adalah penduduk berusia 15 tahun ke atas. Penduduk usia kerja menurut golongan umur di wilayah desa dan kota pada tahun 2006, menunjukkan golongan usia antara 15-24 tahun yang terbanyak (Gambar 2.2).

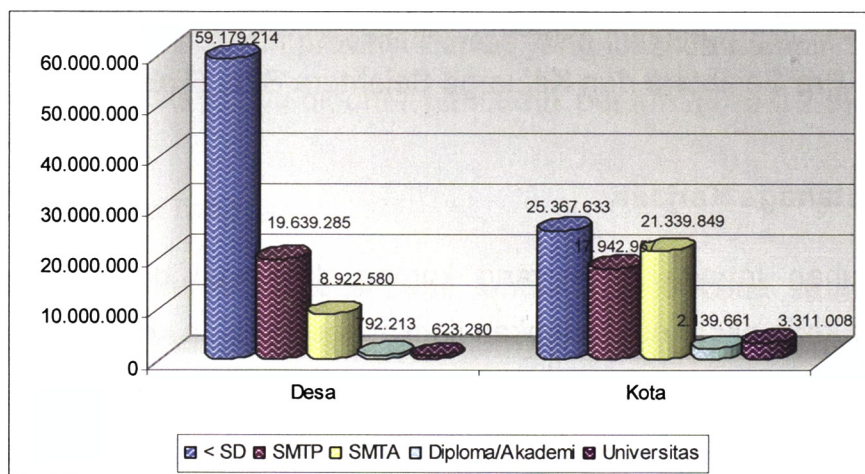
Gambar 2.2 Penduduk Usia Kerja Menurut Golongan Umur di Wilayah Desa dan Kota, Tahun 2006



Sumber : www.nakertrans.go.id/pusdatinnaker?BPS (BPS, Sakernas Tahun 2006)

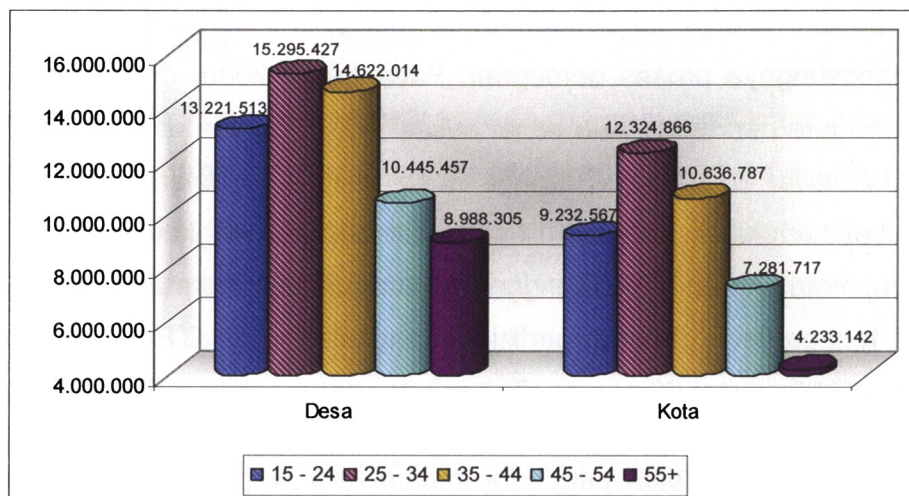
Sedangkan penduduk usia kerja menurut pendidikan di wilayah desa dan kota pada tahun 2006, menunjukkan bahwa penduduk usia kerja banyak yang berpendidikan di bawah SD (Gambar 2.3).

Gambar 2.3 Penduduk Usia Kerja Menurut Pendidikan di Wilayah Desa dan Kota, Tahun 2006



Sumber : www.nakertrans.go.id/pusdatinnaker?BPS (BPS, Sakernas Tahun 2006)

Gambar 2.5 Angkatan Kerja Menurut Golongan Umur di Wilayah Desa dan Kota, Tahun 2006



Sumber : www.nakertrans.go.id/pusdatinnaker?BPS (BPS, Sakernas Tahun 2006)

c. Penduduk yang Bekerja.

Dari 94,9 juta penduduk yang bekerja, sekitar 41,81 juta dari mereka bekerja disektor pertanian, sektor perdagangan 18,90 juta, industri 11,65 juta, dan jasa 10,58 juta (Tabel 2.10). Pada tabel terlihat, bahwa sektor pertanian, kehutanan, perburuan, dan perikanan masih menduduki tempat tertinggi dari lapangan pekerjaan utama di Indonesia.

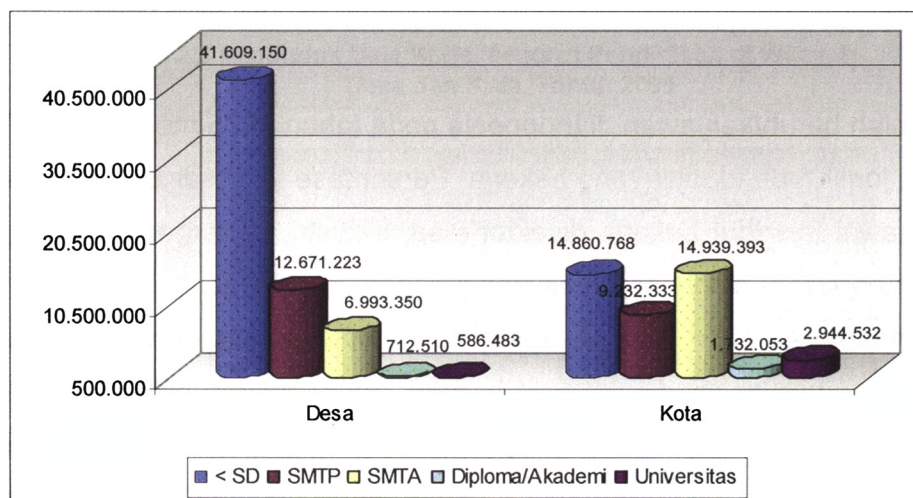
Jumlah buruh/karyawan di Indonesia pada tahun 2005 mencapai 25,7 juta jiwa dari jumlah penduduk yang bekerja. Persentase terbesar dari buruh/karyawan/pegawai tersebut bekerja disektor jasa, industri, perdagangan dan pertanian. Sementara jumlah penduduk yang berusaha di Indonesia pada tahun 2005 mencapai 41,628 juta jiwa terdiri dari mereka yang berusaha sendiri 41,99 persen, berusaha dibantu/buruh tidak tetap 51,02 persen dan berusaha dibantu buruh tetap 6,99 persen. Seperti diketahui, dari 41,814 juta penduduk yang bekerja di sektor pertanian, sekitar 34,44 persen dari mereka merupakan pekerja tidak dibayar. Jumlah pekerja tidak dibayar di Indonesia pada tahun 2005 mencapai 18,538 juta jiwa dari penduduk yang bekerja (Tabel 2.11).

b. *Partisipasi Angkatan Kerja*

Tenaga kerja adalah modal bagi geraknya roda pembangunan. Jumlah dan komposisi tenaga kerja akan terus mengalami perubahan seiring dengan berlangsungnya proses demografi. Pada tahun 2005, di Indonesia terdapat 155,55 juta penduduk usia kerja, sekitar 60,61 persen dari mereka berada di Pulau Jawa. Bagian dari tenaga kerja yang aktif dalam kegiatan ekonomi disebut angkatan kerja. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), merupakan ukuran yang menggambarkan jumlah angkatan kerja untuk setiap 100 tenaga kerja. Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) Indonesia pada tahun 2005 sekitar 70 persen (Tabel 2.9).

Angkatan kerja adalah penduduk dalam usia kerja (15 tahun ke atas) baik yang bekerja maupun yang mencari pekerjaan (pengangguran). Pada tahun 2006, jumlah angkatan kerja terbesar berpendidikan di bawah SD, dengan rentang usia antara 25-34 tahun. Jumlah penduduk di desa lebih banyak jumlahnya ditinjau dari pendidikan dan umur. (Gambar 2.4 dan Gambar 2.5).

Gambar 2.4 Angkatan Kerja Menurut Pendidikan di Wilayah Desa dan Kota, Tahun 2006



Sumber : www.nakertrans.go.id/pusdatinnaker?BPS (BPS, Sakernas Tahun 2006)

2.3 Sosial, Budaya, dan Ekonomi

2.3.1 Sosial

a. Sarana Pendidikan

Ketersediaan fasilitas pendidikan baik sarana maupun prasarana akan sangat menunjang dalam meningkatkan mutu pendidikan. Tabel 2.14 sampai dengan Tabel 2.17 memuat data tentang jumlah sekolah dari tingkat sekolah dasar (SD) sampai sekolah menengah atas (SMA dan SMK).

Pada tahun ajaran 2004/2005 di tingkat sekolah dasar (SD), terjadi peningkatan jumlah sekolah dibandingkan dengan tahun ajaran 2003/2004. Sama halnya dengan tingkat sekolah dasar (SD), pada tingkat sekolah lanjutan tingkat pertama (SMP) jumlah sekolah mengalami peningkatan. Demikian pula untuk tingkat sekolah menengah kejuruan (SMK) dan sekolah menengah atas (SMA) jumlah sekolah juga mengalami peningkatan.

Data perguruan tinggi dapat dilihat pada Tabel 2.18, jumlah perguruan tinggi swasta pada tahun ajaran 2004/2005 masih lebih banyak dibandingkan dengan perguruan tinggi negeri. Dari sini dapat dilihat tingkat keberhasilan pendidikan di Indonesia.

b. Sarana Peribadatan

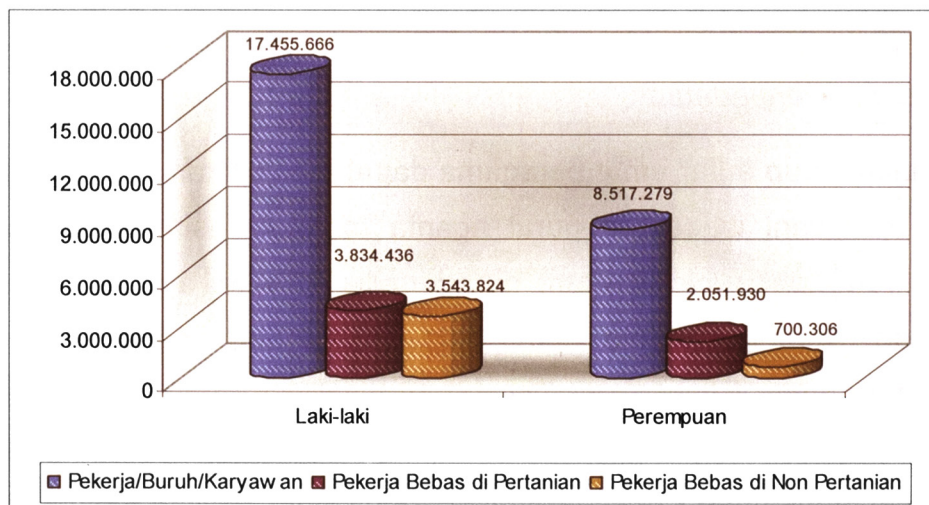
Kerukunan hidup antar umat beragama dapat menjadikan ketenteraman batin dalam menjalani ibadah menurut agama masing-masing. Adapun agama-agama yang diakui oleh negara di Indonesia ini yaitu agama Islam, Kristen Protestan, Katolik, Budha dan Hindu. Mayoritas penduduk Indonesia menganut agama Islam. Pada Tabel 2.19 disajikan sarana tempat beribadah berupa Mesjid sebanyak 226.019 buah, Surau/Langgar 489.268 buah, gereja dan kapel untuk umat Kristen/Protestan dan Katolik masing berjumlah 39.085

Jam kerja merupakan salah satu indikator produktivitas kerja. Makin lama jam kerja diasumsikan produktivitas pekerja juga semakin tinggi. Dari seluruh penduduk yang bekerja, sekitar 14,98 persen dari mereka bekerja lebih dari 54 jam seminggu, 22,07 persen bekerja 45 - 54 jam seminggu, 25,73 persen bekerja 35 - 44 jam seminggu dan sisanya sebesar 37,22 persen dapat dikelompokkan sebagai penduduk setengah pengangguran karena mereka bekerja kurang dari 35 jam seminggu. (Tabel 2.12).

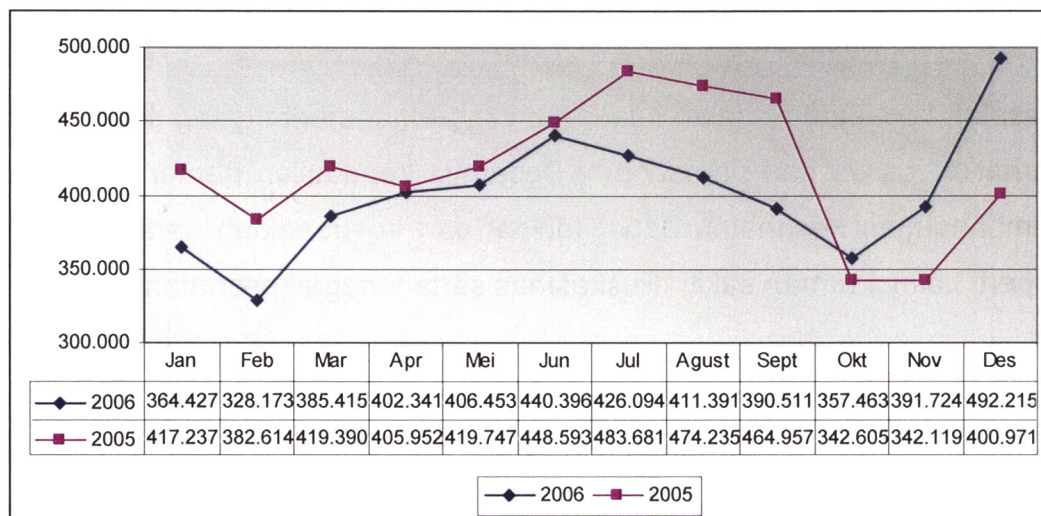
d. Pekerja

Pekerja adalah setiap orang yang menghasilkan barang atau jasa yang mempunyai nilai ekonomis baik yang menerima gaji atau bekerja sendiri yang terlibat dalam kegiatan manual. Atau tenaga kerja yang bekerja di dalam hubungan kerja pada pengusaha dengan menerima upah dan atau imbalan dalam bentuk lain. Pada tahun 2006, jumlah pekerja yang banyak menerima upah / gaji selama sebulan berada pada rentang Rp. 200.000 sampai Rp. 400.000 , didominasi di wilayah desa, dan lebih banyak kaum laki-laki yang menerimanya (Tabel 2.13). Untuk jumlah pekerja menurut klarifikasi pekerja, maka yang paling banyak adalah sebagai pekerja/buruh/karyawan dan didominasi oleh kaum laki-laki (Gambar 2.6).

Gambar 2.6 Jumlah Pekerja Menurut Klarifikasi Pekerja Tahun 2006



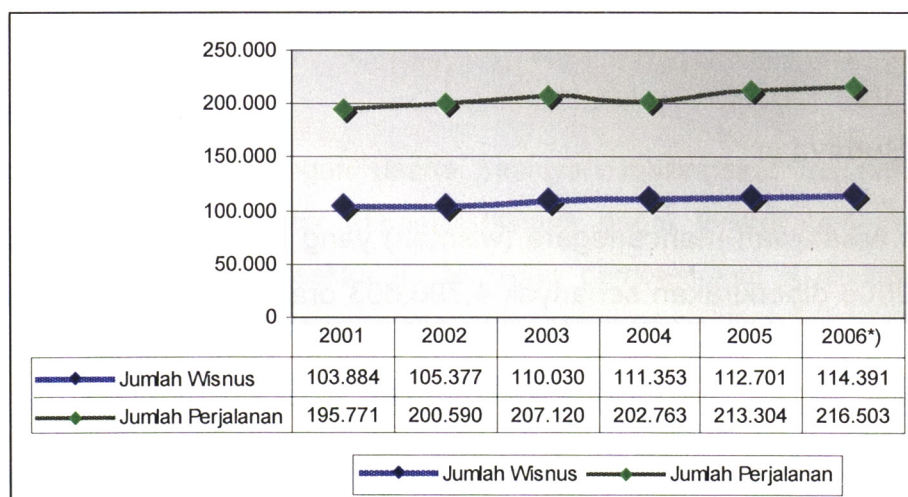
Sumber : www.nakertrans.go.id/pusdatinnaker?BPS (BPS, Sakernas Tahun 2006)

Gambar 2.7 Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara, Tahun 2005-2006

Sumber: www.budpar.go.id/page.php?ic=521&id=2474 (Pusat Data dan Informasi)

*) Data bulan November dan Desember tahun 2006, diasumsikan sama dengan tahun 2004

Jumlah wisatawan nusantara (wisnus) pada tahun 2006 diperkirakan sebanyak 114.391.718 orang, jumlah perjalanan sebanyak 216.503.459 perjalanan, dan pengeluaran wisnus diperkirakan sebesar Rp 78.67 triliun (Gambar 2.8 dan Gambar 2.9).

Gambar 2.8 Jumlah Kunjungan Wisatawan Nusantara (000 orang) dan Jumlah Perjalanan (000), Tahun 2001 - 2006

Sumber : www.budpar.go.id/page.php?ic=521&id=2474 (BPS)

*) Angka Sementara

buah dan 11.050 buah, dan untuk umat Hindu jumlah pura sebanyak 13.435 buah serta untuk umat Budha jumlah vihara/klenteng sebanyak 2.956 buah.

c. *Sarana Kesehatan*

Masalah kesehatan adalah suatu hal yang fundamental yang perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah. Besarnya kepedulian pemerintah terhadap pembangunan kesehatan dapat terlihat dari ketersediaan sarana kesehatan seperti halnya rumah sakit, Puskesmas serta tenaga kesehatan.

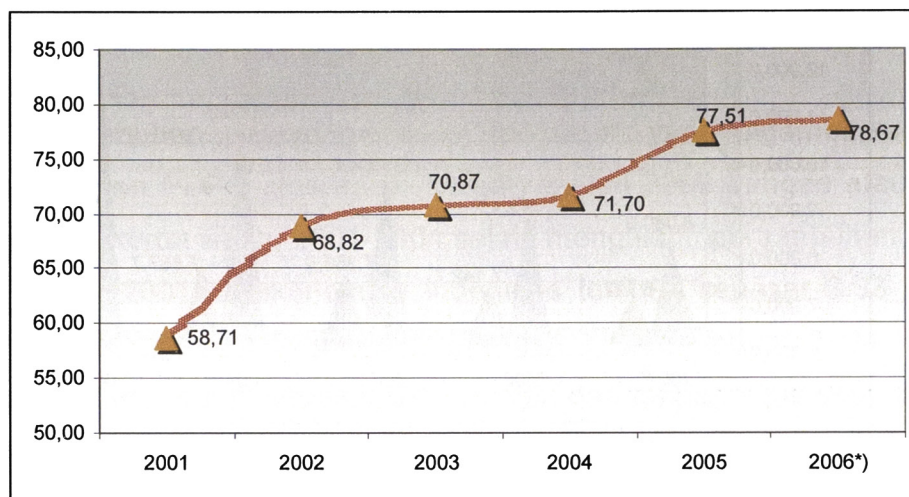
Jumlah rumah sakit yang ada secara nasional pada tahun 2005 terus mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya. Demikian juga halnya dengan jumlah puskesmas, sebesar 7.977 unit pada tahun 2003 menjadi 8.278 unit sampai dengan pertengahan tahun 2005, sedangkan jumlah puskesmas pembantu menjadi 22.785 hingga pertengahan tahun 2005.

Berdasarkan hasil Sensus Potensi Desa 2005 seperti ditunjukkan pada Tabel 2.20 bahwa untuk sarana kesehatan tersedia Rumah Sakit sebanyak 1.711 unit, Rumah Sakit Bersalin 5.348 unit. Disamping itu juga tersedia Posyandu 228.628 unit, Praktek Dokter dan Praktek Bidan masing-masing 29.634 buah dan 44.619 buah, Polindes 27.686 unit, serta Toko Khusus Obat/Jamu 18.268 unit, Apotik 9.409 unit.

2.3.2 Budaya

Jumlah wisatawan mancanegara (wisman) yang datang ke Indonesia selama tahun 2006 diperkirakan sebanyak 4.796.603 orang, atau turun sebesar 4,1% dibanding tahun 2005 sebesar 5.002.101 orang. Penerimaan devisa negara dari sektor pariwisata selama tahun 2006 diperkirakan sebanyak 4.379.73 US\$ miliar, atau mengalami penurunan sebesar 3,4% dibanding tahun 2005. Share terbesar wisman yang datang ke Indonesia melalui 13 pintu masuk utama, berasal dari pintu masuk Ngurah Rai.

Gambar 2.9 Jumlah Total Pengeluaran Wisatawan Nusantara (Rp. Triliun), Tahun 2001 - 2006



Sumber : www.budpar.go.id/page.php?ic=521&id=2474 (BPS)

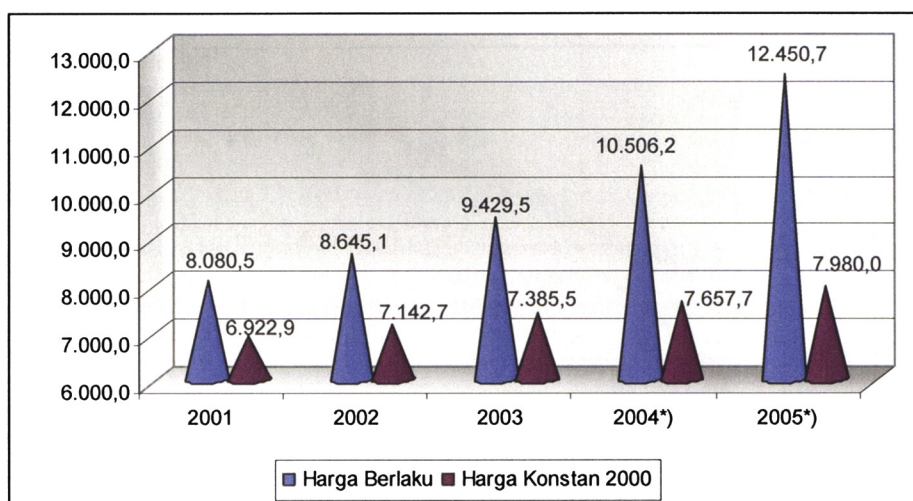
*) Angka Sementara

2.3.3 Ekonomi

a. *Produk Domestik Bruto (PDB)*

Laju pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2005 relatif makin membaik dibandingkan tahun 2004 yang hanya 11,63%. Berdasarkan penghitungan PDB menurut lapangan usaha atas dasar harga berlaku, laju pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2005 diperkirakan meningkat (Tabel 2.21). Seluruh sektor ekonomi PDB pada tahun 2005 mencatat pertumbuhan yang positif.

Beralihnya struktur lapangan usaha sebagian masyarakat Indonesia dari sektor pertanian ke sektor ekonomi lainnya dapat terlihat dari besarnya peranan masing-masing sektor ini terhadap pembentukan PDB Indonesia. Nilai PDB menurut lapangan usaha atas dasar harga konstan 2000 pada tahun 2004 adalah sekitar 5,05% dengan komponen terbesar pada lapangan usaha industri pengolahan (Tabel 2.22). Keseluruhan sektor ekonomi yang ada pada PDB, pada tahun 2004 mencatat pertumbuhan yang positif dan diperkirakan tetap positif sampai tahun 2005.

Gambar 2.10 Produk Domestik Bruto per Kapita 2001-2005 (Ribu Rupiah)

Sumber : BPS, Laporan Perekonomian Indonesia 2005

*) Angka Sementara

**) Angka Sangat Sementara

PDB per kapita atas harga berlaku menggambarkan besarnya nilai tambah domestik bruto per penduduk Indonesia secara nominal, sedangkan PDB per kapita atas dasar harga konstan 2000 berguna untuk mengetahui nilai tambah nyata serta pertumbuhan nyata per kapita. Perkembangan PDB per kapita atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan 2000 selama kurun waktu 2001 sampai 2005 menunjukkan peningkatan yang cukup berarti (Gambar 2.10).

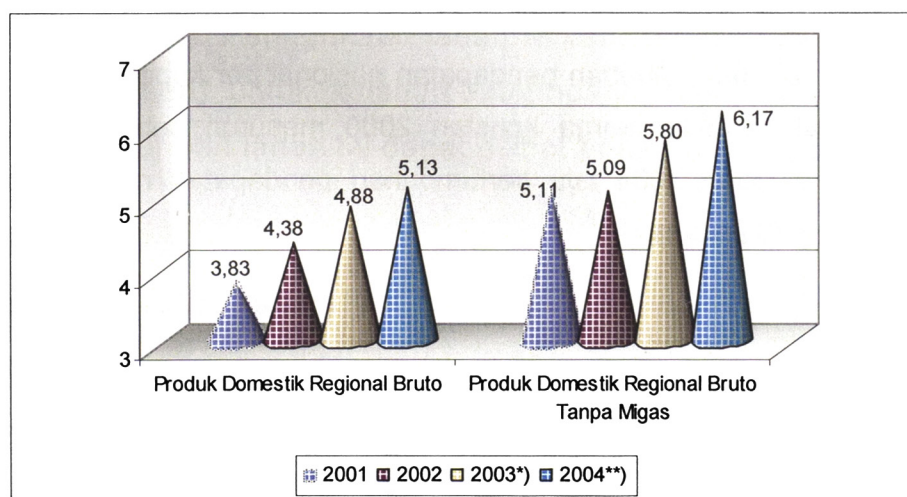
b. *Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)*

Besaran PDRB per kapita suatu daerah tergantung pada besaran PDRB dan jumlah penduduk. Berdasarkan PDRB per kapita atas dasar harga berlaku dengan migas, Kalimantan Timur, DKI Jakarta, dan Riau merupakan provinsi yang mempunyai PDRB per kapita tertinggi. PDRB per kapita DKI Jakarta lebih kecil dari Kalimantan Timur karena jumlah penduduk DKI Jakarta lebih besar dari Kalimantan Timur. Berdasarkan harga berlaku dengan migas, PDRB Kalimantan Timur, DKI Jakarta, dan Riau masing-masing sebesar 47,676 juta rupiah, 43,104 juta rupiah, dan

26,222 juta rupiah. Bila migas diabaikan, PDRB Kalimantan Timur dan Riau masing-masing hanya sebesar 19,004 juta rupiah dan 16,971 juta rupiah (lihat Tabel 2.23 dan Tabel 2.24).

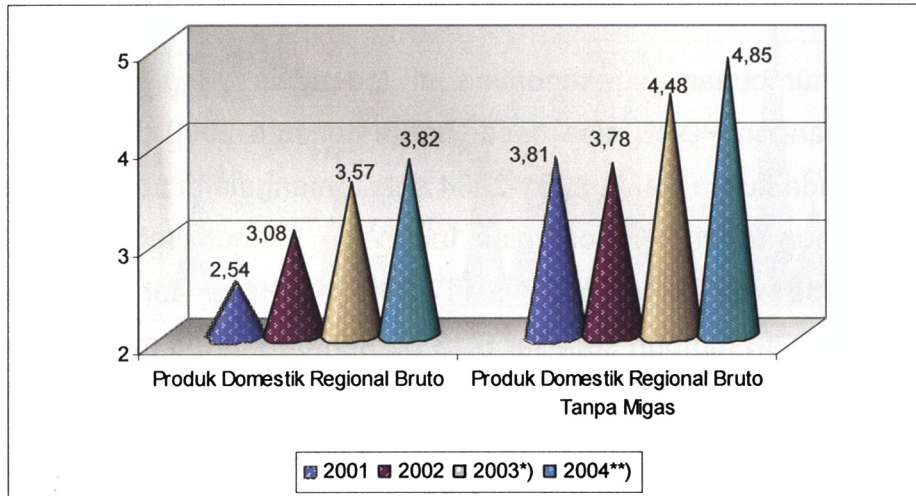
Laju pertumbuhan perekonomian di Indonesia yang digambarkan oleh perkembangan PDRB atas dasar harga konstan 2000 dengan atau tanpa migas pada kurun waktu 2001-2004 selalu mengalami pertumbuhan positif. Pada tahun 2001 perekonomian Indonesia tumbuh sebesar 3.83 persen dan tanpa migas sebesar 5.11 persen. Pada tahun 2004 kinerja perekonomian tumbuh sebesar 5.13 persen dan tanpa migas sebesar 6.17 persen. Tahun 2002 laju pertumbuhan perekonomian turun sebesar 5.09 persen untuk tanpa migas, tapi penuruna itu tidak berarti dengan kenaikan pada tahun berikutnya sebesar 5.80 persen (Gambar 2.11). Hal demikian juga terjadi pada perkembangan PDRB per kapita atas dasar harga konstan 2000 dengan atau tanpa migas (Gambar 2.12).

Gambar 2.11 Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2000 menurut Provinsi (persen), 2001-2004



Sumber : BPS, Statistik Indonesia, 2005/2006

Gambar 2.12 Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Per Kapita Atas Dasar Harga Konstan 2000 menurut Provinsi (persen), 2001-2004



Sumber : BPS, Statistik Indonesia, 2005/2006

c. *Pendapatan per Kapita*

Secara umum pendapatan setiap penduduk Indonesia dicerminkan oleh pendapatan nasional per kapita. Pada tahun 2004 ini besarnya pendapatan nasional per kapita atas dasar harga berlaku meningkat dari 9,3 juta rupiah pada tahun 2004 menjadi sekitar 11,2 juta rupiah pada tahun 2005. Namun demikian laju pertumbuhan pendapatan nasional per kapita pada tahun 2005 bila dilihat berdasar harga konstan 2000 menurun sebesar 4,73 persen, sementara tahun 2004 laju pertumbuhan pendapatan nasional per kapita sebesar 5,73 persen.

2.4. Potensi Lahan

2.4.1 Penggunaan Lahan Pertanian

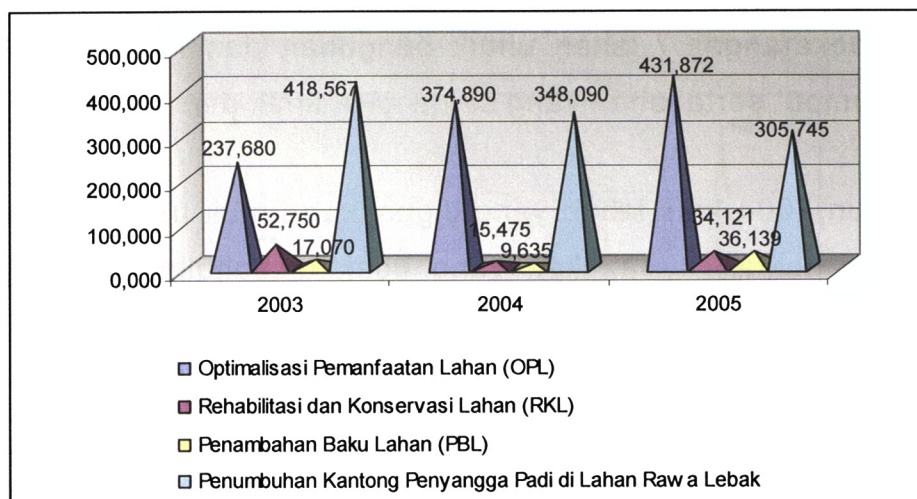
Negara Indonesia terkenal dengan sebutan negara agraris, hal ini dapat ditunjukkan dengan besarnya luas lahan yang digunakan untuk pertanian. Dari seluruh luas lahan yang ada di Indonesia, lebih dari 74,52 persen

digunakan untuk usaha pertanian, yaitu untuk tegal/kebun/ladang/huma, tambak, kolam / tebat / empang, lahan untuk tanaman kayu-kayuan, perkebunan negara / swasta dan sawah. Sedangkan sisanya digunakan sebagai pekarangan / lahan untuk bangunan dan halaman sekitarnya, padang rumput serta lahan yang sementara tidak diusahakan.

Pada tahun 2004 luas lahan yang digunakan untuk usaha pertanian ada 52,36 juta hektar, sedangkan yang tidak diusahakan untuk pertanian sebesar 21,05 juta hektar. Bila dirinci menurut penggunaannya, lahan yang paling luas adalah lahan yang digunakan untuk perkebunan yaitu sebesar 19,57 juta hektar (26,66 persen). Urutan terbesar selanjutnya lahan yang digunakan untuk tegal/kebun ladang/huma sebesar 14,88 juta hektar (20,27 persen), kemudian lahan yang sementara tidak diusahakan dan lahan untuk tanaman kayu-kayuan masing-masing sekitar 12,42 juta hektar dan 9,45 juta hektar (16,92 persen dan 12,87 persen). Selain itu, untuk sawah mencapai 7,70 juta hektar (10,48 persen), sedangkan pekarangan/lahan untuk bangunan dan halaman sekitarnya 5,55 juta hektar (7,57 persen). Penggunaan untuk padang rumput dan tambak, masing-masing sebesar 3,07 juta hektar (4,19 persen) dan 0,54 juta hektar (0,73 persen). Penggunaan lahan terkecil adalah sekitar 0,23 juta hektar (0,31 persen) untuk kolam/tebat/empang, selanjutnya data rinci mengenai penggunaan lahan ini dapat dilihat pada Tabel 2.25.

2.4.2 Perluasan Areal Tanam

Bagi sasaran perluasan areal tanam tahun 2003-2005 yang meningkat adalah Optimalisasi Pemanfaatan Lahan (OPL). Untuk Rehabilitasi dan Konservasi Lahan (RKL), dan Penambahan Baku Lahan (PBL) sasarannya bervariasi naik dan turun dari tahun 2003-2005 (Gambar 2.13).

Gambar 2.13 Sasaran Perluasan Areal Tanam (Ha), Tahun 2003-2005

Sumber : www.deptan.go.id/pla/statareal/t54.htm (Departemen Pertanian)

2.5 Perumahan, Lingkungan Hidup dan Bencana Alam

2.5.1 Perumahan

Perumahan dibagi menjadi permukiman mewah dan permukiman kumuh. Permukiman mewah adalah kelompok hunian yang oleh masyarakat setempat dianggap mewah, termasuk kondominium / apartemen. Permukiman mewah dengan ciri-ciri, jumlahnya ≥ 10 rumah dan atau mempunyai kendaraan roda empat. Biasanya mempunyai pengamanan khusus disekitar perumahan dengan luas tanah/kavling lebih dari 200 m².

Permukiman kumuh adalah lingkungan hunian dan usaha yang ditandai oleh :

1. Banyak rumah tidak layak huni
2. Banyak saluran pembuangan limbah macet
3. Penduduk/bangunan sangat padat
4. Banyak penduduk buang air besar tidak di jamban
5. Biasanya berada di areal marginal (seperti di tepi sungai, pinggir rel kereta api)

Rumah tidak layak huni adalah rumah yang dibuat dari bahan bekas/sampah (seperti potongan triplek, lembaran plastik sisa, dsb) yang dipertimbangkan tidak cocok untuk bertempat tinggal atau terletak pada areal yang diperuntukkan bukan untuk permukiman, termasuk rumah gubuk.

Jika dilihat dari jenis permukiman, maka jumlah permukiman mewah di Indonesia lebih sedikit (2.168) dibandingkan dengan tidak mewah (67.789), demikian pula permukiman kumuh lebih sedikit (6.190) dibandingkan dengan permukiman tidak kumuh (63.767). Sedangkan permukiman mewah lebih sedikit dibandingkan dengan permukiman kumuh, dan permukiman tidak mewah lebih banyak dibandingkan dengan permukiman tidak kumuh. Provinsi-provinsi yang banyak terdapat permukiman mewah antara lain Jawa Barat (371), Jawa Timur (270), DKI Jakarta (162). Adapun provinsi-provinsi yang banyak permukiman kumuh antara lain Jawa Barat (777), Sumatera Utara (459) dan Sulawesi Selatan (393) (Tabel 2.26).

Pada Tabel 2.27 terlihat, bahwa jumlah permukiman kumuh lebih banyak di Jawa Barat, yakni sebesar 2.541 lokasi dengan jumlah bangunan rumah sebanyak 86.616 unit dengan jumlah keluarga 111.521 keluarga. Adapun jumlah bangunan rumah di permukiman kumuh paling banyak di DKI Jakarta, yakni sebesar 124.166 unit dengan jumlah keluarga yang tinggal ada 199.603 keluarga dan tersebar di 750 lokasi. Disusul provinsi Jawa Barat dengan jumlah bangunan rumah sebesar 86.616 unit dengan 111.521 keluarga yang tinggal disana dan tersebar di 2.541 lokasi.

Selain permukiman mewah dan kumuh, ada tempat lain yang dijadikan tempat tinggal oleh warga. Hal ini bisa dilihat pada jumlah keluarga yang bertempat tinggal di bantaran/tepi sungai dan atau sempadan sungai, serta keluarga yang tinggal di bawah jaringan listrik tegangan tinggi.

Yang dimaksud bantaran sungai adalah lahan pada kedua sisi sepanjang palung sungai dihitung dari tepi sampai dengan kaki tanggul sebelah dalam (PP No.35 Tahun 1991 tentang sungai). Palung adalah cekungan yang terbentuk oleh aliran sungai secara alamiah, atau galian untuk mengalirkan sejumlah air tertentu (Keppres No.32/1990). Sempadan sungai adalah kawasan kiri kanan sungai, termasuk sungai buatan/kanal/saluran irigasi primer yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai.

Kriteria sempadan sungai :

1. Sekurang-kurangnya 100 meter di kiri kanan sungai besar dan 50 meter di kiri kanan anak sungai yang berada di luar permukiman
2. Untuk sungai di kawasan permukiman antara 10-15 meter

Jumlah keluarga yang tinggal di bantaran/tepi sungai mencapai 931.576, sedangkan jumlah bangunan rumah ada 801.840. Selain itu masih cukup banyak jumlah desa/kelurahan (14.955) dimana masih ada keluarga yang tinggal di bantaran/tepi sungai, walaupun masih lebih banyak jumlah desa /kelurahan (35.528) dimana tidak ada keluarga yang tinggal di bantaran/sungai (Tabel 2.28).

Dikatakan jaringan listrik tegangan tinggi apabila kawat yang melintas mempunyai tegangan listrik lebih dari 500 KV. Keluarga dan bangunan yang dicatat pada rincian ini adalah keluarga dan bangunan yang berada di bawah jaringan dan berjarak 20 meter dari lintasan jaringan tersebut. (Permentamben No.1.P/47/MTE/1992).

Jumlah desa/kelurahan yang tidak ada listrik tegangan tinggi ada 45.956. Sedangkan yang ada listrik tegangan tinggi 24.001 desa/kelurahan. Dari jumlah tersebut terdapat 20.623 desa/kelurahan dimana tidak ada keluarga yang tinggal di bawah jaringan listrik tegangan tinggi, serta ada

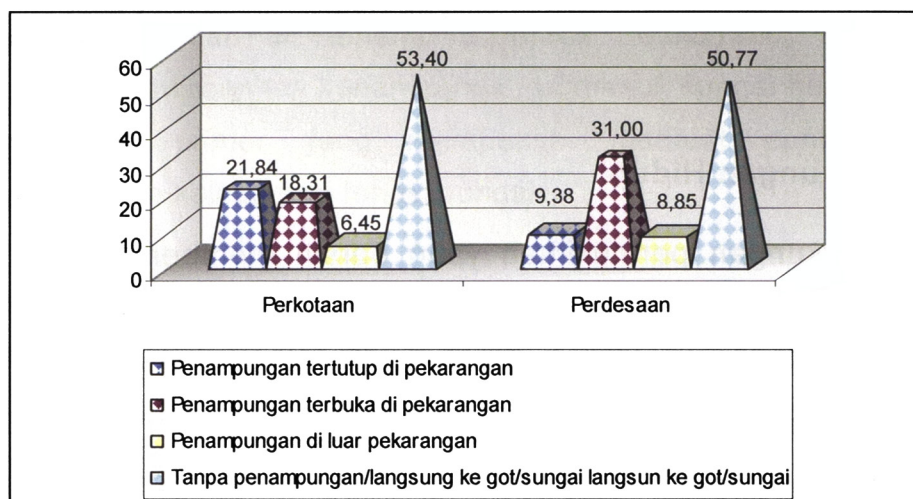
3.378 desa/kelurahan dimana masih ada keluarga yang tinggal di bawah jaringan listrik tegangan tinggi. Jumlah keluarga yang tinggal di bawah jaringan listrik tegangan tinggi sebanyak 122.292, sedangkan jumlah bangunan rumahnya ada sebanyak 106.746 buah (Tabel 2.29).

2.5.2 Lingkungan Hidup

Kondisi lingkungan permukiman yang bersih memberikan kenyamanan pada penghuninya. Lingkungan yang tidak bersih merupakan sumber penyakit seperti demam berdarah, malaria, penyakit perut, dan penyakit kulit, jadi rumah tangga perlu membersihkan lingkungan permukimannya. Untuk itu masyarakat diharapkan dapat bergotong royong membersihkan selokan, pekarangan rumah dan lingkungan sekitar rumah.

Dari Gambar 2.14 terlihat bahwa sekitar 50 persen rumah tangga tidak memiliki tempat penampungan limbah/mandi/dapur/cuci atau langsung di buang ke got/sungai. Keadaan ini terjadi baik daerah perkotaan maupun daerah perdesaan. Hal ini menandakan bahwa kesadaran masyarakat akan pentingnya tempat penampungan air limbah masih relatif kecil. Kebiasaan ini mungkin menjadi penyebab timbulnya polusi air tanah yang dapat menimbulkan berbagai penyakit, serta tersumbatnya saluran air/got/sungai yang dapat menyebabkan banjir pada musim hujan.

Gambar 2.14 Persentase Rumah Tangga Menurut Tempat Penampungan Air Limbah/Mandi/Dapur/Cuci dan Daerah, Tahun 2004



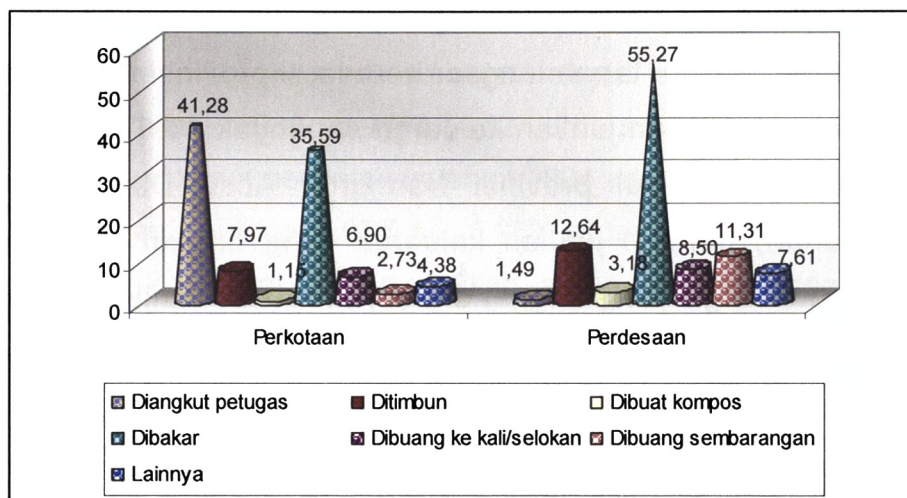
Sumber : Statistik Perumahan dan Permukiman, BPS, 2004

Persentase penduduk yang membuang air limbahnya ke tempat penampungan tertutup, hanya sebesar 14,68 persen (rata-rata perkotaan dan perdesaan). Keadaan di perkotaan tampak lebih baik dibandingkan dengan di perdesaan. Sudah cukup banyak rumah tangga di perkotaan yang memiliki tempat penampungan tertutup di pekarangan (21,84%), sebaliknya di daerah perdesaan, persentase rumah tangga yang memiliki tempat penampungan terbuka di pekarangan sebesar 31,00 persen.

Salah satu perilaku hidup sehat yang mempengaruhi kebersihan lingkungan adalah cara pembuangan sampah. Gambar 2.15 terlihat sebagian besar rumah tangga membuang sampah dengan cara membakar (rata-rata perkotaan dan perdesaan), kemudian diangkut oleh petugas (rata-rata perkotaan dan perdesaan), serta menimbun sampah (rata-rata perkotaan dan perdesaan). Walau demikian yang membuang sampah dengan cara yang salah (seperti membuang sampah ke kali, dibuang sembarangan dan lainnya) masih cukup besar. Di daerah perkotaan, persentase tertinggi cara pembuangan sampah adalah

dengan cara diangkut oleh petugas (41,28%) berbeda dengan di perdesaan yang sebagian besar dengan cara dibakar (55,27%).

Gambar 2.15 Persentase Rumah Tangga Menurut Cara Pembuangan Sampah Dan Daerah, Tahun 2004



Sumber : Statistik Perumahan dan Permukiman, BPS, 2004

2.5.3 Bencana Alam

Bencana alam dapat menyebabkan terjadinya gangguan lingkungan hidup, dimana air, tanah, udara, flora dan fauna akan berubah baik langsung maupun tidak langsung yang membahayakan kesehatan, keselamatan, dan kesejahteraan makhluk hidup, dan biasanya terjadi dalam waktu yang lama. Selain itu perubahan lingkungan hidup bisa terjadi karena adanya polusi atau kerusakan yang disebabkan oleh manusia sendiri. Bencana alam juga dapat menimbulkan masalah sosial.

Bencana alam adalah peristiwa alam yang menimbulkan kesengsaraan, kerusakan, kerugian, dan penderitaan penduduk. Gangguan seperti ini bisa terjadi dengan sendirinya (alamiah) atau disebabkan oleh aktivitas manusia.

Banjir merupakan jenis bencana alam yang paling besar menelan korban manusia, baik yang luka dan menderita, maupun yang meninggal dunia. Berdasarkan laporan Direktorat Urusan Bencana, Departemen Sosial, jumlah korban bencana alam tahun 2004 lebih banyak dibandingkan tahun sebelumnya. Pada Tabel 2.30 terlihat, bahwa daerah yang rawan gempa bumi berada di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (4.257 desa/kelurahan) dengan jumlah keluarga yang tinggal sebesar 706.303. Adapun daerah rawan tanah longsor berada di provinsi Jawa Barat (1250 desa/kelurahan) dengan jumlah keluarga sebanyak 86.570. Untuk daerah rawan banjir berada di provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (1.254 desa/kelurahan) dengan jumlah keluarga yang tinggal sebesar 92.789. Sedangkan keluarga yang tinggal di daerah rawan banjir bandang ada di provinsi Naggroe Aceh Darussalam (188 desa/kelurahan) dengan jumlah keluarga yang tinggal sebesar 12.600. Rawan bencana jenis abrasi pantai banyak terdapat di provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dengan jumlah keluarga sebesar 6.831.

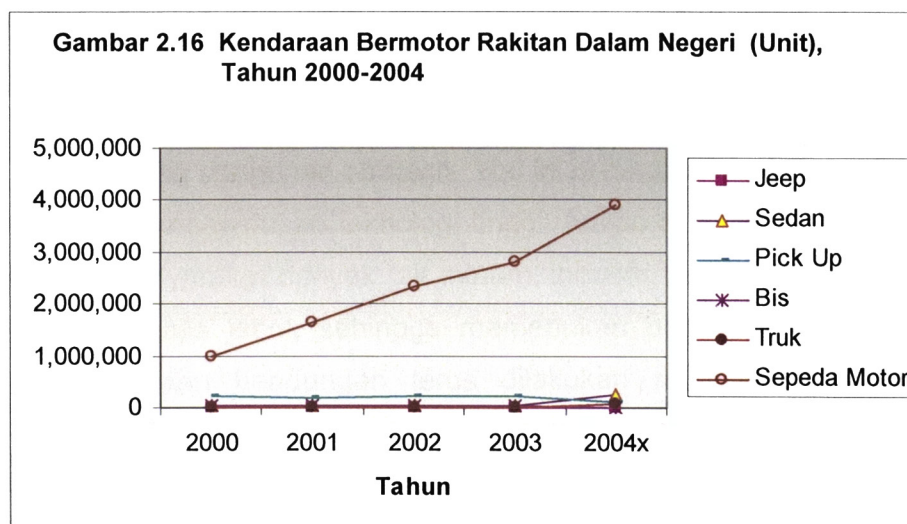
Musim hujan tahun 2005-2006 menimbulkan berbagai bencana alam di bumi Indonesia ini. Kejadian bencana alam tersebut meliputi banjir, tanah longsor, gempa bumi, gunung berapi, gelombang tsunami, dan angin ribut. Frekuensi kejadian bencana alam terbanyak berada di Wilayah Tengah (DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, D.I.Y, Jawa Timur, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan), yakni sejumlah 273. Di Wilayah Tengah itu juga banyak rumah, fasilitas umum, jembatan, bendung, tanggul yang rusak/roboh/hanyut. Sedangkan yang tergenang paling banyak adalah permukiman, rumah, jalan, jembatan, sawah, dan perikanan. Jumlah orang meninggal, hilang, serta mengungsi pun terbanyak di Wilayah Tengah ini (Tabel 2.31). Hal ini perlu mendapat perhatian yang serius dalam pembuatan program / perencanaan pembangunan dan pengembangan infrastruktur PU.

2.6 Angkutan

Angkutan adalah suatu kegiatan usaha menyediakan jasa angkutan penumpang dan atau barang/ternak dari suatu tempat ke tempat lain dengan menggunakan alat angkutan bermotor maupun tidak bermotor, baik melalui darat, air maupun udara. Disini hanya dibatasi angkutan umum di darat saja.

Jumlah kendaraan bermotor rakitan dalam negeri tahun 2004 naik 38,49% dibandingkan tahun 2003 menjadi 4,32 juta unit. Komposisi kendaraan bermotor rakitan dalam negeri pada tahun 2004 adalah 90,23% jenis sepeda motor, 2,14% jenis pick up, 0,03% bis, 5,96% sedan, 1,64% truk, dan 0,004% jeep. (Gambar 2.16). Hal ini menunjukkan, akses jalan ke tempat prasarana angkutan umum itu perlu lebih ditingkatkan.

Pada tahun 2004 jumlah kendaraan bermotor yang tercatat di Kepolisian RI diperkirakan sebanyak 30,78 juta unit. Komposisinya pada tahun 2004 terdiri atas : 74,93% sepeda motor, 14,51% mobil penumpang, 7,53% truk, dan 3,03% bis (Tabel 2.32). Jumlah kendaraan bermotor terbanyak di provinsi DKI Jakarta, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Sumatera Utara, dan Bali.



Sumber : BPS, Statistik Indonesia 2005/2006 (Departemen Perindustrian dan Perdagangan)
Catatan : x Angka Sementara

BAB III

INFORMASI STATISTIK KINERJA PEMBANGUNAN PRASARANA DAN SARANA KE-PU-AN

3.1 Prasarana dan Sarana Sumber Daya Air

Air merupakan unsur utama bagi kehidupan di planet bumi ini. Dalam bidang kehidupan ekonomi modern, air juga merupakan hal utama untuk budidaya pertanian, industri, pembangkit tenaga listrik, dan transportasi. Air seharusnya diperlakukan sebagai bahan yang sangat bernilai, dimanfaatkan secara bijak, dan dijaga terhadap pencemaran. Pengelolaan sumber daya air dilaksanakan secara menyeluruh, terpadu, seimbang dan berkelanjutan serta berwawasan lingkungan. Indonesia merupakan negara dengan potensi sumber daya air nomor 5 terbesar di dunia

Ada tiga permasalahan air yaitu terlalu sedikit menimbulkan kekeringan, terlalu banyak menimbulkan banjir dan terlalu kotor menimbulkan pencemaran lingkungan. Sejalan dengan UU No.7 Tahun 2004 tentang SDA, pengelolaan SDA harus melalui tiga aspek, yaitu konservasi, pendayagunaan, dan pengendalian daya rusak air.

3.1.1 Bendungan

Bendungan adalah bangunan strategis. Hal ini disebabkan pembangunan dan pengelolaannya memerlukan teknologi tinggi, fungsi dan manfaat bendungan menyangkut masyarakat banyak (air minum, industri, pertanian, listrik), resiko yang besar apabila jebol, sehingga memerlukan pemeliharaan yang teliti. Dalam pengelolaan bendungan terus dilakukan reservoir operation dan monitoring setiap musimnya. Kedua hal tersebut bertujuan bagaimana mengoperasikan yang disesuaikan dengan kebutuhan dan ketersediaan air.

Jika ketersediaan air karena curah hujan menurun maka pengeluarannya harus dihemat, sehingga ketersediaan air akan tetap terjaga. Untuk itu keterlibatan pemerintah pusat dalam pengelolaan bendungan ini sangat diperlukan.

Pembangunan bendungan tergantung dari topografi dari masing-masing daerah serta berapa besar air yang mengalir dalam skala tahunan. Data bendungan terakhir menyebutkan, bahwa jumlah bendungan besar di Indonesia ($H_{\text{bend.}} > 15$ m atau $V_{\text{waduk}} > 500$ ribu m^3) ada 122 buah. Bendungan yang telah diinventarisasi kerusakannya (2004-2005) sejumlah 59 buah. Untuk bendungan yang belum didata, dimana kondisinya masih belum diidentifikasi ada sejumlah 61 buah. Tabel 3.1 adalah data daftar bendungan di Indonesia.

3.1.2 Irigasi

Kondisi prasarana irigasi tahun 2005, dengan luas total 8,38 juta Ha terdiri dari 7,2 juta Ha luas baku irigasi dan 1,18 juta Ha rawa. Dari luas baku irigasi itu, prasarana yang terbangun ada 6,7 juta Ha dan yang belum terbangun ada 0,5 juta Ha. Prasarana terbangun yang kondisinya rusak ada 1,5 juta Ha, tetapi kondisi yang baik ada 5,2 juta Ha. Kondisi prasarana yang rusak dibagi lagi menjadi rusak berat sebesar 340 ribu Ha dan rusak ringan sebesar 1,16 juta Ha. Sedangkan prasarana dalam kondisi baik dibagi menjadi sudah sawah sebesar 4,9 juta Ha dan yang belum sawah ada 0,3 juta Ha.

Prasarana irigasi yang terbangun terdiri dari jaringan irigasi, bendung, dan waduk. Jumlah jaringan irigasi ada 6.771.826 Ha, dimana kondisi yang rusak berat sebesar 341.327 (5%) dan rusak ringan sebesar 1.178.548 (17,4%). Sedangkan untuk keandalan airnya, waduk bisa mencapai 719.273 Ha (10,70) dan non waduk ada 5.946.544 Ha (89,30). Jumlah bendung yang tercatat ada 11.547 buah dengan kondisi rusak berat sebesar 49 (0,24%). Jumlah waduk

ada 273 buah dengan kondisi rusak berat sebesar 14 (5,1%) dan rusak ringan 5 buah (1,8%).

Program pembangunan irigasi terdiri dari beberapa kegiatan. Diantaranya adalah rehabilitasi prasarana air baku, pembangunan saluran air baku, pembangunan embung, pembangunan bendung karet/waduk/bendung. Jenis sarana air baku sendiri diantaranya adalah embung, mata air/sungai, bendung/bendungan, dan air tanah. Pemanfaatan air tanah untuk irigasi dilaksanakan secara selektif dan sedapat mungkin diupayakan memenuhi kriteria teknis maupun sosial ekonomis.

Pada Tabel 3.2 terlihat, bahwa jumlah daerah irigasi terbanyak di Provinsi Jawa Timur, yakni 7.688, disusul dengan Provinsi Jawa Tengah sebesar 7.004 serta Provinsi DI Yogyakarta sebesar 2.178. Total jumlah irigasi di Indonesia, yakni ada 25.016. Adapun di Provinsi Jawa Timur mempunyai luas fungsional (ada jaringan utama) terbesar, yakni 903.924 Ha.

Untuk skala irigasi kecil (<1000 Ha), jumlah terbesar di provinsi Jawa Tengah, yakni 5.886 Ha dan yang terluas adalah provinsi Jawa Timur, 390.487 Ha. Jumlah terbesar untuk skala irigasi sedang (1000-3000 Ha) adalah di provinsi Jawa Timur, yakni 121 dengan luas 200.931 Ha. Adapun untuk skala irigasi besar (>3000 Ha), jumlah terbesar di provinsi Jawa Tengah, yakni 56 buah dan yang terluas ada di provinsi Jawa Barat sebesar 963.517 Ha (Tabel 3.3).

Luasan irigasi dan rawa <1000 Ha, jumlah paling banyak ada di provinsi Jawa Tengah, yakni ada 479.045. Untuk luasan irigasi dan rawa antara 1000-3000 Ha, jumlah terbanyak ada di provinsi Riau, yakni ada 168.315. Adapun luasan irigasi dan rawa >3000 Ha, jumlah paling banyak ada di provinsi Sumatera Selatan, yakni ada 539.153. Keterangan selengkapnya ada di Tabel 3.4.

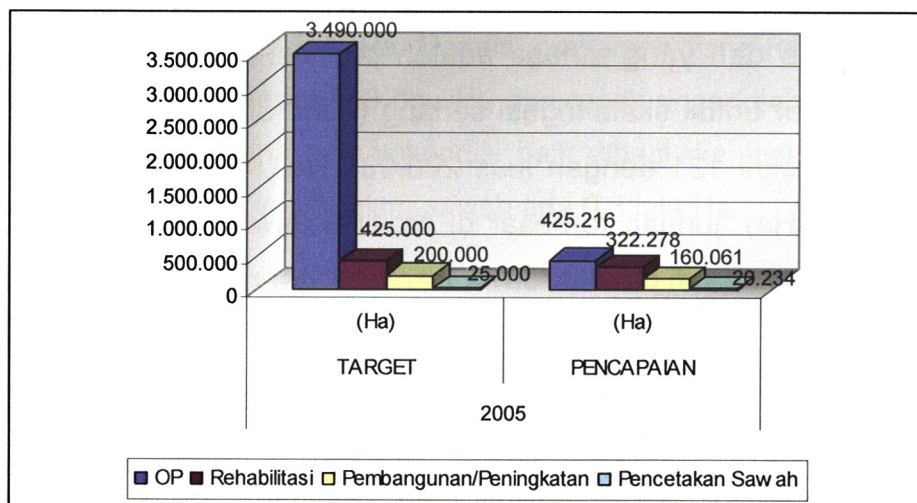
Saat ini irigasi teknis di Indonesia ada sekitar 8 juta Ha, sementara volume air waduk yang ada di Indonesia baru bisa memasok air irigasi sekitar 700-ribu

Ha. Hal tersebut menunjukkan baru 10 persen irigasi teknis yang terlayani melalui irigasi.

Rencana strategi irigasi (2005-2009) dibuat berdasarkan analisis kebutuhan peningkatan luas areal tanam. Kebijakannya adalah memberi prioritas pada pelaksanaan operasi dan pemeliharaan secara optimum, rehabilitasi jaringan yang telah mengalami penurunan fungsi. Serta penyelesaian pembangunan jaringan irigasi agar berfungsi optimum (*full development*) dengan memperhatikan konsep pengelolaan sumber daya air yang komprehensif; terpadu dengan basis wilayah sungai, serta rencana tata ruang wilayah.

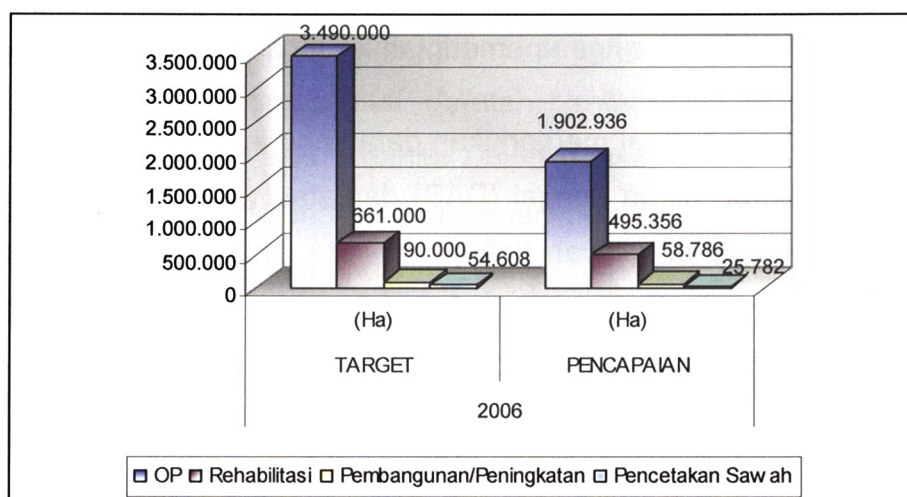
Untuk pencapaian renstra tersebut, sejak TA 2005 telah dilakukan kegiatan-kegiatan Operasi dan Pemeliharaan (OP), Rehabilitasi, Pembangunan/ Peningkatan dan Pencetakan Sawah di TA.2005 dan TA.2006, seperti pada gambar berikut :

Gambar 3.1 Target dan Pencapaian Program 2005



Sumber : Informasi Eksekutif, SDA, 2006

Pencapaian program 2005 dan 2006 dibawah target Renstra, karena dana yang dialokasikan tidak mencukupi.

Gambar 3.2 Target dan Pencapaian Program 2006

Sumber : Informasi Eksekutif, SDA, 2006

3.1.3 Sungai dan Wilayah Sungai

Sungai, termasuk anak-anak sungai dan sungai buatan, adalah alur atau tempat atau wadah air berupa jaringan pengaliran air, sedimen, dan ekosistem yang terkait mulai dari hulu dan/atau mata air sampai muara, dengan dibatasi kanan dan kiri di sepanjang pengalirannya oleh garis sempadan. Garis sempadan sungai yaitu garis batas luar pengamanan sungai. Sungai sebagai sumber air merupakan salah satu sumber daya alam yang mempunyai fungsi serbaguna bagi kehidupan dan penghidupan manusia.

Wilayah sungai adalah kesatuan wilayah tata pengairan sebagai hasil pengembangan satu atau lebih daerah pengaliran sungai. Pengaturan kewenangan dan tanggung jawab pengelolaan sumber daya air oleh Pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota didasarkan pada keberadaan wilayah sungai yang bersangkutan, yaitu :

- (a) wilayah sungai lintas provinsi, wilayah sungai lintas negara, dan/atau wilayah sungai strategis nasional menjadi kewenangan Pemerintah

- (b) wilayah sungai lintas kabupaten/kota menjadi kewenangan pemerintah provinsi
- (c) wilayah sungai yang secara utuh berada pada satu wilayah kabupaten/kota menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota

Penetapan wilayah sungai memerlukan data yang lengkap dan akurat tentang keberadaan daerah aliran sungai (DAS) dan/atau wilayah sungai (WS) yang secara utuh berada di wilayah kabupaten/kota, lintas kabupaten/kota, lintas provinsi, lintas negara, dan strategis nasional di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada Tabel 3.5 disebut data sungai berdasar wilayah sungai di Indonesia yang sementara didapatkan.

3.1.4 Rawa dan Pantai

Rawa adalah sumber air (lahan) yang berupa kawasan dengan topografi hampir datar (kemiringan $\leq 4\%$) yang tergenang air, baik terus-menerus atau musiman secara alamiah. Indonesia memiliki luas lahan sekitar 162,4 juta Ha, dengan prosentasi daerah rawa 20,56% dan lahan kering sebesar 79,44%. Dewasa ini diperkirakan 30-35 ribu Ha lahan pertanian beralih fungsi menjadi daerah pemukiman dan industri. Pemerintah berupaya mengembangkan daerah rawa menjadi areal pertanian yang dilandasi konsep pembangunan secara bertahap. Daerah rawa di Indonesia tersebar sekitar 33,393 juta Ha di sepanjang pantai Pulau Sumatera, Kalimantan, Sulawesi dan Papua, dengan rincian 60% (20,096 juta Ha) daerah rawa pasang surut dan 40% (13,296 juta Ha) daerah rawa non pasang surut.

Pada Tabel 3.6 terdapat data rawa berdasarkan provinsi di Indonesia. Dari tabel tersebut disebutkan, jumlah rawa keseluruhan dari data yang masuk sebanyak 1.983. Untuk peningkatan fungsi dan manfaat banyak terdapat di Provinsi Riau, yakni sebesar 1.071.021. Di sini rawa potensial lebih banyak dibandingkan dengan rawa fungsional. Rawa potensial (1.078.069) dan rawa fungsional (666.234) banyak terdapat di Provinsi Riau.

Daerah pantai atau pesisir adalah suatu daratan beserta perairannya dimana pada daerah tersebut masih dipengaruhi baik oleh aktivitas darat maupun oleh aktivitas laut. Perlindungan dan pengamanan daerah pantai bertujuan untuk pengamanan masyarakat yang tinggal di sepanjang pantai, perlindungan fasilitas umum di sepanjang pantai, daratan pantai terhadap ancaman erosi dan abrasi, perlindungan alami pantai (*sand dunes*, terumbu karang, hutan mangrove), terhadap pencemaran lingkungan perairan pantai (limbah rumah tangga, limbah industri). Penanganan bangunan pengamanan pantai bisa dilakukan dengan bangunan sipil, yang berupa tembok laut, *revetment*, krib tegak lurus pantai, atau bangunan non sipil, yang berupa pengisian pasir dan penanaman bakau.

3.1.5 Danau

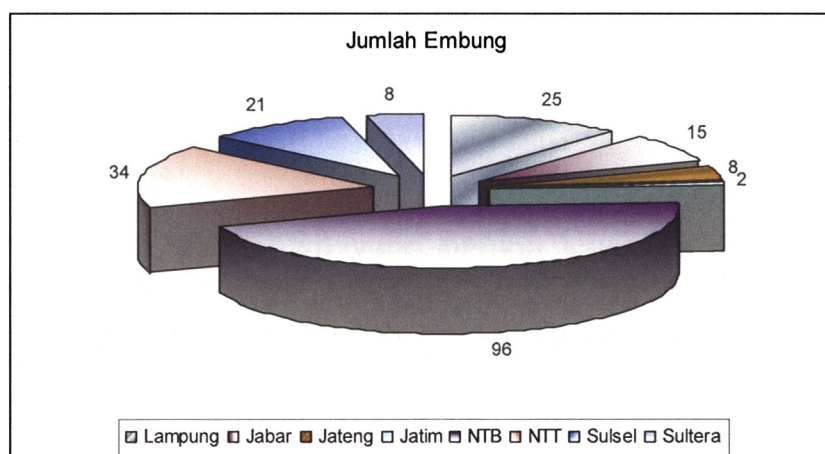
Danau adalah wadah air dan ekosistem yang terbentuk secara alamiah termasuk situ dan wadah air sejenis dengan sebutan istilah lokal. Situ atau danau buatan berfungsi sebagai daerah resapan air, pemasok cadangan air tanah, pendingin suhu udara kota, pengendali banjir (nilai ekologis), wisata olahraga air, seperti perahu dayung, kano, memancing (nilai ekonomi), habitat satwa liar (nilai edukatif), dan menambah keindahan kota (nilai estetis).

Pemanfaatan situ-situ (danau) sebagai sistem pengendalian banjir memang belum begitu besar. Sejauh ini pemanfaatan situ lebih banyak untuk keperluan pertanian, irigasi serta konservasi sumber daya air. Namun demikian sesuai dengan fungsinya, situ mampu memberikan kontribusi dalam pengendalian banjir. Tabel 3.7 menyebutkan bahwa jumlah situ lebih banyak dibandingkan dengan danau, yakni 831 banding 801. Daerah tangkapan air paling banyak di Provinsi Kalimantan Tengah, yakni sebesar 94.094. Sedangkan luas terbesar ada di provinsi Sumatera Barat dengan volume tampung 880.142.735.

3.1.6 Embung

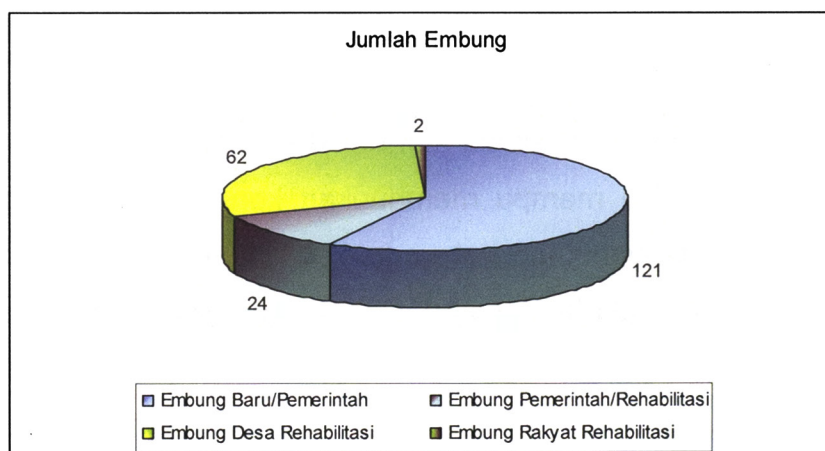
Keberadaan embung yang berfungsi sebagai penampung air hujan guna menahan laju air dari dataran tinggi sangat dibutuhkan untuk mengatasi banjir. Jumlah embung terbanyak di Provinsi NTB, sebesar 96, sedangkan paling sedikit adalah Provinsi Jawa Timur, yakni hanya 2 buah (Gambar 3.3). Pada Gambar 3.4 terlihat bahwa banyak embung baru yang dibuat, disusul dengan embung desa rehabilitasi, embung pemerintah/rehabilitasi dan embung rakyat.

Gambar 3.3 Jumlah Embung Berdasarkan Provinsi di Indonesia



Sumber : <http://sda.pu.go.id/> SDA

Gambar 3.4 Jumlah Embung Berdasarkan Jenis di Indonesia

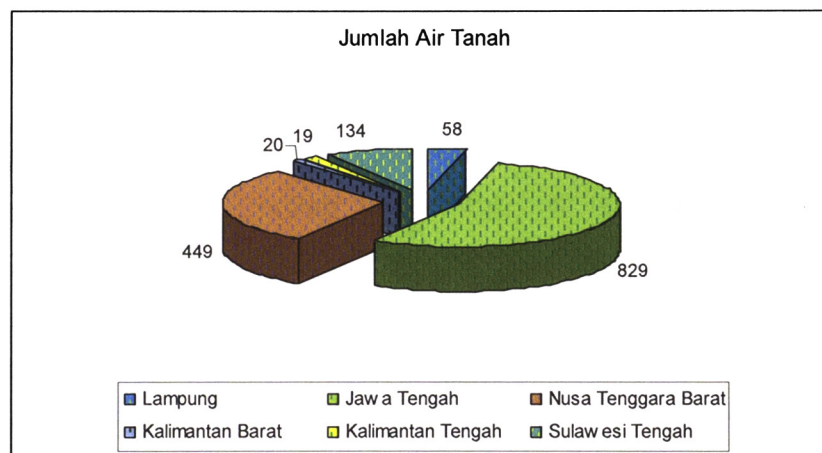


Sumber : <http://sda.pu.go.id/> SDA

3.1.7 Air Tanah

Air tanah mempunyai peran yang penting bagi kehidupan dan penghidupan rakyat Indonesia, karena fungsinya sebagai salah satu kebutuhan pokok hidup. Manfaat air tanah antara lain untuk rumah tangga dan irigasi. Jumlah Air tanah terbanyak ada di provinsi Jawa Tengah, sedangkan jumlah paling sedikit di daerah Kalimantan (Gambar 3.5).

Gambar 3.5 Jumlah Air Tanah Berdasarkan Provinsi di Indonesia



Sumber : <http://sda.pu.go.id/> SDA

3.2 Prasarana dan Sarana Bina Marga

3.2.1 Jalan

Jalan merupakan prasarana wilayah yang penting untuk memperlancar kegiatan perekonomian. Pembangunan prasarana dan sarana jalan terkait erat dengan dinamika demografi. Hal ini dapat dipahami mengingat fungsi jalan sebagai infrastruktur yang mendukung mobilisasi serta kelancaran kegiatan masyarakat.

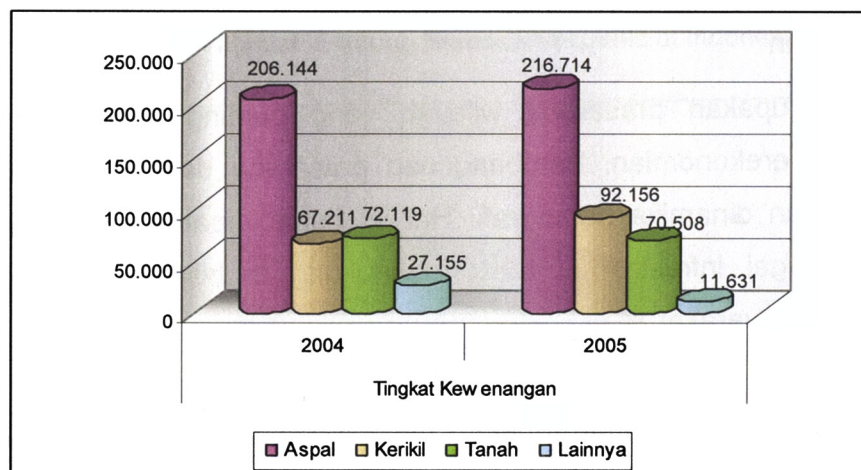
Perubahan aspek demografi dalam masyarakat seperti pertumbuhan jumlah penduduk dan persebarannya akan menimbulkan pola kebutuhan akan pembangunan maupun peningkatan kualitas jalan. Sebaliknya, pembangunan prasarana transportasi seperti jaringan jalan akan memberikan perubahan-

perubahan yang signifikan baik pada wilayah tempat prasarana tersebut berada maupun pada masyarakat di sekitarnya. Dengan meningkatnya pembangunan maka menuntut peningkatan pembangunan jalan untuk mobilitas penduduk dan memperlancar lalu lintas barang.

Jalan raya merupakan salah satu prasarana penting dalam transportasi darat. Hal ini karena fungsi strategis yang dimilikinya, yaitu sebagai penghubung antar satu daerah dengan daerah lain. Jalan sebagai penghubung antara sentra-sentra produksi dengan daerah pemasaran, sangat dirasakan sekali manfaatnya dalam rangka meningkatkan perekonomian suatu wilayah.

Pada tahun 2005, panjang jalan dirinci menurut jenis permukaan, jalan beraspal selalu memiliki komposisi paling besar dibandingkan jenis permukaan yang lain, yaitu 55,42 persen dari total panjang jalan. Sedangkan jalan dengan jenis permukaan kerikil dan tanah masing-masing sebesar 23,57 persen dan 18,03 persen. Proporsi terkecil dimiliki oleh jalan dengan jenis permukaan lainnya, yaitu 2,97 persen. Jika dilihat tahun sebelumnya, maka ada peningkatan pada kualitas permukaannya. (Lihat Gambar 3.6).

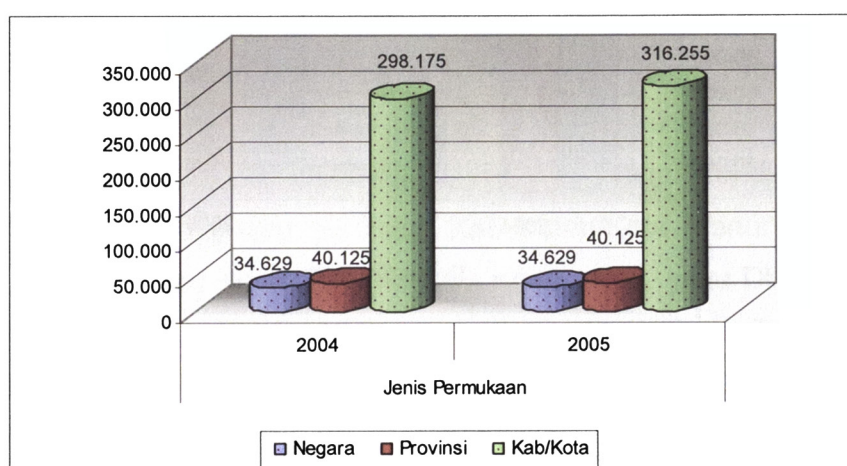
Gambar 3.6 Panjang Jalan Menurut Jenis Permukaan dan Tingkat Kewenangan, 2005



Sumber : Statistik Perhubungan 2005, BPS

Pada tahun 2005, panjang jalan di Indonesia mencapai 391.009 kilometer. Berdasarkan tingkat kewenangan pembinaan, jalan kabupaten/kota masih merupakan bagian terbesar, yaitu 316.255 kilometer atau 80,88 persen dari total panjang jalan di Indonesia. Sedangkan untuk jalan negara dan jalan provinsi masing-masing 34.629 kilometer dan 40.125 kilometer atau sebesar 8,86 persen dan 10,26 persen. (Lihat Gambar 3.7).

Gambar 3.7 Panjang Jalan Menurut Tingkat Kewenangan dan Jenis Permukaan, 2005



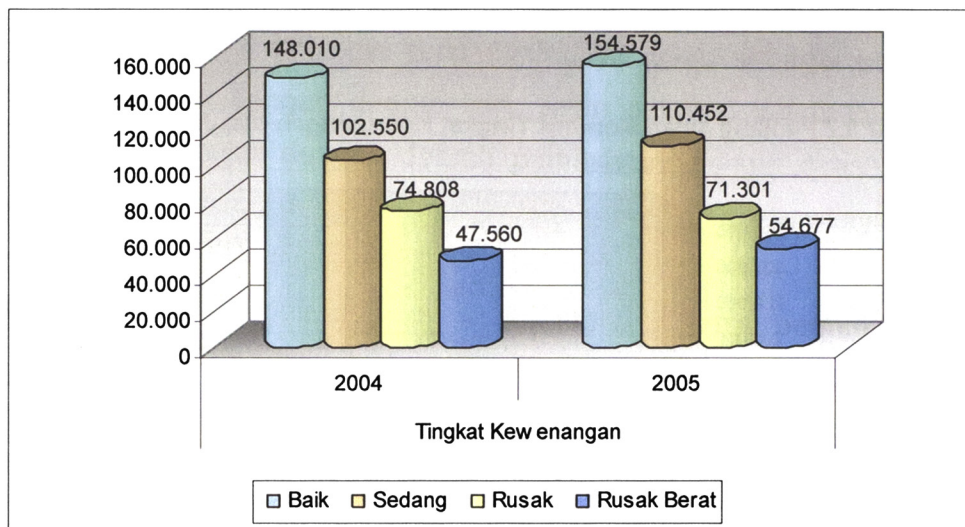
Sumber : Statistik Perhubungan 2005, BPS

Panjang Jalan Negara menurut jenis permukaannya tahun 2005 menunjukkan tidak ada provinsi yang memiliki permukaan jalan dari tanah dan lainnya. Beberapa provinsi sudah tidak berkerikil permukaannya jalannya, seperti DKI Jakarta, Bengkulu, Gorontalo, dan Maluku Utara. (Lihat Tabel 3.8). Untuk Jalan Provinsi menurut jenis permukaannya, masih banyak provinsi yang permukaan jalannya terbuat dari tanah dan lainnya. (Lihat Tabel 3.9). Hal senada juga terjadi pada Jalan Kabupaten/Kota, dimana masih banyak provinsi yang permukaan jalannya dari tanah dan lainnya, kecuali provinsi DKI Jakarta dan Jawa Barat yang sudah tidak ada jalan tanah. (Lihat Tabel 3.10).

Dilihat menurut kewenangan, Jalan Negara, Provinsi, dan Kabupaten secara umum berada pada kondisi baik. Hal tersebut dapat dilihat dari besarnya komposisi kondisi baik yang relatif besar dibandingkan kondisi yang lain. Jalan

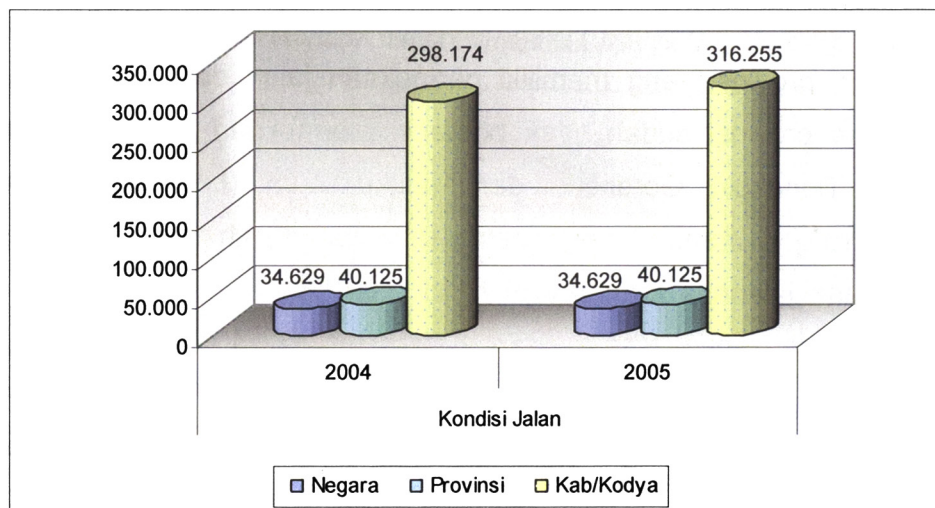
Negara yang memiliki kondisi baik mencapai 48,97 persen diikuti oleh kondisi sedang sebesar 30,40 persen dan sisanya berada pada kondisi rusak dan rusak berat. (Lihat Gambar 3.8).

Gambar 3.8 Panjang Jalan Menurut Kondisi Jalan dan Tingkat Kewenangan, 2005



Sumber : Statistik Perhubungan 2005, BPS

Gambar 3.9 Panjang Jalan Menurut Tingkat Kewenangan dan Kondisi Jalan, 2005



Sumber : Statistik Perhubungan 2005, BPS

Untuk Jalan Provinsi, kondisi baik mencapai 25,31 persen diikuti kemudian oleh kondisi sedang sebesar 36,15 persen dan sisanya kondisi rusak dan rusak berat. Sedangkan untuk Jalan Kabupaten/Kota, kondisi baik sebesar 40,01 persen diikuti kemudian oleh kondisi sedang sebesar 27,24 persen dan sisanya berada pada kondisi rusak dan rusak berat. Jika dibandingkan tahun 2004, maka hanya Jalan Kabupaten/Kota yang mengalami peningkatan tahun 2005. (Lihat Gambar 3.9).

Panjang Jalan Negara menurut kondisi jalan tahun 2005 menunjukkan masih banyak provinsi yang kondisi jalannya rusak berat. Beberapa provinsi yang kondisi jalan rusak berat sudah tidak ada lagi adalah Jambi, DKI Jakarta, DI Yogyakarta, dan Bali. (Lihat Tabel 3.11). Untuk Jalan Provinsi menurut kondisi, terlihat hanya DKI Jakarta yang tidak memiliki jalan rusak berat. Selain itu DKI Jakarta juga tidak mempunyai jalan dengan kondisi sedang dan rusak (Tabel 3.12). Sedangkan Jalan Kabupaten/Kota menurut kondisinya, ada dua provinsi yang tidak memiliki jalan rusak berat, yaitu DKI Jakarta dan Nusa Tenggara Timur. Adapun jalan dengan kondisi baik masih mendominasi untuk jalan kabupaten/kota ini (Tabel 3.13).

Tingkat kekasaran permukaan jalan yang dinyatakan dengan IRI (*International Roughness Index*) adalah besaran ukuran yang menyatakan ketidakrataan permukaan, yaitu panjang kumulatif turun naiknya permukaan per satuan panjang. Secara matematis dinyatakan sebagai perbandingan antara panjang jalan yang rusak/berlubang (dengan besaran meter) terhadap panjang jalan total dalam satu ruas. Semakin besar nilai IRI, maka semakin buruk keadaan permukaan jalannya. IRI dinyatakan dalam meter turun naik per kilometer panjang jalan (m/km).

Berikut ini adalah arti kognitif yang bisa disimpulkan dari IRI terhadap kondisi permukaan jalan :

NILAI IRI (m/Km)	Kondisi
< 4	Baik
4 – 8	Sedang
8 – 12	Rusak Ringan
> 12	Rusak Berat

Dari Tabel 3.14 dapat diketahui bahwa sebagian besar jalan nasional (tidak termasuk Jakarta) memiliki tingkat kekasaran yang baik, dimana 9.576,91 Km atau 27,75 persen dari total panjang jalan 34.506,45 Km memiliki kondisi yang baik. Dari tabel tersebut juga bisa diketahui bahwa kondisi sedang ada 18.572,50 Km atau 53,82 persen, sementara kondisi jalan yang rusak ringan ada 3.828,43 Km atau 11,09 persen. Sedangkan kondisi jalan rusak berat ada 2.528,60 Km atau sekitar 7,33 persen.

Kondisi jalan adalah keadaan jalan diukur secara struktural dan fungsional. Parameter yang digunakan mengukur kondisi jalan secara struktural adalah IRI dan SDI (*Surface Distrees Index*). Batasan kesesuaian kondisi jalan dinilai seperti berikut :

1. Kondisi jalan baik, jika $IRI \leq 4$ atau $SDI \leq 50$
2. Kondisi jalan sedang, jika $4 < IRI \leq 8$ atau $50 < SDI \leq 100$
3. Kondisi jalan rusak ringan, jika $8 < IRI \leq 12$ atau $100 < SDI \leq 250$
4. Kondisi jalan rusak berat, jika $IRI > 12$ atau $SDI > 250$

Sedangkan kriteria "Mantap" dan "Tidak Mantap", menggunakan kriteria yang sama dengan kriteria kondisi jalan secara fungsional, yaitu :

1. Mantap, jika kondisi jalan baik atau sedang
2. Tidak Mantap, jika kondisi jalan rusak ringan atau rusak berat

Dari Tabel 3.14 dapat diketahui bahwa ruas jalan sepanjang 28.149,42 Km atau 81,58 persen berada dalam kondisi mantap, sementara sisanya sejumlah 6.357,03 Km atau 18,42 persen dalam kondisi tidak mantap. Dari tabel

tersebut juga dapat diketahui, bahwa di Provinsi Jambi, DI Yogyakarta, Bengkulu dan Bangka Belitung seluruhnya dalam keadaan "Mantap".

Kondisi jalan provinsi tahun 2006 pada Tabel 3.15 menyebutkan, bahwa jalan mantap dan tidak mantap hampir sama prosentasinya yakni 54% banding 46%. Sedangkan kondisi jalan yang paling banyak dilihat disana adalah kondisi jalan sedang dengan prosentasi sebesar 43,2%. Untuk kondisi jalan kabupaten tahun 2006 pada Tabel 3.16 terlihat, bahwa jalan mantap dan tidak mantap hampir sama prosentasinya tapi berbanding terbalik dri jalan provinsi, yaitu 46,9% dan 53,1%. Adapun kondisi jalan yang paling banyak terdapat disana adalah jalan rusak ringan dengan prosentasi sebesar 35,8%.

3.2.2 Jalan Tol

Disebabkan karena keterbatasan anggaran pemerintah untuk pembangunan jalan baru, maka dibangun jalan tol yang pembangunan dan pemeliharannya didanai oleh para pengguna jalan. Hal ini mendorong Pemerintah untuk terus meningkatkan pembangunan infrastruktur jalan tol dengan cara melibatkan partisipasi swasta melalui skema Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS).

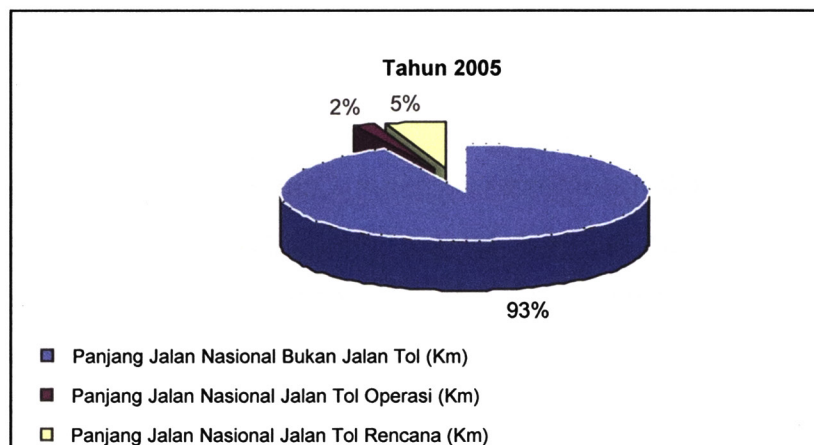
Sejak Pemerintah mengenalkan kebijakan untuk menggali partisipasi sektor swasta dalam pengembangan infrastruktur, maka pembangunan jalan tol di Indonesia mulai meningkat. Saat ini, terdapat 649,12 km jalan tol yang sudah dioperasikan di Indonesia, dari rencana pembuatan jalan tol sebesar 2.015,35 km (Tabel 3.17).

Pemerintah berkeinginan untuk mempercepat pembangunan jalan tol guna mewujudkan sistem transportasi yang efisien dan mempercepat pertumbuhan ekonomi yang pada akhirnya akan menurunkan tingkat kemiskinan. Dimulai sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2010, pembangunan jalan tol akan

dilakukan sebagian besar di Pulau Jawa dan beberapa ruas di Pulau Sumatra, Pulau Sulawesi dan Bali (Tabel 3.18A-Tabel 3.18D).

Sesuai Keputusan Menteri Pekerjaan Umum No. 369/KPTS/M/2005 tanggal 18 Agustus 2005, maka panjang jalan nasional bukan jalan tol sebesar 34,628.83 km (93%). Sedangkan panjang jalan nasional jalan tol yang beroperasi sebesar 649.12 km dari panjang rencana jalan nasional jalan tol sebesar 2,015.35 km (Gambar 3.10).

Gambar 3.10 Jalan Nasional Bukan Jalan Tol dan Jalan Tol di Indonesia



Sumber : http://www.pu.go.id/Ditjen_Prasarana%20wil (Lampiran I.4.B : Keputusan Menteri Pekerjaan Umum

Nomor : 369/KPTS/M/2005
Tanggal : 18 Agustus 2005)

3.2.3 Jembatan

Jembatan merupakan sebuah struktur yang dibangun melewati jurang, lembah, jalanan, rel, sungai, badan air, atau rintangan fisik lainnya. Rancangan dapat dibuat lebih tinggi agar (mungkin) membuat lalu lintas di bawahnya dapat lewat. Tujuan jembatan adalah untuk membuat jalan bagi kendaraan atau orang melewati sebuah rintangan. Untuk jembatan sungai yang bisa dilalui, biasanya menghubungkan antar desa atau dalam desa yang bersangkutan.

Menurut data statistik jembatan terakhir, jumlah jembatan di Jawa dengan status jalan nasional sebesar 9.701 buah dengan panjang 245.144 m serta jumlah jembatan dengan status jalan provinsi sebesar 12.789 buah dengan panjang 267.012 m. Jika dilihat dari kondisinya, maka dikatakan jembatan di Jawa rata-rata 44,60% dalam keadaan baik, 16,12% sedang, 13,84% rusak ringan, 8,26% rusak berat, 17,17% keadaan kritis. (Lihat Tabel 3.19).

Indonesia memiliki jembatan-jembatan yang menghubungkan suatu daratan dengan daratan lainnya. Beberapa jembatan yang cukup penting antara lain Jembatan Ampera (Sumatera Selatan), Jembatan Barito (Banjarmasin, Kalimantan Selatan), Jembatan Rantau Berangin (Riau), Jembatan Pasar Ayam (DKI Jakarta), Jembatan Javasche Bank (DKI Jakarta), Jembatan Senti (DKI Jakarta), Jembatan Kambing (DKI Jakarta), Jembatan Merah (Surabaya, Jawa Timur), Jembatan Siti Nurbaya (Padang, Sumatera Barat), Jembatan Suramadu (Jawa Timur), Jembatan Berelang (Batam, Kepulauan Riau).

Secara keseluruhan jumlah jembatan di Indonesia relatif sedikit, yakni mencapai 88 ribu buah dengan ekivalen sepanjang 1.000 Km. Dari jumlah itu, 30 ribu diantaranya berstatus sebagai jembatan nasional dan jembatan provinsi dengan ekivalen sepanjang 500 Km. Jumlah jembatan tersebut relatif masih sedikit mengingat kondisi geografis Indonesia yang berupa negara kepulauan. Selain itu, pembangunan jembatan di Indonesia antara lain diperuntukkan guna menghubungkan antarsungai, antarpulau, dan antarteluk.

3.3 Prasarana dan Sarana Cipta Karya

3.3.1 Penyediaan Air Minum

Penyediaan infrastruktur air minum merupakan prasyarat bagi kehidupan masyarakat yang berkelanjutan. Ketersediaan sistem air minum berpengaruh terhadap pola pertumbuhan ekonomi regional, laju peningkatan kualitas hidup masyarakat dan lingkungan. Permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan

sistem air minum antara lain adanya kesenjangan antara kebutuhan dengan tingkat pelayanan, baik di perkotaan maupun di perdesaan, tidak meratanya keberadaan sarana dan prasarana di daerah, pengelolaan yang tidak efisien serta kurangnya dana baik untuk pengembangan maupun untuk pengelolaan.

Di Indonesia, sistem penyediaan air minum telah dikelola oleh masing-masing Kabupaten/kota. Sampai tahun 2005, terdapat 314 PDAM di Indonesia yang melayani sekitar 39% penduduk perkotaan dan 8% penduduk di perdesaan. Dalam laporan pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium Indonesia tahun 2005, tercatat bahwa sampai dengan tahun 2004 tercatat 53,4% penduduk yang mendapatkan akses terhadap sumber air yang aman.

Untuk meningkatkan pembangunan di bidang air minum, Pemerintah telah menetapkan PP No.16/2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM). SPAM merupakan satu kesatuan sistem fisik dan nonfisik dari prasarana dan sarana air minum. Beberapa hal yang akan diwujudkan dengan adanya peraturan pemerintah ini, diantaranya mewujudkan pengelolaan dan pelayanan air minum yang berkualitas dengan harga terjangkau, tercapainya kepentingan yang seimbang antara konsumen dan penyedia jasa pelayanan, serta tercapainya peningkatan efisiensi dan cakupan pelayanan air minum.

Dari sejumlah 318 PDAM di Indonesia, PDAM sehat berjumlah 38 dan lainnya sakit serta kurang sehat. PDAM dikatakan sakit jika mereka tekor karena pendapatan dengan biaya operasional dan penyelenggaraan timpang, kebocoran tinggi, tingkat pelayanan rendah dan jam operasinya kurang dari 24 jam. Untuk akses pelayanan air minum perpipaan secara nasional mencapai 18% atau 39,4 juta jiwa penduduk Indonesia, dengan rincian 30,8 juta jiwa penduduk perkotaan atau 33% dari total penduduk kota dan 8,6 juta jiwa penduduk desa atau 7%.

Ketersediaan air bersih yang sehat sangat dibutuhkan masyarakat. Pada tahun 2005 jumlah perusahaan air bersih di Indonesia mencapai 478 buah perusahaan. Jumlah tenaga kerja yang berkecimpung dalam sektor tersebut, terlihat ada peningkatan. Gambaran tenaga kerja yang ada pada perusahaan-perusahaan air minum di tahun 2005 sebanyak 45.910 orang. Tenaga kerja ini mengalami peningkatan sekitar 0,28 persen dari tahun 2004 (45.782 orang).

Dari segi nilai tambah yang dihasilkan, perusahaan-perusahaan air bersih juga menampakkan peningkatan, dengan pembentukan nilai tambah rata-rata per tahun mencapai 19,30 persen. Sementara itu untuk tahun 2005 nilai tambah yang dihasilkan mencapai nilai 2.575.030 juta rupiah. Atau naik sekitar 3,31 persen dari nilai tambah yang dihasilkan pada tahun sebelumnya.

Seiring dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat akan air bersih dan sehat, jumlah air bersih yang telah disalurkan kepada konsumen pada tahun 2005 sebanyak 2.360 juta meter kubik. Sedangkan air bersih yang telah disalurkan pada tahun sebelumnya sebanyak 2.343 juta meter kubik. Tabel 3.20 menyajikan perkembangan PAM selama lima tahun terakhir.

Dari hasil Susenas tahun 2005 dapat dilihat bahwa sebagian besar rumah tangga di Indonesia sudah mengonsumsi air minum bersih (hampir 79 persen). Sumber air minum yang relatif bersih tersebut berasal dari ledeng, pompa, air kemasan, sumur terlindung dan mata air terlindung (Tabel 3.21).

Penyuplaian air bersih ke pelanggan tergantung pada pasokan air bakunya. Tabel 3.22 menunjukkan Lokasi Instalasi Pengolahan Air (IPA) hingga tahun 2007, dimana kapasitas terpasangnya sebesar 135.044 L/dt dan kapasitas produksi sebesar 106.380 L/dt. Kapasitas terpasang dan produksi terbanyak berada di provinsi Jawa Timur, sedangkan paling sedikit di provinsi Maluku Utara. Untuk itu pemerintah harus benar-benar memperhatikan kebutuhan air bersih ini dengan meningkatkan kapasitas produksi IPA yang biasa melayani pelanggan untuk memproduksi air bersih.

3.3.2 Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman

Ketersediaan sarana dan prasarana penyehatan lingkungan saat ini semakin menjadi kebutuhan. Dengan tersedianya sarana dan prasarana penyehatan lingkungan yang layak, maka usia harapan hidup masyarakat suatu negara akan meningkat dan secara tidak langsung hal tersebut akan menurunkan tingkat kemiskinan di suatu negara.

Peraturan Pemerintah Nomor 16/2005 memetakan kewenangan pemerintah dan penyelenggara atau operator dalam menangani sanitasi, termasuk air limbah dan penyediaan air minum. Optimalisasi pelayanan kepada masyarakat, menurut PP tersebut, bisa melalui perusahaan yang tidak harus diselenggarakan oleh pemerintah, melainkan operator yang dibentuk oleh pemerintah, Organisasi Masyarakat Setempat (OMS), Koperasi, atau Badan Usaha. Badan Layanan Usaha yang tertuang dalam PP nomor 23/2006 menganjurkan pembentukan Badan Layanan Usaha dalam pelayanan publik termasuk air minum dan sanitasi (air limbah). Pengelolaan dan perusahaan yang dimaksud seperti korporasi yang bisa menarik dana langsung dari masyarakat. Pemerintah bertanggung jawab untuk memberikan standar minimum pelayanan kepada masyarakat berdasarkan RPJMN 2009 dan MDG's 2015 dalam PP 16/2005, untuk mengoptimalkan pelayanan dalam bentuk yang dipisahkan dalam dua hal yaitu skala kota dan skala lingkungan.

Untuk lokasi IPAL hingga tahun 2007 hanya tiga provinsi yang baru terkumpul, yakni DI Yogyakarta, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur (Tabel 3.23), dan kapasitas pengolahan DI Yogyakarta yang paling besar (15.000 M³/hari). Untuk Air limbah, komponen-komponen yang dibangun/perbaiki yaitu IPLT dan IPAL, truck tinja, MCK, jaga/jumlah, dan septic tank komunal. Pembuatan IPLT dan IPAL sangat dibutuhkan untuk pemrosesan air limbah. Saat ini baru sekitar sepuluh kota di Indonesia yang melakukan pengolahan air limbah secara on site (diolah dalam satu tempat) melalui sistem perpipaan.

Kondisi lingkungan permukiman yang bersih akan memberikan kenyamanan pada penghuninya. Lingkungan yang tidak bersih merupakan sumber penyakit seperti demam berdarah, malaria, penyakit perut, dan penyakit kulit, sehingga rumah tangga perlu membersihkan lingkungan permukimannya.

Sekitar 22% penduduk Indonesia belum mempunyai jamban. Penggunaan sarana pengolahan limbah tinja dengan tangki septic juga rendah, hanya 40% di perkotaan dan 20% di perdesaan. Selain itu Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) di berbagai kota banyak yang tidak berfungsi. Ada beberapa hal yang menjadi penyebabnya, yaitu akses dan kualitas pengolahan yang rendah, kelembagaan yang belum efektif termasuk belum lengkapnya perangkat per undang-undangan yang ada, terbatasnya kapasitas pendanaan pembangunan di daerah, serta rendahnya peran serta masyarakat dan swasta.

Upaya pemerintah untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat diantaranya peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan pengelolaan air limbah (Sanimas) dan perlunya Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS). Saat ini diprediksi, Indonesia memproduksi 5,6 juta ton tinja per hari yang sebagian besar pembuangan masih dilakukan ke sungai atau menggunakan sumur galian yang tidak memenuhi persyaratan sehingga mencemari air tanah yang mengakibatkan 13 ribu balita terkena diare setiap harinya. Sedangkan kapasitas pengolahan lokasi IPLT paling besar hingga tahun 2007 adalah provinsi Sulawesi Selatan, yaitu 700 M³/hari (Tabel 3.24).

Pada Tabel 3.25 menunjukkan, bahwa masih banyak desa/kelurahan yang menggunakan bukan jamban sebagai tempat buang air besar untuk sebagian besar keluarga (27.622 desa/kelurahan). Untuk tempat membuang di jamban bersama dan jamban umum hampir sama jumlahnya, masing-masing 2.395 desa/kelurahan dan 3.433 desa/kelurahan dan jumlah pemakaian jamban

sendiri ada 36.507 desa/kelurahan. Bangunan septic tank/MCK komunal bisa digunakan untuk meningkatkan aksesibilitas terhadap sarana sanitasi.

Pengurangan sampah pada sumbernya dapat mengurangi beban sampah yang masuk dalam Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Salah satu masalah utama pengelolaan persampahan di Indonesia adalah bertambahnya timbunan sampah akibat jumlah penduduk yang kian bertambah. Kegiatan penggunaan kembali, pengurangan, dan daur ulang (*reuse, reduce, recycle* atau 3R) merupakan upaya pengurangan jumlah sampah mulai dari sumbernya. Tabel 3.26 menunjukkan lokasi TPA hingga tahun 2007 dari beberapa provinsi di Indonesia. Dari provinsi-provinsi yang ada, maka provinsi yang mempunyai lokasi TPA terluas adalah Jawa Barat (445,90 Ha). Untuk selanjutnya, solusi yang akan dilakukan Pemda Jawa Barat adalah dengan menyiapkan calon lokasi yang sesuai dengan tata ruang dan persyaratan SNI.

Pola pengolahan sampah di kota besar menggunakan sistem *sanitary land fill*. Pola yang masih tergolong pengolahan konvensional ini memerlukan lahan yang sangat luas sebagai TPA. Sedangkan pencarian lokasi untuk itu sangat sulit dikarenakan penolakan dari masyarakat yang lokasi sekitarnya akan dijadikan lahan TPA. Selain itu karena keterbatasan alat angkut dan petugas kebersihan. Usaha pengurangan sampah dijalankan dengan memisahkan sampah organik dan sampah anorganik. Selanjutnya sampah organik diolah menjadi pupuk kompos sedangkan sampah anorganik dapat dijadikan barang-barang kerajinan.

Pada tahun 2005 diinformasikan, bahwa jenis tempat membuang sampah sebagian besar keluarga di Indonesia, terdiri atas tempat sampah kemudian diangkut, dalam lubang dibakar, sungai, dan lainnya. Dari Tabel 3.27 terlihat, bahwa tempat membuang sampah dalam lubang dibakar yang paling banyak dipilih oleh sebagian besar keluarga, yakni sebesar 45,054 desa. Sedangkan warga yang membuang sampah di sungai paling sedikit, yaitu sejumlah 4,204

desa. Di Provinsi DKI Jakarta sudah tidak ada yang membuang sampah di sungai dan tempat lainnya.

3.4 Penataan Ruang

Tujuan pelaksanaan pembangunan dari sudut pandang penataan ruang yaitu untuk mewujudkan ruang yang nyaman, produktif, dan berkelanjutan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menciptakan keseimbangan antar wilayah. Tujuan ini dipandang masih menghadapi kendala sehubungan dengan masih adanya berbagai permasalahan penataan ruang seperti alih fungsi lahan secara tidak terkendali, peningkatan frekuensi dan cakupan bencana banjir dan longsor, kemacetan lalu lintas, dan penurunan kualitas lingkungan hidup terutama di kawasan perkotaan. Pendekatan penataan ruang dapat mewujudkan ruang yang nyaman, produktif, dan berkelanjutan.

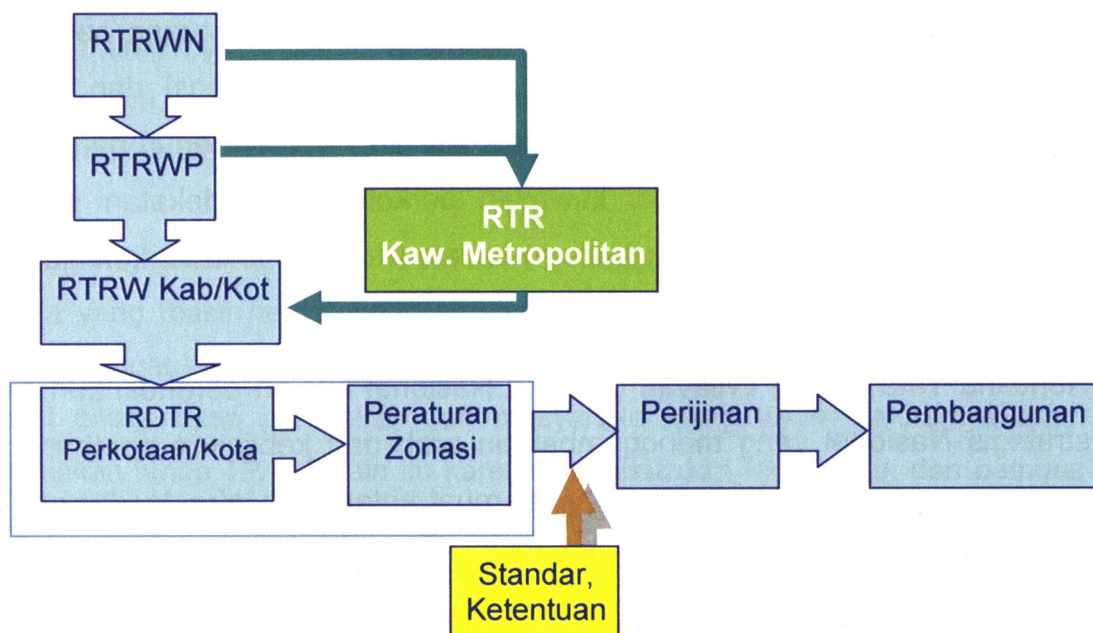
Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Nasional adalah perencanaan makro strategis Nasional yang menggambarkan arah dan kebijakan pembangunan nasional secara ketataruangan yang memuat antara lain infrastruktur nasional seperti jalan nasional, pelabuhan samudera maupun bandara internasional. Adapun RTRW Provinsi merupakan perencanaan regional yang menjabarkan RTRWN dalam konteks ruang wilayah Provinsi secara lebih rinci termasuk memuat rencana pengembangan infrastruktur jalan provinsi, terminal maupun pelabuhan regional. RTRW Kabupaten/Kota merupakan rencana tata ruang skala kabupaten/kota dengan muatan kelengkapan infrastruktur di tingkat lokal seperti jalan kabupaten/kota, kebutuhan air bersih, listrik dan telekomunikasi yang disesuaikan dengan karakteristik pengembangan kawasan yang ada.

Adanya pengaruh pengembangan jalan tol sesuai siklus pembangunan jalan tol yang dimulai dari tahap prakonstruksi, konstruksi dan paska konstruksi terhadap pemanfaatan ruang yang ditimbulkan, sedikitnya mencakup :

- 1) Pengaruh terhadap tata kelola pemerintahan
- 2) Pengaruh terhadap ekonomi
- 3) Pengaruh terhadap pembiayaan
- 4) Pengaruh terhadap perencanaan
- 5) Pengaruh preferensi masyarakat

Berikut adalah gambar Tahapan Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah.

Gambar 3.11 Tahapan Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah



Sumber : Sosialisasi UU No.26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang

Infrastruktur merupakan unsur pembentuk struktur ruang wilayah. Dalam hal ini infrastruktur bisa berfungsi sebagai alat dalam pengendalian pemanfaatan ruang, agar tidak terjadi penyalahgunaan lahan maupun pengembangan yang tidak sesuai dengan rencana. Dengan demikian kawasan yang dalam rencana untuk kawasan lindung tidak dapat dipakai sebagai kawasan budidaya, karena infrastruktur yang dibutuhkan tidak tersedia.

Dalam rangka pemerataan pembangunan di Indonesia antara Kawasan Timur Indonesia (KTI) dan Kawasan Barat Indonesia (KBI), maka diterbitkan Kepres

No.120 tahun 1993 tentang Dewan Pengembangan Kawasan Timur Indonesia (DPKTI). Sebagai tindak lanjut dikeluarkan Kepres No.89 tahun 1996 yang lalu disempurnakan dengan Kepres No.9 tahun 1998 tentang pembentukan Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET). Berdasarkan Kepres tersebut, KAPET meliputi beberapa Kawasan, antara lain :

1. Sanggau (Kalbar)
2. Batulicin (Kalsel)
3. Kakab (Kalteng)
4. Sasamba (Kaltim)
5. Manado – Bitung (Sulut)
6. Batui (Sulteng)
7. Pare-pare (Sulsel)
8. Bukari (Sultra)
9. Seram (Maluku)
10. Biak (Papua)
11. Bima (NTB)
12. Mbay (NTT)
13. Sabang (NAD)

Suatu wilayah dapat dikembangkan menjadi beberapa kemungkinan kawasan:

- Kawasan Lindung (hutan lindung, lindung erosi, lindung longsor, lindung geologi, lindung resapan, lindung fauna, dsb)
- Kawasan Permukiman (desa, desa-kota, kota)
- Kawasan Pertambangan (tambang permukaan, bawah permukaan, logam, non logam, bahan galian, dsb)
- Kawasan Industri
- Kawasan Perkebunan (pertanian, peternakan, dsb)
- Kawasan Sumber Daya Laut dan Pantai

- Kawasan Sarana dan Prasarana (bendungan, pembangkit listrik, jalan dan transportasi, air baku, dan tempat pembuangan sampah, dll)
- Kawasan Pariwisata (wisata alam, wisata agro, wisata pertambangan, dan industri, wisata bahari, wisata geologi, wisata budaya, wisata sejarah, dsb)

Indonesia merupakan negara yang batas negaranya ada di dua matra, yaitu di laut dengan sepuluh negara tetangga (India, Singapura, Malaysia, Thailand, Vietnam, Philipina, Palau, Australia, Timor Leste, Papua New Guinea), dan di darat dengan tiga negara tetangga (Malaysia, Timor Leste, serta Papua New Guinea). Untuk kawasan perbatasan laut, provinsi Irian Jaya Barat, Papua, dan Maluku Utara berdekatan dengan negara Palau. Provinsi Maluku dan NTT lebih ke Timor Leste, selain itu NTT juga berdekatan dengan Australia.

Kawasan andalan adalah bagian dari kawasan budidaya yang dapat berperan mendorong pertumbuhan ekonomi bagi kawasan itu sendiri dan kawasan di sekitarnya serta dapat mewujudkan pemerataan pemanfaatan ruang di wilayah nasional. Kawasan andalan merupakan kawasan yang mempunyai sejumlah sektor unggulan potensi untuk dikembangkan. Sektor-sektor tersebut berupa agroindustri, industri pertambangan, peternakan dan perikanan atau industri pariwisata. Dalam kawasan pengembangan baru di provinsi NTT, terdapat kawasan cepat tumbuh, yang meliputi :

- a) Pantai Utara Mumere (Kab. Sikka)
- b) Taman Wisata Danau Kalimutu (Kab. Ende)
- c) Zona Industri Maumere (Kab. Sikka)
- d) Zona Industri Kupang (Kab. Kupang Barat)
- e) Perairan Laut dan Kota Labuhan Bajo (Kab. Manggarai)
- f) Dataran Rendah Lasiana (Kab. Kupang)

Kawasan Ekonomi Khusus Indonesia (KEKI) merupakan kawasan strategis nasional dan akan dikembangkan tahap awal tiga daerah yakni Batam, Bintan, dan Karimun. Batam, Bintan, dan Karimun memiliki keunggulan karena

letaknya yang strategis berada di alur laut kepulauan Indonesia yang dekat dengan Singapura dan Selat Malaka, sehingga dengan diberi dukungan infrastruktur sedikit saja sudah bisa dikembangkan.

Dalam RUU Penataan Ruang yang tengah dibahas KEKI dimasukkan sebagai kawasan strategis nasional yang ditetapkan karena memiliki sektor unggulan, kesiapan infrastruktur serta tersedianya sumber daya manusia. Pada dasarnya RUU Penataan Ruang mendukung potensi-potensi yang dimiliki daerah seperti adanya sektor unggulan untuk terus dikembangkan. Hal tersebut salah satunya direalisasikan melalui penetapan kawasan andalan.

Keberadaan KEKI diharapkan mendorong kegiatan ekspor, meningkatkan investasi serta dapat menjadi pendorong pertumbuhan daerah sekitarnya. Pengembangan KEKI merupakan upaya peningkatan daya saing Indonesia, dimana sebelumnya pemerintah juga mempunyai 13 lokasi Kawasan Ekonomi Terpadu (KAPET) untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi di kawasan Timur Indonesia. Adapun KEKI ini meliputi daerah-daerah seperti :

1. Banda Aceh
2. Medan – Binjai – Deli Serdang (Mebidang)
3. Duri – Dumai
4. Batam – Tanjung Pinang
5. Bojonegara – Merak – Cilegon
6. Gresik – Bangkalan – Mojokerto – Surabaya – Sidoarjo – Lamongan (Gerbang Kertasusila)
7. Pontianak
8. Bontang – Samarinda – Tenggarong – Balikpapan – Penajam (Bonsamtebajam)
9. Manado – Bitung
10. Makasar – Maros – Sungguminasa – Takalar (Maminasata)
11. Ternate – Tidore
12. Sorong

BAB IV

PENUTUP

Penyusunan Buku Induk Statistik merupakan salah satu dukungan dalam kegiatan kestatistikan dilingkungan Departemen Pekerjaan Umum. Dukungan ini dalam rangka menyediakan data kuantitatif, dengan harapan dapat berguna bagi kegiatan manajemen khususnya dalam penyusunan program dan perencanaan pembangunan prasarana dan sarana Pekerjaan Umum.

5.1 Kesimpulan

Departemen Pekerjaan Umum memegang peranan penting di dalam penyediaan prasarana dan sarana di bidang ke-PU-an untuk menunjang sektor-sektor strategis lainnya, seperti kependudukan, ketenagakerjaan, pendidikan dan peribadatan, kesehatan, sosial, budaya dan pariwisata, ekonomi, pertanian, perumahan, serta perhubungan. Hasil pembangunan prasarana dan sarana bidang sumber daya air, jalan, dan jembatan, pembangunan lingkungan permukiman, serta penataan ruang relatif menunjukkan keefektifannya dan berhasil memberi kontribusi yang cukup dalam aspek pemerataan dalam menjangkau sebagian besar daerah dan lapisan masyarakat secara memadai.

Untuk menunjang pengambilan keputusan dalam penyelenggaraan proses pembangunan yang menjadi tugas pokok Departemen Pekerjaan Umum, dibutuhkan informasi guna pembangunan prasarana dan sarana bidang ke-PU-an yang berkaitan dengan masing-masing sektor strategis di atas. Program ataupun rencana kegiatan bilamana didukung oleh data kuantitatif dan data kualitatif tentunya mempunyai nilai yang nyata dan positif.

Informasi statistik yang disajikan lebih bersifat kuantitatif dimana terdiri dari tabulasi dan grafik yang menggambarkan keadaan atau perkembangan pembangunan yang menjadi tugas Departemen Pekerjaan Umum selama ini. Informasi tersebut mengenai statistik wilayah, sosial, budaya, ekonomi, prasarana dan sarana perkotaan dan perdesaan, perumahan dan permukiman, potensi lahan, penataan ruang, dan lainnya.

5.2 Saran

Untuk pembangunan ke depan, masih perlu ditingkatkan dan dimantapkan, khususnya bagi daerah-daerah yang belum terjangkau di kawasan Indonesia. Sejalan dengan perkembangan dari proses pembangunan prasarana dan sarana bidang ke-PU-an, selalu terjadi perubahan-perubahan yang berupa peningkatan kualitas maupun kuantitas dari hasil-hasil pembangunan tersebut, sehingga penyajian informasi selalu mengikuti perubahan yang terjadi. Untuk itu informasi harus terus dikembangkan disamping harus di remajakan agar keandalan informasi tersebut dapat dipercaya.

Untuk bisa mendapatkan informasi statistik yang dapat diandalkan, perlu terus ditingkatkan kerjasama antara Pusdata dengan sumber-sumber data di unit-unit kerja dan satminkal di lingkungan Departemen Pekerjaan Umum ataupun dengan instansi lainnya. Disamping itu perlu adanya peningkatan kualitas dan kemampuan sumber daya manusianya serta dengan didukung oleh prasarana dan sarana yang memadai untuk melaksanakan kegiatan pengolahan data.

Kepada semua pihak, baik dari dalam maupun dari luar lingkungan Departemen Pekerjaan Umum, untuk memberi saran-saran yang dimaksud guna lebih menyempurnakan penyajian dari Buku Induk Statistik PU.

Tabel 2.1
Rekapitulasi Data Pulau di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
Tahun 2004

No	Provinsi	Jumlah Pulau		Jumlah
		Bernama	Belum Bernama	
1	2	3	4	5
1	Nanggoroe Aceh Darussalam	205	458	663
2	Sumatera Utara	237	182	419
3	Sumatera Barat	200	191	391
4	Riau	73	66	139
5	Jambi	16	3	19
6	Sumatera Selatan	43	10	53
7	Bengkulu	23	24	47
8	Lampung	86	102	188
9	Kep. Bangka Belitung	311	639	950
10	Kep. Riau	1.350	1.058	2.408
11	DKI Jakarta	111	107	218
12	Jawa Barat	19	112	131
13	Jawa Tengah	47	249	296
14	D.I. Yogyakarta	22	1	23
15	Jawa Timur	232	55	287
16	Banten	48	83	131
17	Bali	25	60	85
18	Nusa Tenggara Barat	461	403	864
19	Nusa Tenggara Timur	473	719	1.192
20	Kalimantan Barat	246	93	339
21	Kalimantan Tengah	27	5	32
22	Kalimantan Selatan	164	156	320
23	Kalimantan Timur	232	138	370
24	Sulawesi Utara	310	358	668
25	Sulawesi Tengah	139	611	750
26	Sulawesi Selatan	190	105	295
27	Sulawesi Tenggara	361	290	651
28	Gorontalo	96	40	136
29	Maluku	741	681	1.422
30	Maluku Utara	125	1.349	1.474
31	Papua	301	297	598
32	Irian Jaya	956	989	1.945
Indonesia		7.870	9.634	17.504

Sumber : www.depdagri.go.id (Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, Departemen Dalam Negeri RI, 2004)

Tabel 2.2
Luas Wilayah Di Indonesia
Tahun 2005

No.	Provinsi	Luas Area ¹⁾ (Km2)	Persentase terhadap Luas Indonesia
1	2	3	4
1	Nanggroe Aceh Darussalam	56.500,51	3,04
2	Sumatera Utara	72.427,81	3,89
3	Sumatera Barat	42.224,65	2,27
4	Riau	87.844,23	4,72
5	Jambi	45.348,49	2,44
6	Sumatera Selatan	60.302,54	3,24
7	Bengkulu	19.795,15	1,06
8	Lampung	37.735,15	2,03
9	Kep. Bangka Belitung	16.424,14	0,88
10	Kep. Riau	8.084,01	0,43
11	D.K.I Jakarta	740,29	0,04
12	Jawa Barat	36.925,05	1,98
13	Jawa Tengah	32.799,71	1,76
14	D.I. Yogyakarta	3.133,15	0,17
15	Jawa Timur	46.689,64	2,51
16	Banten	9.018,64	0,48
17	Bali	5.449,37	0,29
18	Nusa Tenggara Barat	19.708,79	1,06
19	Nusa Tenggara Timur	46.137,87	2,48
20	Kalimantan Barat	120.114,32	6,46
21	Kalimantan Tengah	153.564,50	8,25
22	Kalimantan Selatan	38.884,28	2,09
23	Kalimantan Timur	194.849,08	10,47
24	Sulawesi Utara	13.930,73	0,75
25	Sulawesi Tengah	68.089,83	3,66
26	Sulawesi Selatan	46.116,45	2,48
27	Sulawesi Tenggara	36.757,45	1,98
28	Gorontalo	12.165,44	0,65
29	Sulawesi Barat	16.787,19	0,90
30	Maluku	47.350,42	2,55
31	Maluku Utara	39.959,99	2,15
32	Irian Jaya Barat	114.566,40	6,16
33	Papua	309.934,40	16,66
	Indonesia	1.860.360	100

Sumber : BPS, Statistik Indonesia 2005/2006

¹⁾ : Berdasarkan Peraturan Mendagri No. 18 Tahun 2005 tanggal 28 April 2005

Tabel 2.3
Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Per Provinsi Seluruh Indonesia
Tahun 2005

No	Provinsi	Jumlah				Luas Wilayah (Km2)
		Kab ¹	Kota ¹	Kec ²	Desa ²	
1	2	3	4	5	6	7
1	Nanggroe Aceh Darussalam	17	4	243	6.378	56.500,51
2	Sumatera Utara	18	7	357	5.612	72.427,81
3	Sumatera Barat	12	7	157	901	42.224,65
4	Riau	9	2	144	1.482	87.844,23
5	Jambi	9	1	94	1.231	45.348,49
6	Sumatera Selatan	10	4	169	2.780	60.302,54
7	Bengkulu	8	1	99	1.233	19.795,15
8	Lampung	8	2	180	2.193	37.735,15
9	Kep.Bangka Belitung	6	1	36	321	16.424,14
10	Kepulauan Riau	4	2	42	245	8.084,01
11	DKI Jakarta	1	5	44	267	740,28
12	Jawa Barat	16	9	592	5.808	36.925,05
13	Jawa Tengah	29	6	565	8.566	32.799,71
14	DI Yogyakarta	4	1	78	438	3.133,15
15	Jawa Timur	29	9	657	8.484	46.689,64
16	Banten	4	2	135	1.483	9.018,64
17	Bali	8	1	55	701	5.449,37
18	Nusa Tenggara Barat	7	2	100	820	19.708,79
19	Nusa Tenggara Timur	15	1	203	2.742	46.137,87
20	Kalimantan Barat	10	2	154	1.531	120.114,32
21	Kalimantan Tengah	13	1	105	1.395	153.564,50
22	Kalimantan Selatan	11	2	127	1.957	38.884,28
23	Kalimantan Timur	9	4	124	1.352	194.849,08
24	Sulawesi Utara	6	3	122	1280	13.930,73
25	Sulawesi Tengah	9	1	102	1.530	68.089,83
26	Sulawesi Selatan	20	3	279	2.866	46.116,45
27	Sulawesi Tenggara	8	2	133	1.705	36.757,45
28	Gorontalo	4	1	47	476	12.165,44
29	Sulawesi Barat	5		51	491	16.787,19
30	Maluku	7	1	62	886	47.350,42
31	Maluku Utara	6	2	51	793	39.959,99
32	Papua	19	1	233	1.166	309.934,40
33	Irian Jaya Barat	8	1	101	2.442	114.566,40
	Indonesia	349	91	5.641	71.555	1.860.360

Sumber : BPS, Statistik Indonesia 2005/2006

Catatan ¹ Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.18 Tahun 2005 tanggal 28 April 2005

² Berdasarkan Laporan BPS Provinsi sampai dengan 31 Desember 2005

Tabel 2.4
Data Wilayah Pemekaran Menurut Provinsi

No	Provinsi	Nama Kabupaten / Kota	Jumlah			Luas Wilayah (Km ²)	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Keterangan
			Kec	Kel	Desa			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Nanggroe Aceh D.	Bener Meriah	7		127	1.453,99	92.875	Pemekaran dari sbgn wil.Kab. Aceh Tengah sesuai UU 40/2003
2	Sumatera Utara	Samosir	8	6	111	2.156,26	125.145	Pemekaran dari sbgn wil.Kab. Toba Samosir sesuai UU 36/2003
		Serdang Bedagai	13					Pemekaran dari sbgn wil.Kab. Deli Serdang sesuai UU 36/2003
3	Sumatera Barat	Dharmasraya	4		21	3.209,05	161.656	Pemekaran dari sbgn wil.Kab. Sawahlunto/Sijunjung sesuai UU 38/2003
		Solok Selatan	5		12	3.346,20	131.324	Pemekaran dari sbgn wil.Kab. Solok sesuai UU 38/2003
		Pasaman Barat	11		19	3.887,77	320.559	Pemekaran dari sbgn wil.Kab. Pasaman sesuai UU 38/2003
4	Sumatera Selatan	Oku Timur	10	3	189	334,04	562.189	Pemekaran dari sbgn wil.Kab. OKU sesuai UU 37/2003
		Oku Selatan	10	1	175	545,40	329.055	Pemekaran dari sbgn wil.Kab. OKU sesuai UU 37/2003
		Ogan Ilir	6	13	152	266,61	356.983	Pemekaran dari sbgn wil.Kab. OKI sesuai UU 37/2003
5	Bengkulu	Lebong	5	5	72	1.929,00	91.725	Pemekaran dari sbgn wil.Kab. Rjng Lebong sesuai UU 39/2003
		Kepahiang	4	3	78	665,00	119.940	Pemekaran dari sbgn wil.Kab. Rjng Kepahiang sesuai UU 39/2003
6	Kepulauan Riau	Lingga	5	3	36	411,10	77.078	Pemekaran dari sbgn wil.Kab. Riau sesuai UU 31/2003
7	Nusa Tenggara Barat	Sumbawa Barat	5		37	1.849,02	92.116	Pemekaran dari sbgn wil.Kab. Sumbawa sesuai UU 30/2003
8	Kalimantan Barat	Melawi	7		81	1.064,13	154.355	Pemekaran dari sbgn wil.Kab. Sintang sesuai UU 34/2003
		Sekadau	7		76	5.474,20	167.751	Pemekaran dari sbgn wil.Kab. Sanggau sesuai UU 34/2003
9	Sulawesi Utara	Minahasa Utara	8	6	105	743,90	167.056	Pemekaran dari sbgn wil.Kab. Minahasa sesuai UU 33/2003
10	Sulawesi Tengah	Tojo Una Una	8	8	112	5.730,51	121.347	Pemekaran dari sbgn wil.Kab. Poso sesuai UU 32/2003
11	Sulawesi Selatan	Polwali Mamasa						Wil. Kab. Polmas menjadi wilayah Prov. Sulbar - UU No. 26/2004
		Majene						Wil. Kab. Majene menjadi wilayah Prov. Sulbar - UU No. 26/2004
		Mamuju						Wil. Kab. Mamuju menjadi wilayah Prov. Sulbar - UU No. 26/2004
		Mamasa						Wil. Kab. Mamasa menjadi wilayah Prov. Sulbar - UU No. 26/2004
		Mamuju Utara						Wil. Kab. Mamuju Utara menjadi wilayah Prov. Sulbar - UU No. 26/2004
12	Sulawesi Tenggara	Bombana	6	11	66	2.497,96	107.590	Pemekaran dari sbgn wil.Kab. Buto sesuai UU 29/2003
		Wakatobi	5	17	57	822,13	94.023	Pemekaran dari sbgn wil.Kab. Buto sesuai UU 29/2003
		Kolaka Utara	6	6	76	3.391,62	103.505	Pemekaran dari sbgn wil.Kab. Kolaka sesuai UU 29/2003
13	Maluku	Seram Bagian Timur	4		56	4.346,35	78.571	Pemekaran dari sbgn wil.Kab. Maluku Tengah sesuai UU 40/2003
		Seram Bagian Barat	4		87	2.954,18	146.716	Pemekaran dari sbgn wil.Kab. Maluku Tengah sesuai UU 40/2003
		Kepulauan Aru	3		118	2.816,63	69.884	Pemekaran dari sbgn wil.Kab. Maluku Tenggara sesuai UU 40/2003
14	Papua	Supriori	2		36	528,00	11.829	Pemekaran dari sbgn wil.Kab. Biak Numfor sesuai UU 35/2003

Sumber : www.depdagri.go.id (Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, Departemen Dalam Negeri RI, 2004)

Tabel 2.5
Penduduk Dan Laju Pertumbuhan Penduduk Menurut Provinsi
Tahun 2000 - 2005

No.	Provinsi	Penduduk ¹			Laju Pertumbuhan Penduduk Per tahun		
		(000)			(%)		
1	2	2000 ²	2004 ²	2005 ³	1990 - 2000	2000 - 2004	2000-2005
		3	4	5	6	7	8
1	Nanggroe Aceh Darussalam	3.929	4.018	4.038	1,46	0,56	0,55
2	Sumatera Utara	11.643	12.294	12.453	1,32	1,37	1,35
3	Sumatera Barat	4.249	4.372	4.402	0,63	0,72	0,71
4	Riau	4.948	5.861	6.108	4,35	4,32	4,30
5	Jambi	2.407	2.607	2.657	1,84	2,01	2,00
6	Sumatera Selatan ⁴	6.211	6.647	6.756	1,28	1,71	1,70
7	Bengkulu ⁴	1.456	1.586	1.617	2,20	2,17	2,13
8	Lampung	6.731	7.180	7.291	1,17	1,63	1,61
9	Kep.Bangka Belitung	900	957	972	0,97	1,55	1,54
	Sumatera	42.474	45.522	46.294	1,69	1,78	1,77
10	DKI Jakarta	8.361	8.636	8.700	0,17	0,81	0,80
11	Jawa Barat	35.724	38.383	39.067	2,03	1,81	1,81
12	Jawa Tengah	31.223	31.760	31.887	0,94	0,43	0,42
13	DI Yogyakarta	3.121	3.249	3.280	0,72	1,01	1,00
14	Jawa Timur	34.766	35.396	35.550	0,70	0,45	0,45
15	Banten	8.098	9.055	9.309	3,21	2,83	2,83
16	Bali	3.150	3.334	3.379	1,31	1,43	1,41
	Jawa dan Bali	124.443	129.813	131.172	1,30	1,25	1,25
17	Nusa Tenggara Barat	4.009	4.286	4.356	1,82	1,69	1,67
18	Nusa Tenggara Timur	3.823	4.068	4.127	1,64	1,56	1,54
	Nusa Tenggara	7.832	8.354	8.483	1,73	1,63	1,61
19	Kalimantan Barat	4.016	4.318	4.394	2,29	1,83	1,82
20	Kalimantan Tengah	1.856	2.080	2.138	2,99	2,89	2,87
21	Kalimantan Selatan	2.984	3.188	3.240	1,45	1,67	1,66
22	Kalimantan Timur	2.452	2.737	2.811	2,81	2,79	2,77
	Kalimantan	11.308	12.323	12.583	2,39	2,30	2,28
23	Sulawesi Utara	2.001	2.114	2.142	1,33	1,38	1,37
24	Sulawesi Tengah	2.176	2.358	2.404	2,57	2,02	2,01
25	Sulawesi Selatan	8.051	8.423	8.494	1,49	1,14	1,08
26	Sulawesi Tenggara	1.820	2.032	2.086	3,15	2,78	2,76
27	Gorontalo	834	865	872	1,59	0,93	0,91
	Sulawesi	14.882	15.792	15.998	2,03	1,65	1,63
28	Maluku ⁴	1.166	1.244	1.266	0,11	1,62	1,66
29	Maluku Utara ⁴	815	878	890	1,60	1,88	1,78
	Maluku	1.981	2.122	2.156	0,86	1,75	1,72
30	Papua	2.214	2.458	2.518	3,22	2,65	2,61
	Indonesia	408.054	430.310	435.890	1,45	1,34	1,34

Sumber : BPS, Statistik Indonesia 2005/2006

Catatan : 1) Tidak termasuk penduduk yang tidak bertempat tinggal tetap

2) Termasuk penduduk yang non respon 2.283.981 orang dan estimasi 2.317.216 orang

3) Angka perbaikan berdasarkan proyeksi penduduk Indonesia 2000-2025

4) Angka perbaikan berdasarkan Sensus Penduduk 2000

Tabel 2.6
Distribusi Persentase Dan Kepadatan Penduduk Menurut Provinsi
Tahun 2000 - 2005

No.	Provinsi	Persentase Penduduk Per Provinsi			Kepadatan penduduk per		
		%			Km ²		
		2000	2004 ¹	2005 ¹	2000	2004 ¹	2005 ¹
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Nanggroe Aceh Darussalam	1,92	1,86	1,84	76	77	78
2	Sumatera Utara	5,68	5,68	5,68	158	167	169
3	Sumatera Barat	2,07	2,02	2,01	99	102	103
4	Riau	2,41	2,71	2,79	52	62	65
5	Jambi	1,17	1,20	1,21	45	49	50
6	Sumatera Selatan	3,03	3,07	3,08	67	71	73
7	Bengkulu	0,71	0,73	0,74	74	80	82
8	Lampung	3,28	3,32	3,33	190	203	206
9	Kep.Bangka Belitung	0,44	0,44	0,44	56	59	60
	Sumatera	20,71	21,03	21,12	91	97	98
10	DKI Jakarta	4,08	3,99	3,97	12.592	13.006	13.102
11	Jawa Barat	17,42	17,74	17,82	1.033	1.109	1.129
12	Jawa Tengah	15,22	14,68	14,55	959	976	980
13	D.I. Yogyakarta	1,52	1,50	1,50	980	1.020	1.030
14	Jawa Timur	6,95	16,36	16,22	725	739	742
15	Banten	3,95	4,18	4,25	936	1.047	1.076
16	Bali	1,54	1,54	1,54	559	592	600
	Jawa dan Bali	50,68	59,99	59,85	2.541	2.641	2.666
17	Nusa Tenggara Barat	1,95	1,98	1,99	199	213	216
18	Nusa Tenggara Timur	1,86	1,88	1,88	81	86	87
	Nusa Tenggara	3,81	3,86	3,87	140	150	152
19	Kalimantan Barat	1,96	2,00	2,00	27	29	30
20	Kalimantan Tengah	0,90	0,96	0,98	12	14	14
21	Kalimantan Selatan	1,45	1,47	1,48	69	73	74
22	Kalimantan Timur	1,20	1,27	1,28	11	12	12
	Kalimantan	5,51	5,70	5,74	29,75	32	32,5
23	Sulawesi Utara	0,98	0,98	0,98	131	138	140
24	Sulawesi Tengah	1,06	1,09	1,10	34	37	38
25	Sulawesi Selatan	3,92	3,89	3,87	129	135	136
26	Sulawesi Tenggara	0,89	0,94	0,95	48	53	55
27	Gorontalo	0,41	0,40	0,40	68	71	71
	Sulawesi	7,26	7,30	7,30	82	87	88
28	Maluku	0,57	0,57	0,58	25	26	27
29	Maluku Utara	0,40	0,41	0,41	26	28	29
	Maluku	0,97	0,98	0,99	25,5	27	28
30	Papua	1,08	1,14	1,15	6	7	7
	Indonesia	90	100	100	108	114	116

Sumber : BPS, Statistik Indonesia 2005/2006

Catatan : ¹ Angka proyeksi penduduk Indonesia

Tabel 2.7
Rumah Tangga dan Rata-Rata Banyaknya Anggota Rumah Tangga Menurut Provinsi
Tahun 2000 - 2005

No.	Provinsi	Rumah Tangga (000)			Rata-rata Banyaknya Anggota Rumah Tangga		
		2000	2004	2005	2000	2004	2005
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Nanggroe Aceh Darussalam	922	1.024	1.051	4,3	3,9	3,8
2	Sumatera Utara	2.610	2.861	2.924	4,5	4,3	4,3
3	Sumatera Barat	1.020	1.079	1.093	4,2	4,1	4,0
4	Riau	1.202	1.502	1.585	4,1	3,9	3,9
5	Jambi	594	667	686	4,1	3,9	3,9
6	Sumatera Selatan	1.495	1.678	1.726	4,2	4,0	3,9
7	Bengkulu	358	411	424	4,1	3,9	3,8
8	Lampung	1.633	1.806	1.852	4,1	4,0	3,9
9	Kep.Bangka Belitung	214	235	240	4,2	4,1	4,0
	Sumatera	10.048	11.263	11.581	4,2	4,0	3,9
10	DKI Jakarta	2.232	2.416	2.455	3,7	3,6	3,5
11	Jawa Barat	9.561	11.324	11.854	3,7	3,4	3,3
12	Jawa Tengah	7.900	8.497	8.640	4,0	3,7	3,7
13	DI Yogyakarta	923	1.001	1.018	3,4	3,2	3,2
14	Jawa Timur	9.500	10.144	10.296	3,7	3,5	3,5
15	Banten	2.002	2.399	2.504	4,0	3,8	3,7
16	Bali	800	886	907	3,9	3,8	3,7
	Jawa dan Bali	32.918	36.667	37.674	3,8	3,6	3,5
17	Nusa Tenggara Barat	1.032	1.238	1.303	3,9	3,5	3,3
18	Nusa Tenggara Timur	794	872	893	4,8	4,7	4,6
	Nusa Tenggara	1.826	2.110	2.196	4,4	4,1	4,0
19	Kalimantan Barat	901	1.028	1.062	4,5	4,2	4,1
20	Kalimantan Tengah	482	576	601	3,8	3,6	3,6
21	Kalimantan Selatan	785	869	890	3,8	3,7	3,6
22	Kalimantan Timur	613	721	750	4,0	3,8	3,7
	Kalimantan	2.781	3.194	3.303	4,0	3,8	3,8
23	Sulawesi Utara	545	612	629	3,7	3,5	3,4
24	Sulawesi Tengah	504	583	604	4,3	4,0	4,0
25	Sulawesi Selatan	1.816	2.002	2.049	4,4	4,2	4,1
26	Sulawesi Tenggara	409	487	509	4,4	4,2	4,1
27	Gorontalo	214	246	254	3,9	3,5	3,4
	Sulawesi	3.488	3.930	4.045	4,1	3,9	3,8
28	Maluku	243	253	256	4,8	4,9	5,0
29	Maluku Utara	149	159	162	5,5	5,5	5,5
	Maluku	392	412	418	5,2	5,2	5,3
30	Papua	552	675	709	4	3,6	3,6
	Indonesia	52.005	58.251	59.926	4,2	4,0	4,0

Sumber : BPS, Statistik Indonesia 2005/2006

Tabel 2.8 :
Jumlah Penduduk dan Keluarga
Tahun 2006

No.	Provinsi	Jumlah Penduduk Laki-Laki	Jumlah Penduduk Perempuan	Jumlah Keluarga	Jumlah Pra KS dan KS I
1	2	3	4	5	6
1	Nanggroe Aceh Darussalam	2.027.041	2.112.935	975.374	510.633
2	Sumatera Utara	5.630.479	5.725.608	2.480.890	666.658
3	Sumatera Barat	2.251.014	2.356.735	1.066.287	259.269
4	Riau	2.382.015	2.288.886	1.071.212	269.917
5	Jambi	1.367.068	1.348.530	684.123	190.363
6	Sumatera Selatan	3.469.906	3.473.091	1.633.648	649.606
7	Bengkulu	817.027	803.028	394.508	148.655
8	Lampung	3.669.314	3.558.038	1.718.901	865.132
9	Kep.Bangka Belitung	521.314	505.649	256.633	62.777
10	Kep.Riau	623.376	632.924	318.516	52.644
	Sumatera	22.758.554	22.805.424	10.600.092	3.675.654
11	DKI Jakarta	3.865.581	3.618.992	1.731.503	277.831
12	Jawa Barat	18.843.006	18.655.680	9.814.684	3.680.679
13	Jawa Tengah	16.277.532	16.525.742	8.382.490	4.434.859
14	DI Yogyakarta	1.684.043	1.723.387	843.853	343.824
15	Jawa Timur	17.636.941	18.284.414	9.694.644	97.279
16	Banten	4.457.964	4.387.992	2.100.661	653.966
17	Bali	1.633.360	1.638.223	795.735	130.247
	Jawa dan Bali	64.398.427	64.834.430	33.363.570	9.618.685
18	Nusa Tenggara Barat	2.067.958	2.163.322	1.152.459	743.535
19	Nusa Tenggara Timur	2.119.625	2.177.857	951.260	660.912
	Nusa Tenggara	4.187.583	4.341.179	2.103.719	1.404.447
20	Kalimantan Barat	2.057.121	2.005.433	940.189	292.996
21	Kalimantan Tengah	986.260	940.509	482.884	134.502
22	Kalimantan Selatan	1.621.916	1.614.087	853.861	273.124
23	Kalimantan Timur	1.541.867	1.390.323	749.338	166.573
	Kalimantan	6.207.164	5.950.352	3.026.272	867.195
24	Sulawesi Utara	1.104.111	1.079.960	575.336	201.220
25	Sulawesi Tengah	1.204.041	1.168.188	567.063	251.593
26	Sulawesi Selatan	4.137.659	4.329.961	1.902.591	718.139
27	Sulawesi Tenggara	995.696	997.858	458.917	236.536
28	Gorontalo	454.219	456.879	237.643	112.218
	Sulawesi	7.895.726	8.032.846	3.741.550	1.519.706
29	Maluku	669.330	680.806	287.644	143.601
30	Maluku Utara	455.027	439.519	189.778	81.143
	Maluku	1.124.357	1.120.325	477.422	224.744
31	Papua	1.283.754	1.182.385	577.599	347.132
	Indonesia	107.855.565	108.266.941	53.890.224	17.657.563

Sumber : BPS, Statistik Indonesia 2005/2006

Tabel 2.9
Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas Menurut Provinsi Dan Jenis Kegiatan Selama Seminggu yang Lalu
Tahun 2005

No.	Provinsi	Angkatan Kerja				Jumlah Angkatan Kerja	% Bekerja Terhadap Angkatan Kerja (%)	Bukan Angkatan Kerja			Jumlah Total	% Angkatan Kerja Terhadap Penduduk usia Kerja	
		Bekerja	Pengangguran Terbuka					Sekolah	Mengurus Rumah Tangga	Lainnya			
	Pernah Bekerja		Tidak Pernah Bekerja	Jumlah									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Nanggroe Aceh Darussalam	1.541.973	65.328	154.913	220.241	1.762.214	87,50	315.464	423.055	74.155	812.674	2.574.888	68,44
2	Sumatera Utara	5.166.132	167.604	469.376	636.980	5.803.112	89,02	800.102	1.121.000	342.794	2.263.896	8.067.008	71,94
3	Sumatera Barat	1.737.472	44.423	181.437	225.860	1.963.332	88,50	431.554	538.599	206.405	1.176.558	3.139.890	62,53
4	Riau	2.201.323	124.200	231.368	355.568	2.556.891	86,09	381.328	1.012.873	123.195	1.517.396	4.074.287	62,76
5	Jambi	1.097.207	24.413	78.736	103.149	1.200.356	91,41	138.598	416.389	64.342	619.329	1.819.685	65,97
6	Sumatera Selatan	3.069.074	66.914	220.274	287.188	3.356.262	91,44	448.988	733.447	173.463	1.355.898	4.712.160	71,23
7	Bengkulu	756.142	9.487	40.022	49.509	805.651	93,85	95.434	133.321	32.557	261.312	1.066.963	75,51
8	Lampung	3.113.984	53.161	175.970	229.131	3.343.115	93,15	383.827	909.924	217.968	1.511.719	4.854.834	68,86
9	Kep.Bangka Belitung Sumatera	446.174 19.129.481	10.640 566.170	28.700 1.580.796	39.340 2.146.966	485.514 21.276.447	91,90 90,32	60.581 3.055.876	172.807 5.461.415	27.749 1.262.628	261.137 9.779.919	746.651 31.056.366	65,03 68,03
10	DKI Jakarta	3.565.331	310.525	305.392	615.917	4.181.248	85,27	633.445	1.625.035	189.087	2.447.567	6.628.815	63,08
11	Jawa Barat	14.629.276	929.277	1.598.530	2.527.807	17.157.083	85,27	2.057.426	6.536.330	1.535.369	10.129.125	27.286.208	62,88
12	Jawa Tengah	15.548.609	540.906	905.498	1.446.404	16.995.013	91,49	1.940.360	3.599.439	1.342.842	6.882.641	23.877.654	71,18
13	DI Yogyakarta	1.757.702	35.476	58.031	93.507	1.851.209	94,95	320.228	284.470	117.112	721.810	2.573.019	71,95
14	Jawa Timur	17.668.317	672.132	957.750	1.629.882	19.298.199	91,55	1.893.271	5.006.377	1.570.605	8.470.253	27.768.452	69,50
15	Banten	3.314.836	205.779	344.216	549.995	3.864.831	85,77	600.179	1.384.263	290.094	2.274.536	6.139.367	62,95
16	Bali Jawa dan Bali	1.945.595 58.429.666	40.426 2.734.521	41.322 4.210.739	81.748 6.945.260	2.027.343 65.374.926	95,97 90,04	163.209 7.608.118	238.645 18.674.559	134.971 5.180.080	536.825 31.462.757	2.564.168 96.837.683	79,06 68,66
17	Nusa Tenggara Barat	1.784.832	46.918	128.078	174.996	1.959.828	91,07	257.756	450.801	108.209	816.766	2.776.594	70,58
18	Nusa Tenggara Timur Nusa Tenggara	2.038.575 3.823.407	16.604 63.522	101.217 229.295	117.821 292.817	2.156.396 4.116.224	94,54 92,81	198.454 456.210	265.978 716.779	93.226 201.435	557.658 1.374.424	2.714.054 5.490.648	79,45 75,02
19	Kalimantan Barat	1.821.704	46.106	125.618	171.724	1.993.428	91,39	206.382	402.328	97.159	705.869	2.699.297	73,85
20	Kalimantan Tengah	887.605	14.198	31.064	45.262	932.867	95,15	102.496	204.879	33.999	341.374	1.274.241	73,21
21	Kalimantan Selatan	1.509.963	30.774	68.773	99.547	1.609.510	93,82	169.489	382.349	100.072	651.910	2.261.420	71,17
22	Kalimantan Timur Kalimantan	1.119.335 5.338.607	46.028 137.106	65.152 290.607	111.180 427.713	1.230.515 5.766.320	90,96 92,83	175.598 653.965	437.163 1.426.719	57.834 289.064	670.595 2.369.748	1.901.110 8.136.068	64,73 70,74
23	Sulawesi Utara	854.646	32.624	111.128	143.752	998.398	85,60	125.499	392.100	85.689	603.288	1.601.686	62,33
24	Sulawesi Tengah	946.163	19.927	58.218	78.145	1.024.308	92,37	124.154	323.759	58.817	506.730	1.531.038	66,90
25	Sulawesi Selatan	3.286.775	99.969	416.653	516.622	3.803.397	86,42	476.061	1.370.892	355.103	2.202.056	6.005.453	63,33
26	Sulawesi Tenggara	807.465	14.563	64.518	79.081	886.546	91,08	114.431	208.425	37.875	360.731	1.247.277	71,08
27	Gorontalo Sulawesi	350.191 6.245.240	9.244 176.327	28.749 679.266	37.993 855.593	388.184 7.100.833	90,21 89,14	40.443 880.588	162.035 2.457.211	27.084 564.568	229.562 3.902.367	617.746 11.003.200	62,84 65,30
28	Maluku	418.059	7.385	51.246	58.631	476.690	87,70	95.480	194.338	38.421	328.239	804.929	59,22
29	Maluku Utara Maluku	354.066 772.125	5.159 12.544	29.337 80.583	34.496 93.127	388.562 865.252	91,12 89,41	57.216 152.696	92.321 286.659	18.333 56.754	167.870 496.109	556.432 1.361.361	69,83 64,53
30	Papua	1.209.592	16.160	76.618	92.778	1.302.370	92,88	112.006	221.685	28.337	362.028	1.664.398	78,25
	Indonesia	94.948.118	3.706.350	7.147.904	10.854.254	105.802.372	91	12.919.459	29.245.027	7.582.866	49.747.352	155.549.724	70

Sumber : BPS, Statistik Indonesia 2005/2006

Tabel 2.10
Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas Yang Bekerja Selama Seminggu yang Lalu menurut Provinsi dan Lapangan Pekerjaan Utama
Tahun 2005

No.	Provinsi	Lapangan Pekerjaan Utama ¹⁾									Jumlah total
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Nanggroe Aceh Darussalam	922.363	4.511	54.989	3.784	58.041	222.575	80.155	4.884	190.671	1.541.973
2	Sumatera Utara	2.721.353	10.965	310.464	13.154	208.976	912.913	328.101	115.361	544.845	5.166.132
3	Sumatera Barat	833.410	7.555	130.508	5.501	53.551	320.686	134.868	10.093	241.300	1.737.472
4	Riau	906.744	66.680	223.705	4.101	150.660	368.175	170.727	17.095	293.436	2.201.323
5	Jambi	631.399	11.737	76.374	3.189	34.047	163.899	48.101	6.153	122.308	1.097.207
6	Sumatera Selatan	1.966.311	22.402	120.615	15.580	93.808	477.336	115.629	15.601	241.792	3.069.074
7	Bengkulu	533.779	8.005	14.972	1.213	13.327	100.233	19.755	3.200	61.658	756.142
8	Lampung	2.134.384	1.772	195.738	1.918	98.782	321.655	144.008	9.706	206.021	3.113.984
9	Kep. Bangka Belitung	140.911	128.915	17.573	2.068	22.235	68.292	21.406	1.902	42.872	446.174
	Sumatera	10.790.654	262.542	1.144.938	50.508	733.427	2.955.764	1.062.750	183.995	1.944.903	19.129.481
10	DKI Jakarta	19.651	2.953	698.782	9.072	174.426	1.391.304	326.539	172.938	769.666	3.565.331
11	Jawa Barat	4.069.317	56.256	2.615.424	12.380	859.987	3.732.105	1.333.306	150.235	1.800.266	14.629.276
12	Jawa Tengah	6.339.024	72.978	2.551.679	17.248	902.627	3.318.128	675.111	114.426	1.557.388	15.548.609
13	DI Yogyakarta	634.421	6.883	240.273	3.603	110.686	426.378	58.867	29.723	246.868	1.757.702
14	Jawa Timur	8.188.438	103.160	2.356.939	38.003	822.520	3.354.316	796.519	162.960	1.845.462	17.668.317
15	Banten	923.908	15.867	633.158	7.925	101.632	822.400	347.048	63.996	398.902	3.314.836
16	Bali	608.692	11.938	344.904	5.253	126.380	442.248	92.198	37.708	276.274	1.945.595
	Jawa dan Bali	20.783.451	270.035	9.441.159	93.484	3.098.258	13.486.879	3.629.588	731.986	6.894.826	58.429.666
17	Nusa Tenggara Barat	862.891	44.960	178.257	500	65.145	282.962	111.553	21.918	216.646	1.784.832
18	Nusa Tenggara Timur	1.597.026	21.502	119.719	2.142	31.378	90.088	41.559	8.988	126.173	2.038.575
	Nusa Tenggara	2.459.917	66.462	297.976	2.642	96.523	373.050	153.112	30.906	342.819	3.823.407
19	Kalimantan Barat	1.166.939	31.956	102.114	4.867	57.880	244.925	65.592	7.205	140.226	1.821.704
20	Kalimantan Tengah	565.075	26.144	25.436	1.910	29.593	132.129	47.973	2.063	57.282	887.605
21	Kalimantan Selatan	742.129	55.018	130.465	3.820	58.930	303.708	61.308	8.529	146.056	1.509.963
22	Kalimantan Timur	353.490	60.830	153.667	3.244	82.957	254.493	65.810	12.920	131.924	1.119.335
	Kalimantan	2.827.633	173.948	411.682	13.841	229.360	935.255	240.683	30.717	475.488	5.338.607
23	Sulawesi Utara	378.955	5.808	46.112	3.783	42.666	161.912	80.682	11.571	123.157	854.646
24	Sulawesi Tengah	618.742	2.806	38.361	4.755	30.604	104.863	44.467	4.950	96.615	946.163
25	Sulawesi Selatan	1.858.928	10.260	165.088	6.893	104.760	532.635	207.450	29.243	371.518	3.286.775
26	Sulawesi Tenggara	507.114	3.549	39.675	930	23.513	112.955	33.832	3.500	82.397	807.465
27	Gorontalo	184.042	2.205	24.761	1.087	9.149	56.599	22.593	3.057	46.698	350.191
	Sulawesi	3.547.781	24.628	313.997	17.448	210.692	968.964	389.024	52.321	720.385	6.245.240
28	Maluku	244.837	1.417	17.944	2.958	10.640	65.106	20.762	2.643	51.752	418.059
29	Maluku Utara	240.818	1.933	14.073	657	10.036	40.899	17.472	1.098	27.080	354.066
	Maluku	485.655	3.350	32.017	3.615	20.676	106.005	38.234	3.741	78.832	772.125
30	Papua	919.106	7.877	10.637	5.263	28.151	70.985	39.134	9.120	119.319	1.209.592
	Indonesia	41.814.197	808.842	11.652.406	186.801	4.417.087	18.896.902	5.552.525	1.042.786	10.576.572	94.948.118

Keterangan:
 Berdasarkan Sakernas 2003
¹⁾ (1). Pertanian, Kehutanan,
 Perburuan, Perikanan
 (2). Pertambangan
 (3). Industri Pengolahan
 (4). Listrik, Gas dan Air
 (5). Bangunan
 (6). Perdagangan Besar, Eceran,
 Rumah Makan, dan Hotel
 (7). Angkutan, Pergudangan,
 Komunikasi
 (8). Keuangan, Asuransi, Usaha
 Perdagangan Bangunan, Tanah
 dan Jasa Perusahaan
 (9). Jasa Kemasyarakatan

Tabel 2.11
Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas Yang Bekerja Selama Seminggu yang Lalu
Menurut Status Pekerjaan Utama Dan Lapangan Kerja Utama
Tahun 2005

Status Pekerjaan Utama	Lapangan Pekerjaan Utama ¹⁾									Jumlah
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Berusaha sendiri tanpa dibantu orang lain	3.786.905	142.711	1.182.443	13.176	313.540	7.388.158	3.187.835	66.702	1.398.757	17.480.227
Berusaha dengan dibantu anggota rumah tangga/ buruh tidak tetap	15.694.522	52.434	994.741	5.820	90.619	3.999.865	173.548	27.567	199.998	21.239.114
Berusaha dengan buruh tetap	1.061.389	30.822	382.307	9.011	227.408	791.572	225.702	33.089	147.426	2.908.726
Buruh/karyawan/pegawai	1.889.579	378.702	7.487.410	147.481	1.627.911	3.809.966	1.547.420	884.595	7.968.025	25.741.089
Pekerja bebas pertanian	4.982.713	-	-	-	-	-	-	-	-	4.982.713
Pekerja bebas di non pertanian	-	150.575	503.761	7.370	2.117.179	228.481	378.525	19.691	652.342	4.057.924
Pekerja tidak dibayar	14.399.089	53.598	1.101.744	3.943	40.430	2.678.860	39.495	11.142	210.024	18.538.325
Jumlah	41.814.197	808.842	11.652.406	186.801	4.417.087	18.896.902	5.552.525	1.042.786	10.576.572	94.948.118

Sumber : BPS, Statistik Indonesia 2005/2006

Keterangan : Berdasarkan Sakernas 2005

¹⁾ (1). Pertanian, Kehutanan, Perburuan, Perikanan

(2). Pertambangan

(3). Industri Pengolahan

(4). Listrik, Gas dan Air

(5). Bangunan

(6). Perdagangan Besar, Eceran, Rumah Makan, dan Hotel

(7). Angkutan, Pergudangan, Komunikasi

(8). Keuangan, Asuransi, Usaha Persewaan Bangunan, Tanah, dan Jasa Perusahaan

(9). Jasa Kemasyarakatan

Tabel 2.12
Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas Yang Bekerja
Menurut Jumlah Jam Kerja Pada Pekerjaan Utama Dan Lapangan Kerja Utama
Tahun 2005

Jumlah Jam Kerja Pada Pekerjaan Utama	Lapangan Pekerjaan Utama ¹⁾									Jumlah Total
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0 ^{**})	1.598.466	10.013	126.709	2.494	132.021	225.343	86.815	19.361	208.816	2.410.038
1 - 4	190.465	1.938	7.098	713	2.874	20.323	1.579	8.401	42.723	276.114
5 - 9	1.128.620	4.595	69.670	724	11.040	146.922	10.969	9.042	133.032	1.514.614
10 - 14	2.513.062	13.348	166.496	1.369	9.832	391.347	30.834	10.734	248.427	3.385.449
15 - 19	3.295.512	5.221	207.247	3.216	27.260	428.742	36.828	9.066	329.367	4.342.459
20 - 24	5.599.152	26.373	492.290	6.725	64.213	892.996	116.880	16.760	581.934	7.797.323
25 - 34	10.231.144	94.216	1.032.402	13.588	182.547	1.851.289	408.834	58.866	1.739.451	15.612.337
35 - 44	10.601.809	259.875	3.101.448	70.434	778.313	4.132.749	1.102.031	444.577	3.941.536	24.432.772
45 - 54	4.772.990	259.285	5.091.277	68.138	2.345.732	4.669.572	1.592.995	360.685	1.795.292	20.955.966
55 - 59	1.040.090	51.659	688.703	7.702	584.055	1.881.500	657.617	40.613	461.873	5.413.812
60 - 74	713.599	59.084	580.438	10.507	267.556	3.115.738	1.227.372	52.383	805.098	6.831.775
75+	129.288	23.235	88.628	1.191	11.644	1.140.381	279.771	12.298	289.023	1.975.459
Jumlah	41.814.197	808.842	11.652.406	186.801	4.417.087	18.896.902	5.552.525	1.042.786	10.576.572	94.948.118

Sumber : BPS, Statistik Indonesia 2005/2006

Keterangan : Berdasarkan Sakernas 2005

¹⁾ (1). Pertanian, Kehutanan, Perburuan , Perikanan

(2). Pertambangan dan Penggalian

(3). Industri Pengolahan

(4). Listrik, Gas dan Air

(5). Bangunan

(6). Perdagangan Besar, eceran, Rumah Makan dan Hotel

(7). Angkutan, Pergudangan, Komunikasi

(8). Keuangan, Asuransi, Usaha Persewaan Bangunan, Tanah, Jasa Perusahaan

(9). Jasa Kemasyarakatan

^{*} Sementara Tidak Bekerja

Tabel 2.13
Pekerja Menurut Upah/Gaji Bersih Selama Sebulan
dengan Jenis Kelamin dan Wilayah (Desa Kota), Tahun 2006

Upah	Jenis Kelamin		Jumlah	Wilayah		Jumlah
	Laki-laki	Perempuan		Desa	Kota	
1	2	3	4	5	6	7
<200 000	1.439.246	2.328	3.626.003	2.583.479	1.042.524	3.626.003
200 000 - 399 999	4.318.413	2.691	7.129.597	4.103.831	3.025.766	7.129.597
400 000 - 599 999	4.838.289	1.842	6.772.168	3.045.167	3.727.001	6.772.168
600 000 - 799 999	5.077.070	1.305	6.591.649	2.459.998	4.131.651	6.591.649
800 000 - 999 999	2.939.552	762	3.772.961	1.092.875	2.680.086	3.772.961
1 000 000 - 1 499 999	3.041.830	1.145	4.113.024	1.068.525	3.044.499	4.113.024
1 500 000 - 1 999 999	1.874.634	451	2.514.440	637.299	1.877.141	2.514.440
2 000 000 +	1.304.892	157	1.583.599	215.220	1.368.379	1.583.599
Jumlah	24.833.926	10.681	36.103.441	15.206.394	20.897.047	36.103.441

Sumber : <http://www.nakertrans.go.id/pusdatinnaker/index.php> (BPS/Sakernas, Februari 2006)

Tabel 2.14
Sekolah Dasar (SD) Dibawah
Departemen Pendidikan Nasional Menurut Provinsi,
Tahun 2002/2003-2004/2005

No.	Provinsi	Jumlah Sekolah		
		2002/2003	2003/2004	2004/2005
1	2	3	4	5
1	Nanggroe Aceh Darussalam	2.859	2.872	3.214
2	Sumatera Utara	9.603	9.596	9.282
3	Sumatera Barat	4.008	4.009	4.642
4	Riau	3.700	3.696	3.130
5	Jambi	2.306	2.318	2.313
6	Sumatera Selatan	4.908	4.899	4.730
7	Bengkulu	1.299	1.301	1.302
8	Lampung	4.571	4.567	4.573
9	Kep. Bangka Belitung	798	840	787
10	Kep. Riau	-	-	675
	Sumatera	34.052	34.098	34.648
11	DKI Jakarta	3.056	3.040	3.034
12	Jawa Barat	20.486	20.475	20.299
13	Jawa Tengah	20.729	20.696	20.331
14	DI Yogyakarta	2.135	2.115	2.062
15	Jawa Timur	21.165	21.093	20.771
16	Banten	4.336	4.333	4.321
17	Bali	2.450	2.425	2.421
	Jawa dan Bali	74.357	74.177	73.239
18	Nusa Tenggara Barat	2.782	2.788	2.785
19	Nusa Tenggara Timur	3.976	3.997	4.113
	Nusa Tenggara	6.758	6.785	6.898
20	Kalimantan Barat	3.805	3.809	4.134
21	Kalimantan Tengah	2.605	2.601	2.830
22	Kalimantan Selatan	2.868	2.866	2.896
23	Kalimantan Timur	2.153	1.994	2.115
	Kalimantan	11.431	11.270	11.975
24	Sulawesi Utara	2.165	2.163	2.378
25	Sulawesi Tengah	2.313	2.356	2.685
26	Sulawesi Selatan	7.030	7.075	6.167
27	Sulawesi Tenggara	1.976	1.986	2.359
28	Gorontalo	801	800	1.000
29	Sulawesi Barat	-	-	1.081
	Sulawesi	14.285	14.380	15.670
30	Maluku	1.511	1.511	1.640
31	Maluku Utara	1.112	1.115	1.202
	Maluku	2.623	2.626	2.842
32	Papua	2.546	2.531	1.792
33	Irian Jaya Barat	-	-	729
	Papua dan Irian	2.546	2.531	2.521
	Indonesia	146.052	145.867	147.793

Sumber : BPS, Statistik Indonesia 2005/2006

Tabel 2.15
Sekolah Menengah Pertama (SMP) Dibawah
Departemen Pendidikan Nasional Menurut Provinsi,
Tahun 2002/2003-2004/2005

No.	Provinsi	Jumlah Sekolah		
		2002/2003	2003/2004	2004/2005
1	2	3	4	5
1	Nanggroe Aceh Darussalam	519	542	576
2	Sumatera Utara	1.698	1.698	1.702
3	Sumatera Barat	454	481	482
4	Riau	539	551	528
5	Jambi	335	336	378
6	Sumatera Selatan	729	749	813
7	Bengkulu	204	203	244
8	Lampung	914	927	915
9	Kep. Bangka Belitung	125	131	128
10	Kep. Riau	-	-	107
	Sumatera	5.517	5.618	5.873
11	DKI Jakarta	1.022	1.020	865
12	Jawa Barat	2.225	2.260	2.522
13	Jawa Tengah	2.659	2.687	2.698
14	DI Yogyakarta	424	422	418
15	Jawa Timur	2.895	2.913	3.023
16	Banten	533	559	613
17	Bali	292	303	307
	Jawa dan Bali	10.050	10.164	10.446
18	Nusa Tenggara Barat	268	286	340
19	Nusa Tenggara Timur	582	597	666
	Nusa Tenggara	850	883	1.006
20	Kalimantan Barat	581	591	661
21	Kalimantan Tengah	289	295	373
22	Kalimantan Selatan	331	340	375
23	Kalimantan Timur	385	405	476
	Kalimantan	1.586	1.631	1.885
24	Sulawesi Utara	478	492	517
25	Sulawesi Tengah	313	328	330
26	Sulawesi Selatan	936	941	853
27	Sulawesi Tenggara	260	275	275
28	Gorontalo	92	93	111
29	Sulawesi Barat	-	-	123
	Sulawesi	2.079	2.129	2.209
30	Maluku	309	312	312
31	Maluku Utara	154	147	164
	Maluku	463	459	476
32	Papua	373	372	293
33	Irian Jaya Barat	-	-	86
	Papua dan Irian	373	372	379
	Indonesia	20.918	21.256	22.274

Sumber : BPS, Statistik Indonesia 2005/2006

Tabel 2.16
Sekolah Menengah Atas (SMA) Dibawah
Departemen Pendidikan Nasional Menurut Provinsi,
Tahun 2002/2003-2004/2005

No.	Provinsi	Jumlah Sekolah		
		2002/2003	2003/2004	2004/2005
1	2	3	4	5
1	Nanggroe Aceh Darussalam	232	239	268
2	Sumatera Utara	701	706	762
3	Sumatera Barat	198	203	219
4	Riau	207	216	218
5	Jambi	140	143	152
6	Sumatera Selatan	314	330	374
7	Bengkulu	81	93	90
8	Lampung	291	295	300
9	Kep. Bangka Belitung	52	53	60
10	Kep. Riau	-	-	41
	Sumatera	2.216	2.278	2.484
11	DKI Jakarta	485	485	498
12	Jawa Barat	931	945	1.072
13	Jawa Tengah	848	863	875
14	DI Yogyakarta	193	193	184
15	Jawa Timur	1.051	1.067	1.108
16	Banten	193	219	282
17	Bali	161	165	166
	Jawa dan Bali	3.862	3.937	4.185
18	Nusa Tenggara Barat	147	151	166
19	Nusa Tenggara Timur	159	165	197
	Nusa Tenggara	306	316	363
20	Kalimantan Barat	204	210	230
21	Kalimantan Tengah	108	109	141
22	Kalimantan Selatan	111	114	135
23	Kalimantan Timur	163	170	195
	Kalimantan	586	603	701
24	Sulawesi Utara	167	170	169
25	Sulawesi Tengah	108	111	114
26	Sulawesi Selatan	366	372	350
27	Sulawesi Tenggara	103	118	133
28	Gorontalo	24	24	33
29	Sulawesi Barat	-	-	34
	Sulawesi	768	795	833
30	Maluku	106	113	119
31	Maluku Utara	67	69	72
	Maluku	173	182	191
32	Papua	125	127	103
33	Irian Jaya Barat	-	-	39
	Papua dan Irian	125	127	142
	Indonesia	8.036	8.238	8.899

Sumber : BPS, Statistik Indonesia 2005/2006

Tabel 2.17
Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Dibawah
Departemen Pendidikan Nasional Menurut Provinsi,
Tahun 2002/2003-2004/2005

No.	Provinsi	Jumlah Sekolah		
		2002/2003	2003/2004	2004/2005
1	2	3	4	5
1	Nanggroe Aceh Darussalam	50	56	61
2	Sumatera Utara	550	550	571
3	Sumatera Barat	131	140	158
4	Riau	80	89	74
5	Jambi	55	56	65
6	Sumatera Selatan	101	89	114
7	Bengkulu	32	37	39
8	Lampung	181	179	197
9	Kep. Bangka Belitung	33	37	39
10	Kep. Riau	-	-	28
	Sumatera	1.213	1.233	1.346
11	DKI Jakarta	594	592	590
12	Jawa Barat	578	611	756
13	Jawa Tengah	704	720	783
14	DI Yogyakarta	146	147	161
15	Jawa Timur	801	821	865
16	Banten	94	156	175
17	Bali	76	77	88
	Jawa dan Bali	2.993	3.124	3.418
18	Nusa Tenggara Barat	31	39	54
19	Nusa Tenggara Timur	63	65	80
	Nusa Tenggara	94	104	134
20	Kalimantan Barat	87	89	101
21	Kalimantan Tengah	32	30	41
22	Kalimantan Selatan	42	41	52
23	Kalimantan Timur	85	87	108
	Kalimantan	246	247	302
24	Sulawesi Utara	58	61	58
25	Sulawesi Tengah	37	43	51
26	Sulawesi Selatan	191	186	180
27	Sulawesi Tenggara	29	34	33
28	Gorontalo	8	10	15
29	Sulawesi Barat	-	-	23
	Sulawesi	323	334	360
30	Maluku	23	25	33
31	Maluku Utara	11	10	19
	Maluku	34	35	52
32	Papua	40	38	38
33	Irian Jaya Barat	-	-	15
	Papua dan Irian	40	38	53
	Indonesia	4.943	5.115	5.665

Sumber : BPS, Statistik Indonesia 2005/2006

Tabel 2.18
Perguruan Tinggi¹⁾ Negeri Dan Swasta Dibawah
Departemen Pendidikan Nasional Menurut Provinsi
Tahun 2004 - 2005

No.	Provinsi	Jumlah Perguruan Tinggi	
		Negeri	Swasta
1	2	3	4
1	Nanggroe Aceh Darussalam	3	48
2	Sumatera Utara	3	167
3	Sumatera Barat	5	74
4	Riau	1	73
5	Jambi	1	27
6	Sumatera Selatan	2	105
7	Bengkulu	1	23
8	Lampung	2	66
9	Kep. Bangka Belitung	-	12
10	Kep. Riau	-	14
	Sumatera	18	609
11	DKI Jakarta	4	306
12	Jawa Barat	7	337
13	Jawa Tengah	6	202
14	DI Yogyakarta	3	113
15	Jawa Timur	11	225
16	Banten	1	76
17	Bali	4	36
	Jawa dan Bali	36	1.295
18	Nusa Tenggara Barat	1	27
19	Nusa Tenggara Timur	3	25
	Nusa Tenggara	4	52
20	Kalimantan Barat	2	29
21	Kalimantan Tengah	1	24
22	Kalimantan Selatan	2	26
23	Kalimantan Timur	3	46
	Kalimantan	8	125
24	Sulawesi Utara	3	39
25	Sulawesi Tengah	1	22
26	Sulawesi Selatan	4	144
27	Sulawesi Tenggara	1	23
28	Gorontalo	1	10
29	Sulawesi Barat	-	9
	Sulawesi	10	247
30	Maluku	2	17
31	Maluku Utara	1	8
	Maluku	3	25
32	Papua	1	28
33	Irian Jaya Barat	1	10
	Papua dan Irian	2	38
	Indonesia	81	2.391

Sumber : Departemen Pendidikan Nasional

Catatan : 1) Termasuk Institut, Sekolah Tinggi, Akademi, Politeknik

Statistik Indonesia 2005/2006

Tabel 2.19
Banyaknya Sarana Tempat Ibadah Menurut Provinsi
Tahun 2005

No.	Propinsi	Masjid	Surau/ Langgar	Gereja Kristen	Gereja Katolik	Pura	Vihara/ Klenteng
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Nanggroe Aceh Darussal:	3.392	8.243	151	21	4	26
2	Sumatera Utara	8.833	8.913	7.760	1.452	60	392
3	Sumatera Barat	4.405	11.105	178	77	1	19
4	Riau	4.939	7.716	612	134	11	175
5	Jambi	3.215	5.192	112	34	3	28
6	Sumatera Selatan	6.809	8.521	308	171	167	110
7	Bengkulu	2.475	1.629	118	39	23	11
8	Lampung	9.567	15.729	711	337	454	126
9	Kep. Bangka Belitung	775	632	93	36	6	170
10	Kep. Riau	1.086	810	178	52	9	154
	Sumatera	45.496	68.490	10.221	2.353	738	1.211
11	D.K.I Jakarta	2.936	5.983	550	156	42	157
12	Jawa Barat	50.399	120.276	578	175	37	145
13	Jawa Tengah	38.838	94.979	2.366	547	165	457
14	D.I Yogyakarta	6.243	4.835	276	177	19	22
15	Jawa Timur	36.822	144.162	1.868	404	416	162
16	Banten	7.727	17.500	164	45	7	74
17	Bali	232	277	95	38	10.504	41
	Jawa dan Bali	143.197	388.012	5.897	1.542	11.190	1.058
18	Nusa Tenggara Barat	4.838	8.297	28	12	401	30
19	Nusa Tenggara Timur	736	219	3.704	2.501	28	5
	Nusa Tenggara	5.574	8.516	3.732	2.513	429	35
20	Kalimantan Barat	3.136	3.804	2.017	1.944	31	446
21	Kalimantan Tengah	1.475	2.784	1.176	241	233	51
22	Kalimantan Selatan	2.518	7.590	151	33	75	16
23	Kalimantan Timur	2.332	2.995	1.191	394	41	17
	Kalimantan	9.461	17.173	4.535	2.612	380	530
24	Sulawesi Utara	876	257	3.824	243	18	27
25	Sulawesi Tengah	2.819	1.099	1.625	172	271	23
26	Sulawesi Selatan	11.743	2.608	2.766	492	153	26
27	Sulawesi Tenggara	2.565	905	199	51	194	12
28	Gorontalo	1.664	196	115	22	19	4
	Sulawesi	19.667	5.065	8.529	980	655	92
29	Maluku	950	477	843	181	10	14
30	Maluku Utara	924	572	567	36	1	4
	Maluku	1.874	1.049	1.410	217	11	18
31	Papua	750	963	4.761	833	32	12
	Indonesia	226.019	489.268	39.085	11.050	13.435	2.956

Sumber : BPS, Potensi Desa 2005

Tabel 2.20
Banyaknya Fasilitas Kesehatan Menurut Provinsi
Tahun 2005

No.	Propinsi	Rumah Sakit	Rmh Sakit Bersalin	Poliklinik/ Balai Pengobatan	Puskesmas	Puskesmas Pembantu	Tempat Praktek Dokter	Tempat Praktek Bidan	Posyandu	Polindes	Apotik	TK_Kusus Obat/Jamu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Nanggroe Aceh Darussala	37	74	150	277	705	427	1.078	4.247	2.765	176	429
2	Sumatera Utara	201	476	1.159	478	1.590	1.612	3.560	10.248	1.896	745	596
3	Sumatera Barat	36	173	154	239	829	717	1.629	6.043	1.020	185	361
4	Riau	42	138	282	181	770	536	1.095	3.490	222	266	521
5	Jambi	25	62	67	151	608	366	748	2.679	87	135	209
6	Sumatera Selatan	50	103	145	283	1.000	657	1.786	4.909	1.350	165	229
7	Bengkulu	10	14	37	138	437	211	576	1.491	370	65	83
8	Lampung	37	216	281	266	754	564	1.690	6.557	648	146	238
9	Kep. Bangka Belitung	10	21	34	48	156	123	158	801	193	32	47
10	Kep. Riau	15	46	67	49	174	212	234	720	123	95	174
	Sumatera	463	1.323	2.376	2.110	7.023	5.425	12.554	41.185	8.674	2.010	2.887
11	D.K.I Jakarta	109	393	726	245	83	2.835	996	3.480	5	779	813
12	Jawa Barat	194	713	2.629	1.029	1.779	4.700	7.075	41.988	1.458	1.655	2.679
13	Jawa Tengah	218	1.089	1.385	884	1.950	4.398	7.882	42.473	3.937	1.069	1.442
14	D.I Yogyakarta	38	147	97	124	327	1.104	631	5.034	85	233	169
15	Jawa Timur	208	800	1.119	985	2.427	4.969	8.022	39.176	5.334	1.435	6.965
16	Banten	48	261	921	189	276	909	1.580	7.930	205	368	639
17	Bali	42	144	64	114	498	1.035	890	4.340	183	288	187
	Jawa dan Bali	857	3.547	6.941	3.570	7.340	19.950	27.076	144.421	11.207	5.827	12.894
18	Nusa Tenggara Barat	17	21	40	137	479	416	391	4.913	458	103	72
19	Nusa Tenggara Timur	29	33	132	250	870	221	220	7.012	1.377	80	45
	Nusa Tenggara	46	54	172	387	1.349	637	611	11.925	1.835	183	117
20	Kalimantan Barat	28	59	96	204	736	373	445	3.144	1.112	88	289
21	Kalimantan Tengah	20	22	74	168	699	196	321	1.794	552	91	220
22	Kalimantan Selatan	28	18	123	211	559	369	986	2.994	756	86	436
23	Kalimantan Timur	43	48	147	222	642	566	515	3.734	231	174	389
	Kalimantan	119	147	440	805	2.636	1.504	2.267	11.666	2.651	439	1.334
24	Sulawesi Utara	34	56	118	142	427	476	357	1.554	370	116	79
25	Sulawesi Tengah	27	21	54	148	674	210	302	2.310	831	118	181
26	Sulawesi Selatan	64	117	157	415	1.268	813	777	8.363	758	400	432
27	Sulawesi Tenggara	16	11	20	160	501	146	234	2.092	245	65	126
28	Gorontalo	8	6	16	57	196	114	120	709	244	35	46
	Sulawesi	149	211	365	922	3.066	1.759	1.790	15.028	2.448	734	864
29	Maluku	24	13	38	152	361	115	102	1.207	205	39	66
30	Maluku Utara	14	5	22	63	196	56	86	944	120	33	28
	Maluku	38	18	60	215	557	171	188	2.151	325	72	94
31	Papua	39	48	296	269	814	188	133	2.252	546	144	78
	Indonesia	1.711	5.348	10.650	8.278	22.785	29.634	44.619	228.628	27.686	9.409	18.268

Sumber: BPS, Potensi Desa 2005

Tabel 2.21
Produk Domestik Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha
Tahun 2002 - 2005
(Miliar Rupiah)

Lapangan Usaha	2002 ^f	2003	2004 ^x	2005 ^{**}
1	2	3	4	5
1. Pertanian, peternakan, kehutanan, dan perikanan	281.590,8	305.783,5	331.553,0	365.559,6
a. Tanaman bahan makanan	146.210,8	157.648,8	165.558,2	183.581,2
b. Tanaman perkebunan	43.037,9	46.753,8	51.590,6	57.773,0
c. Peternakan dan hasil-hasilnya	34.434,9	37.354,2	40.634,7	43.123,5
d. Kehutanan	17.602,4	18.414,6	19.678,3	21.450,0
e. Perikanan	40.304,8	45.612,1	54.091,2	59.631,9
2. Pertambangan dan penggalian	160.921,4	167.572,3	196.111,7	285.086,6
a. Minyak dan gas bumi	93.092,1	95.152,1	112.216,9	168.132,4
b. Pertambangan bukan migas	51.194,2	53.313,2	62.250,6	90.392,2
c. Penggalian	16.635,1	19.107,0	21.644,2	26.562,0
3. Industri pengolahan	523.199,6	568.920,3	639.655,0	765.966,7
a. Industri migas	69.659,9	77.667,6	88.872,6	133.984,0
b. Industri bukan migas	453.539,7	491.252,7	550.782,4	631.982,7
4. Listrik, gas, dan air bersih	15.392,0	19.144,2	22.066,7	24.993,2
5. Konstruksi	110.527,4	125.337,1	143.052,3	173.440,6
6. Perdagangan, hotel, dan restoran	312.186,9	335.100,4	369.361,1	429.944,0
a. Perdagangan besar dan eceran	243.104,6	260.578,4	288.112,8	336.424,4
b. Hotel	10.455,7	11.328,9	12.685,4	14.830,9
c. Restoran	58.626,6	63.193,1	68.562,9	78.688,7
7. Pengangkutan dan komunikasi	97.970,1	118.916,4	142.292,0	180.968,7
a. Pengangkutan	66.117,5	79.535,5	88.310,3	110.271,2
b. Komunikasi	31.852,6	39.380,9	53.981,7	70.697,5
8. Keuangan, Real estat, & Jasa perusahaan	154.442,2	174.074,5	194.429,3	228.107,9
a. Bank	68.306,7	74.498,9	78.533,7	88.287,4
b. Lembaga keuangan bukan bank	12.603,8	14.199,3	16.648,7	21.304,1
c. Jasa penunjang keuangan	1.006,3	1.097,2	1.279,8	1.492,3
d. Real Estat	47.873,0	56.575,7	65.936,1	78.218,5
e. Jasa perusahaan	24.652,5	27.703,4	32.031,0	38.805,6
9. Jasa-jasa	165.602,9	198.825,9	234.620,4	275.640,9
a. Pemerintahan umum	83.293,6	101.605,6	121.129,4	135.132,8
b. Swasta	82.309,4	97.220,3	113.491,0	140.508,1
PRODUK DOMESTIK BRUTO	1.821.833,4	2.013.674,6	2.273.141,5	2.729.708,20
PRODUK DOMESTIK BRUTO TANPA MIGAS	1.659.081,4	1.840.854,9	2.072.052,0	2.427.591,8

Sumber : BPS, Statistik Indonesia 2005/2006

Catatan : ^f Angka yang diperbaiki

^x Angka sementara

^{**} Angka sangat sementara

Tabel 2.22
Produk Domestik Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2000 menurut Lapangan Usaha
Tahun 2002 - 2005
(Miliar Rupiah)

Lapangan Usaha	2002 ¹	2003	2004 [*]	2005 ^{**}
1	2	3	4	5
1. Pertanian, peternakan, kehutanan, dan perikanan	231.613,5	240.387,3	248.222,8	254.391,3
a. Tanaman bahan makanan	114.981,5	119.164,8	122.611,7	125.757,5
b. Tanaman perkebunan	37.073,3	38.693,9	39.548,0	40.429,9
c. Peternakan dan hasil-hasilnya	29.430,5	30.647,0	31.672,5	32.581,2
d. Kehutanan	17.125,4	17.213,7	17.333,8	16.981,9
e. Perikanan	33.002,8	34.667,9	37.056,8	38.640,8
2. Pertambangan dan penggalian	169.932,0	167.603,8	160.100,4	162.642,0
a. Minyak dan gas bumi	108.130,6	103.087,2	98.636,3	96.473,4
b. Pertambangan bukan migas	49.066,5	51.007,3	46.947,1	50.588,6
c. Penggalian	12.734,9	13.509,3	14.517,0	15.580,0
3. Industri pengolahan	419.387,8	441.754,9	469.952,4	491.699,5
a. Industri migas	52.179,5	52.609,3	51.583,9	48.849,4
b. Industri bukan migas	367.208,3	389.145,6	418.368,5	442.850,1
4. Listrik, gas, dan air bersih	9.868,2	10.349,2	10.889,8	11.596,6
5. Konstruksi	84.469,8	89.621,8	96.333,6	103.403,8
6. Perdagangan, hotel, dan restoran	243.266,6	256.516,6	271.104,9	294.396,3
a. Perdagangan besar dan eceran	199.506,4	210.653,3	222.246,5	242.572,4
b. Hotel	10.107,9	10.738,6	11.590,7	12.365,6
c. Restoran	33.652,3	35.124,7	37.267,7	39.458,3
7. Pengangkutan dan komunikasi	76.173,1	85.458,4	96.896,7	109.467,1
a. Pengangkutan	52.386,5	57.463,0	62.495,7	66.445,9
b. Komunikasi	23.786,6	27.995,4	34.401,0	43.021,2
8. Keuangan, Real estat, & Jasa perusahaan	131.523,0	140.374,4	151.187,8	161.959,6
a. Bank	61.276,5	64.418,3	68.320,7	71.576,2
b. Lembaga keuangan bukan bank	10.128,4	11.046,8	12.069,9	13.068,4
c. Jasa penunjang keuangan	917,2	968,9	1.052,1	1.086,9
d. Real Estat	37.320,5	40.511,5	43.997,9	47.943,9
e. Jasa perusahaan	21.880,4	23.428,9	25.747,2	28.284,2
9. Jasa-jasa	138.982,4	145.104,9	152.137,3	159.990,7
a. Pemerintahan umum	70.482,4	71.147,7	72.323,6	73.700,1
b. Swasta	68.500,0	73.957,2	79.813,7	86.290,6
PRODUK DOMESTIK BRUTO	1.505.216,4	1.577.171,3	1.656.825,7	1.749.546,9
PRODUK DOMESTIK BRUTO TANPA MIGAS	1.344.906,3	1.420.474,8	1.506.605,5	1.604.224,1

Sumber : BPS, Statistik Indonesia 2005/2006

Catatan : ¹ Angka yang diperbaiki

^{*} Angka sementara

^{**} Angka sangat sementara

Tabel 2.23
Produk Domestik Regional Bruto Per Kapita Atas Dasar
Harga Berlaku Menurut Provinsi
Tahun 2001 - 2004
(Rupiah)

No	Provinsi	2001	2002	2003*	2004**
1	2	3	4	5	6
1	Nanggroe Aceh D.	8.716.399	10.432.760	11.003.930	11.719.844
2	Sumatera Utara	6.727.711	7.508.867	8.672.097	9.741.566
3	Sumatera Barat	6.120.407	6.956.844	7.401.055	8.193.447
4	Riau	20.789.186	20.509.566	22.006.663	26.222.762
5	Jambi	4.706.159	5.545.013	6.124.535	6.932.469
6	Sumatera Selatan	6.670.721	6.822.569	8.471.665	9.667.087
7	Bengkulu	3.422.376	3.789.085	4.750.606	5.224.416
8	Lampung	3.773.272	4.215.104	4.644.830	5.124.077
9	Kep. Bangka Belitung	7.240.302	8.213.159	8.566.898	9.204.420
	Sumatera	68.166.533	73.992.967	81.642.279	92.030.088
10	DKI Jakarta	31.500.011	35.787.991	38.698.805	43.104.982
11	Jawa Barat	6.015.866	6.496.992	7.097.783	7.907.244
12	Jawa Tengah	4.228.852	4.781.062	5.342.034	5.944.029
13	DI. Yogyakarta	4.846.912	5.540.045	6.106.294	6.777.908
14	Jawa Timur	6.691.990	7.593.027	8.298.666	9.368.119
15	Banten	6.220.490	7.001.960	7.431.048	8.167.879
16	Bali	6.329.091	7.385.128	7.781.517	8.532.323
	Jawa dan Bali	65.833.212	74.586.205	80.756.147	89.802.484
17	Kalimantan Barat	5.201.482	5.696.507	6.566.462	7.346.724
18	Kalimantan Tengah	6.448.361	7.144.994	8.488.742	9.720.731
19	Kalimantan Selatan	6.322.214	6.849.542	7.286.145	7.931.429
20	Kalimantan Timur	36.466.252	36.211.162	39.136.862	47.676.437
	Kalimantan	54.438.309	55.902.205	61.478.211	72.675.321
21	Sulawesi Utara	5.850.667	6.240.766	6.548.454	7.268.699
22	Sulawesi Tengah	4.653.096	5.157.233	5.859.828	6.544.575
23	Sulawesi Selatan	4.257.537	4.650.232	5.192.965	5.796.259
24	Sulawesi Tenggara	3.657.427	4.157.171	4.720.254	5.342.029
25	Gorontalo	2.152.502	2.499.561	2.801.184	3.117.581
	Sulawesi	20.571.229	22.704.963	25.122.685	28.069.143
26	Nusa Tenggara Barat	3.784.739	3.965.358	4.413.498	5.532.647
27	Nusa Tenggara Timur	2.352.820	2.604.092	2.780.426	3.113.286
	Nusa Tenggara	6.137.559	6.569.450	7.193.924	8.645.933
28	Maluku	2.582.656	2.974.241	3.013.391	3.254.396
29	Maluku Utara	2.654.491	2.754.412	2.534.800	2.713.703
	Maluku	5.237.147	5.728.653	5.548.191	5.968.099
30	Papua	11.329.934	11.673.223	12.520.193	12.573.824
	Lainnya	4.561.950	4.834.609	5.143.348	5.716.663
	Kawasan Barat	7.537.137	8.356.139	9.202.299	10.322.088
	Kawasan Timur	6.840.614	7.217.952	7.997.880	9.186.787
	Jumlah 30 Provinsi	7.407.578	8.143.556	8.980.394	10.111.712
	Indonesia	8.080.533	8.828.050	9.572.485	10.641.732

Sumber : BPS, Statistik Indonesia 2005/2006

Catatan : * Angka Sementara

** Angka sangat sementara

Tabel 2.24
Produk Domestik Regional Bruto Per Kapita Tanpa Migas
Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Provinsi
Tahun 2001 - 2004
(Rupiah)

No	Provinsi	2001	2002	2003*	2004**
1	2	3	4	5	6
1	Nanggroe Aceh D.	5.121.894	5.828.792	6.106.334	6.926.935
2	Sumatera Utara	6.651.878	7.441.744	8.603.286	9.670.724
3	Sumatera Barat	6.120.407	6.956.844	7.401.055	8.193.447
4	Riau	10.792.273	12.428.586	14.476.948	16.971.341
5	Jambi	3.963.121	4.616.297	5.208.522	5.907.156
6	Sumatera Selatan	4.526.441	4.922.922	6.045.102	6.715.013
7	Bengkulu	3.422.376	3.789.085	4.750.606	5.224.416
8	Lampung	3.720.199	4.096.249	4.490.976	4.962.254
9	Kep. Bangka Belitung	7.240.302	8.213.159	8.566.898	9.204.420
	Sumatera	51.558.891	58.293.678	65.649.727	73.775.706
10	DKI Jakarta	31.336.959	35.649.511	38.574.904	42.952.513
11	Jawa Barat	5.477.356	6.014.404	6.608.594	7.296.415
12	Jawa Tengah	3.948.295	4.374.727	4.853.271	5.395.505
13	DI. Yogyakarta	4.846.912	5.540.045	6.106.294	6.777.908
14	Jawa Timur	6.674.289	7.575.992	8.280.520	9.347.872
15	Banten	6.220.490	7.001.960	7.431.048	8.167.879
16	Bali	6.329.091	7.385.128	7.781.517	8.532.323
	Jawa dan Bali	64.833.392	73.541.767	79.636.148	88.470.415
17	Kalimantan Barat	5.201.482	5.696.507	6.566.462	7.346.724
18	Kalimantan Tengah	6.448.361	7.144.994	8.488.742	9.720.731
19	Kalimantan Selatan	6.155.419	6.676.373	7.117.167	7.756.286
20	Kalimantan Timur	14.251.239	15.935.405	17.003.686	19.004.703
	Kalimantan	32.056.501	35.453.279	39.176.057	43.828.444
21	Sulawesi Utara	5.588.970	5.969.263	6.210.587	6.858.302
22	Sulawesi Tengah	4.653.096	5.157.233	5.859.828	6.544.575
23	Sulawesi Selatan	4.240.793	4.632.591	5.174.724	5.777.553
24	Sulaweasi Tenggara	3.657.427	4.157.171	4.720.254	5.342.029
25	Gorontalo	2.152.502	2.499.561	2.801.184	3.117.581
	Sulawesi	20.292.788	22.415.819	24.766.577	27.640.040
26	Nusa Tenggara Barat	3.784.739	3.965.358	4.413.498	5.532.647
27	Nusa Tenggara Timur	2.352.820	2.604.092	2.780.426	3.113.286
	Nusa Tenggara	6.137.559	6.569.450	7.193.924	8.645.933
28	Maluku	2.569.862	2.959.826	2.998.929	3.239.707
29	Maluku Utara	2.654.491	2.754.412	2.534.800	2.713.703
	Maluku	5.224.353	5.714.238	5.533.729	5.953.410
30	Papua	10.834.233	11.181.456	11.927.036	11.900.860
	Lainnya	4.467.519	4.739.481	5.030.248	5.583.695
	Kawasan Barat	6.863.321	7.704.338	8.524.115	9.532.113
	Kawasan Timur	5.340.302	5.831.096	6.408.619	7.140.296
	Jumlah 30 Provinsi	6.580.027	7.354.465	8.134.350	9.088.898
	Indonesia	7.223.296	8.056.944	8.761.052	9.682.361

Sumber : BPS, Statistik Indonesia 2005/2006

Catatan : * Angka Sementara

** Angka sangat sementara

Tabel 2.25
Penggunaan Lahan Menurut Provinsi
Tahun 2004, (Ha)

No	Provinsi	Pekarangan/Lahan Untuk Bangunan Dan Halaman Sekitarnya	Tegal/Kebun Ladang/Huma	Padang Rumput	Tambak	Kolam/Tebat Empang	Lahan Yang Sementara Tidak Diusahakan	Lahan Untuk Tanaman Kayu-kayuan	Perkebunan Negara/ Swasta	Sawah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Nanggroe Aceh Darussalam	230.120	1.064.108	382.736	36.512	26.572	437.518	494.787	836.920	426.972
2	Sumatera Utara	380.332	689.187	69.602	11.495	3.531	241.193	257.412	1.483.600	550.673
3	Sumatera Barat	116.753	506.314	24.799	5.577	9.268	299.839	652.968	502.618	241.992
4	Riau	448.004	609.944	21.934	16.579	5.695	566.408	900.382	2.337.715	132.646
5	Jambi	173.846	609.199	26.427	1.037	3.815	302.147	405.833	1.654.517	125.316
6	Sumatera Selatan	269.532	619.707	57.636	17.361	28.731	722.183	804.471	1.929.564	474.429
7	Bengkulu	85.677	249.382	12.547	631	2.069	158.802	137.958	452.223	85.641
8	Lampung	239.912	816.661	3.347	10.247	9.965	86.792	116.974	552.773	316.635
9	Kepulauan Bangka Belitung <i>Sumatera</i>	110.022 2.054.198	198.769 5.363.271	9.949 608.977	190 99.629	130 89.776	224.508 3.039.390	205.883 3.976.668	307.184 10.057.114	3.773 2.358.077
10	D.K.I. Jakarta	13.762	2.917	1	151	351	168	77	-	3.180
11	Jawa Barat	399.748	797.595	30.840	40.349	33.235	13.318	237.175	314.073	773.149
12	Jawa Tengah	575.916	768.615	2.662	35.728	2.385	4.896	69.735	77.174	970.686
13	D. I Yogyakarta	86.400	96.234	-	60	587	675	32.918	915	56.982
14	Jawa Timur	591.567	1.143.608	845	57.411	3.517	9.867	115.084	411.936	1.068.926
15	Banten	100.812	250.000	4.869	10.000	2.714	24.406	56.553	51.162	193.688
16	Bali <i>Jawa dan Bali</i>	45.746 1.813.951	129.124 3.188.093	2 39.219	627 144.326	286 43.075	425 53.755	11.914 523.456	127.033 982.293	76.847 3.143.458
17	Nusa Tenggara Barat	37.919	241.840	34.439	10.055	3.229	56.094	192.552	72.032	220.111
18	Nusa Tenggara Timur <i>Nusa Tenggara</i>	205.828 243.747	691.729 933.569	746.660 781.099	1.853 11.908	1.313 4.542	857.266 913.360	388.145 580.697	326.545 398.577	125.711 345.822
19	Kalimantan Barat	252.529	970.072	113.672	8.228	6.862	2.211.335	1.414.499	1.849.692	305.432
20	Kalimantan Tengah	251.218	888.175	71.554	2.398	4.135	951.968	508.463	1.622.846	173.576
21	Kalimantan Selatan	143.219	332.423	294.098	9.898	2.798	276.311	182.665	537.861	423.884
22	Kalimantan Timur <i>Kalimantan</i>	279.277 926.243	1.027.195 3.217.865	726.798 1.206.122	127.751 148.275	4.481 18.276	3.984.761 7.424.375	986.553 3.092.180	1.619.996 5.630.395	115.910 1.018.802
23	Sulawesi Utara	42.413	347.679	33.601	5.783	1.322	48.327	131.043	278.268	59.393
24	Sulawesi Tengah	78.977	605.878	154.126	9.870	50.933	400.921	354.257	888.938	122.142
25	Sulawesi Selatan	200.196	782.525	157.460	99.186	16.664	198.405	493.242	836.610	547.975
26	Sulawesi Tenggara	147.226	284.358	73.499	17.827	1.637	256.733	257.270	401.815	69.432
27	Gorontalo <i>Sulawesi</i>	49.009 517.821	155.686 2.176.126	20.306 438.992	2.067 134.733	585 71.141	82.790 987.176	38.009 1.273.821	95.241 2.500.872	31.060 830.002
	Indonesia ¹⁾	5.555.960	14.878.924	3.074.409	538.871	226.810	12.418.056	9.446.822	19.569.251	7.696.161

Sumber : BPS, Statistik Indonesia 2005/2006

Catatan : 1) Tidak termasuk Maluku, Maluku Utara dan Papua, karena data tidak tersedia

Tabel 2.26
Kualitas Bangunan Rumah dan Permukiman Kumuh di Indonesia
Tahun 2005

No	Provinsi	Permukiman (desa/kelurahan)				Permukiman Kumuh		
		Mewah	Tidak Mewah	Kumuh	Tidak Kumuh	Jumlah lokasi (Lokasi)	Jumlah Bangunan Rumah (Unit)	Jumlah Keluarga (Keluarga)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Nanggroe Aceh Darussalam	26	5.942	360	5.608	710	14.934	17.854
2	Sumatera Utara	132	4.783	459	4.456	1.072	40.063	45.394
3	Sumatera Barat	48	853	51	850	127	6.115	6.566
4	Riau	67	1.410	187	1.290	488	15.504	19.066
5	Jambi	25	1.210	136	1.099	312	8.826	11.000
6	Sumatera Selatan	120	2.658	264	2.514	639	23.291	31.500
7	Bengkulu	14	1.210	45	1.179	62	1.468	1.718
8	Lampung	61	2.130	232	1.959	566	23.197	25.332
9	Kep. Bangka Belitung	22	299	25	296	41	977	1.140
10	Kep. Riau	26	229	90	165	239	9.480	16.712
	Sumatera	541	20.724	1.849	19.416 0	4.256	143.855	176.282
11	D.K.I Jakarta	162	105	186	81	750	124.166	199.603
12	Jawa Barat	371	5.437	777	5.031	2.541	86.616	111.521
13	Jawa Tengah	133	8.431	273	8.291	682	18.263	22.714
14	D.I Yogyakarta	29	409	15	423	35	828	1.147
15	Jawa Timur	270	8.207	297	8.180	903	27.618	38.015
16	Banten	115	1.367	326	1.156	984	34.600	42.840
17	Bali	48	653	22	679	45	813	1.515
	Jawa dan Bali	1.128	24.609	1.896	23.841 0	5.940	292.904	417.355
18	Nusa Tenggara Barat	32	788	263	557	1.095	56.480	62.575
19	Nusa Tenggara Timur	11	2.727	68	2.670	164	5.648	6.286
	Nusa Tenggara	43	3.515	331	3.227 0	1.259	62.128	68.861
20	Kalimantan Barat	35	1.495	256	1.274	656	14.944	22.426
21	Kalimantan Tengah	35	1.316	104	1.247	230	9.522	12.066
22	Kalimantan Selatan	41	1.918	144	1.815	351	12.413	16.544
23	Kalimantan Timur	70	1.274	169	1.175	308	22.521	28.905
	Kalimantan	181	6.003	673	5.511 0	1.545	59.400	79.931
24	Sulawesi Utara	58	1.211	164	1.105	240	8.373	11.254
25	Sulawesi Tengah	20	1.510	186	1.344	308	13.474	14.638
26	Sulawesi Selatan	92	3.194	393	2.893	909	35.106	45.163
27	Sulawesi Tenggara	17	1.668	148	1.537	286	8.274	9.485
28	Gorontalo	6	444	53	397	106	2.095	2.395
	Sulawesi	193	8.027	944	7.276 0	1.849	67.322	82.935
29	Maluku	17	856	53	820	124	4.728	5.338
30	Maluku Utara	24	757	63	718	84	3.167	3.493
	Maluku	41	1.613	116	1.538 0	208	7.895	8.831
31	Papua	41	3.298	381	2.958	682	15.988	20.711
	Indonesia	2.168	67.789	6.190	63.767 0	15.739	649.492	854.906

Sumber : BPS, Potensi Desa 2005/2006

Tabel 2.27 :
Permukiman Mewah dan Permukiman Kumuh di Indonesia
Tahun 2006

No.	Provinsi	Ada Permukiman Mewah		Ada Permukiman Kumuh			Tidak Ada Permukiman Kumuh	
		(desa/kelurahan)	Tidak Ada Permukiman Mewah (desa/kelurahan)	Jumlah Lokasi	Jumlah Bangunan Rumah	Jumlah Keluarga	(desa/kelurahan)	(desa/kelurahan)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Nanggroe Aceh Darussalam	26	5.942	710	14.934	17.854	360	5.608
2	Sumatera Utara	132	4.783	1.072	40.063	45.394	459	4.456
3	Sumatera Barat	48	853	127	6.115	6.566	51	850
4	Riau	67	1.410	488	15.504	19.066	187	1.290
5	Jambi	25	1.210	312	8.826	11.000	136	1.099
6	Sumatera Selatan	120	2.658	639	23.291	31.500	264	2.514
7	Bengkulu	14	1.210	62	1.468	1.718	45	1.179
8	Lampung	61	2.130	566	23.197	25.332	232	1.959
9	Kep. Bangka Belitung	22	299	41	977	1.140	25	296
10	Kep. Riau	26	229	239	9.480	16.712	90	165
	Sumatera	541	20.724	4.256	143.855	176.282	1.849	19.416
11	DKI Jakarta	162	105	750	124.166	199.603	186	81
12	Jawa Barat	371	5.437	2.541	86.616	111.521	777	5.031
13	Jawa Tengah	133	8.431	682	18.263	22.714	273	8.291
14	DI Yogyakarta	29	409	35	828	1.147	15	423
15	Jawa Timur	270	8.207	903	27.618	38.015	297	8.180
16	Banten	115	1.367	984	34.600	42.840	326	1.156
17	Bali	48	653	45	813	1.515	22	679
	Jawa dan Bali	1.128	24.609	5.940	292.904	417.355	1.896	23.841
18	Nusa Tenggara Barat	32	788	1.095	56.480	62.575	263	557
19	Nusa Tenggara Timur	11	2.727	164	5.648	6.286	68	2.670
	Nusa Tenggara	43	3.515	1.259	62.128	68.861	331	3.227
20	Kalimantan Barat	35	1.495	656	14.944	22.426	256	1.274
21	Kalimantan Tengah	35	1.316	230	9.522	12.056	104	1.247
22	Kalimantan Selatan	41	1.918	351	12.413	16.544	144	1.815
23	Kalimantan Timur	70	1.274	308	22.521	28.905	169	1.175
	Kalimantan	181	6.003	1.545	59.400	79.931	673	5.511
24	Sulawesi Utara	58	1.211	240	8.373	11.254	164	1.105
25	Sulawesi Tengah	20	1.510	308	13.474	14.638	186	1.344
26	Sulawesi Selatan	92	3.194	909	35.106	45.163	393	2.893
27	Sulawesi Tenggara	17	1.668	286	8.274	9.485	148	1.537
28	Gorontalo	6	444	106	2.095	2.395	53	397
	Sulawesi	193	8.027	1.849	67.322	82.935	944	7.276
29	Maluku	17	856	124	4.728	5.338	53	820
30	Maluku Utara	24	757	84	3.167	3.493	63	718
	Maluku	41	1.613	208	7.895	8.831	116	1.538
31	Papua	41	3298	682	15.988	20.711	381	2.958
	Indonesia	2.168	67.789	15.739	649.492	854.906	6.190	63.767

Sumber : BPS, Statistik Indonesia 2005/2006

Tabel 2.28 :
Tempat Tinggal di Bantaran/Tepi Sungai di Indonesia
Tahun 2005/2006

No.	Provinsi	Ada Keluarga yang Tinggal di Bantaran/Tepi Sungai			Tidak Ada Keluarga yang Tinggal di Bantaran/Tepi Sungai	
		Jumlah Keluarga	Jumlah Bangunan Rumah	Desa/kelurahan	(desa/kelurahan)	
1	2	3	4	5	6	
1	Nanggroe Aceh Darussalam	26.947	24.687	951	1.929	
2	Sumatera Utara	50.196	46.355	1.004	2.464	
3	Sumatera Barat	13.276	12.047	246	431	
4	Riau	49.114	43.217	514	576	
5	Jambi	46.728	40.780	549	463	
6	Sumatera Selatan	84.586	73.104	898	1.252	
7	Bengkulu	6.182	5.781	222	594	
8	Lampung	34.811	31.445	453	1.019	
9	Kep.Bangka Belitung	1.802	1.632	41	155	
10	Kep.Riau	3.246	2.878	57	28	
	Sumatera	316.888	281.926	4.935	8.911	
11	DKI Jakarta	22.654	16.790	102	112	
12	Jawa Barat	80.691	66.210	1.143	3.706	
13	Jawa Tengah	41.719	36.568	1.013	6.117	
14	DI Yogyakarta	5.553	4.500	86	241	
15	Jawa Timur	59.096	52.031	906	5.968	
16	Banten	27.338	24.437	416	660	
17	Bali	4.326	3.840	122	443	
	Jawa dan Bali	241.377	204.376	3.788	17.247	
18	Nusa Tenggara Barat	14.697	13.796	243	468	
19	Nusa Tenggara Timur	16.213	15.205	453	1.073	
	Nusa Tenggara	30.910	29.001	696	1.541	
20	Kalimantan Barat	46.531	37.729	561	782	
21	Kalimantan Tengah	64.566	51.478	748	501	
22	Kalimantan Selatan	73.281	63.109	1.030	566	
23	Kalimantan Timur	57.939	46.312	534	556	
	Kalimantan	242.317	198.628	2.873	2.405	
24	Sulawesi Utara	13.614	11.506	400	461	
25	Sulawesi Tengah	14.375	13.171	383	592	
26	Sulawesi Selatan	43.188	40.632	897	1.374	
27	Sulawesi Tenggara	5.543	4.982	258	617	
28	Gorontalo	5.566	4.034	142	222	
	Sulawesi	82.286	74.325	2.080	3.266	
29	Maluku	2.459	2.198	92	196	
30	Maluku Utara	2.952	2.698	152	151	
	Maluku	5.411	4.896	244	347	
31	Papua	12.387	8.688	339	1811	
	Indonesia	931.576	801.840	14.955	35.528	

Sumber : BPS, Statistik Indonesia 2005/2006

Tabel 2.29 :
Tempat Tinggal di bawah Jaringan Listrik Tegangan Tinggi (> 500 KV) di Indonesia
Tahun 2005/2006

No.	Provinsi	Ada Keluarga yang Tinggal dibawah Jar. Listrik Tegangan Tinggi			Tdk Ada Keluarga Tinggal dibawah Jar. Listrik Teg. Tinggi (desa/kelurahan)	Tidak Ada Listrik Tegangan Tinggi (desa/kelurahan)
		Jumlah Keluarga	Jumlah Bangunan Rumah	Desa/kelurahan		
1	2	3	4	5	6	7
1	Nanggroe Aceh Darussalam	1.382	1.435	140	2.153	3.675
2	Sumatera Utara	3.452	3.415	131	1.840	2.944
3	Sumatera Barat	3.115	3.087	82	296	523
4	Riau	7.730	6.887	122	643	712
5	Jambi	2.599	2.386	41	322	872
6	Sumatera Selatan	2.538	2.690	74	1.171	1.533
7	Bengkulu	744	724	23	260	941
8	Lampung	1.159	1.358	50	726	1.415
9	Kep. Bangka Belitung	233	231	6	101	214
10	Kep. Riau	74	93	4	79	172
	Sumatera	23.026	22.306	673	7.591	13.001
11	DKI Jakarta	14.338	10.547	58	123	86
12	Jawa Barat	29.921	24.148	700	1.831	3.277
13	Jawa Tengah	19.827	17.332	707	2.038	5.819
14	DI Yogyakarta	634	600	26	94	318
15	Jawa Timur	14.644	13.918	656	2.627	5.194
16	Banten	6.958	5.438	162	501	819
17	Bali	1.278	2.252	50	202	449
	Jawa dan Bali	87.600	74.235	2.359	7.416	15.962
18	Nusa Tenggara Barat	158	157	9	92	719
19	Nusa Tenggara Timur	-	-	0	519	2.219
	Nusa Tenggara	158	157	9	611	2.938
20	Kalimantan Barat	542	300	23	353	1.154
21	Kalimantan Tengah	1.728	1.667	16	501	834
22	Kalimantan Selatan	558	520	42	397	1.520
23	Kalimantan Timur	3.129	2.711	40	411	893
	Kalimantan	5.957	5.198	121	1.662	4.401
24	Sulawesi Utara	3.104	2.769	111	609	549
25	Sulawesi Tengah	-	-	0	47	1.483
26	Sulawesi Selatan	1.402	1.319	88	855	2.343
27	Sulawesi Tenggara	15	15	1	17	1.667
28	Gorontalo	-	-	0	58	392
	Sulawesi	4.521	4.103	200	1.586	6.434
29	Maluku	936	656	4	207	662
30	Maluku Utara	12	10	1	68	712
	Maluku	948	666	5	275	1.374
31	Papua	82	81	11	1.482	1.846
	Indonesia	122.292	106.746	3.378	20.623	45.956

Sumber : BPS, Statistik Indonesia 2005/2006

Tabel 2.30
Daerah Rawan Bencana Alam Beserta Keluarga yang Tinggal di Lokasi Tersebut
Tahun 2005

No	Provinsi	Bencana Tanah Longsor (desa/kelurahan)			Bencana Banjir (desa/kelurahan)			Banjir Bandang (desa/kelurahan)			Gempa Bumi (desa/kelurahan)			Abrasi Pantai (desa/kelurahan)		
		Rawan	Tdk Rawan	Jumlah Keluarga	Rawan	Tdk Rawan	Jumlah Keluarga	Rawan	Tdk Rawan	Jumlah Keluarga	Rawan	Tdk Rawan	Jumlah Keluarga	Rawan	Tdk Rawan	Jumlah Keluarga
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Nanggroe Aceh D	223	4.329	7.069	1.254	3.298	92.789	188	4.364	12.600	4.257	296	706.303	126	4.422	6.831
2	Sumatera Utara	256	741	6.392	415	583	50.497	43	953	4.683	431	566	102.453	20	976	2.160
3	Sumatera Barat	178	378	10.774	160	396	17.438	13	543	2.173	376	179	383.747	35	519	3.279
4	Riau	21	414	1.313	361	74	46.850	6	429	1.237	1	434	480	49	386	1.869
5	Jambi	53	573	4.636	448	178	64.532	40	585	5.541	279	346	93.208	1	624	11
6	Sumatera Selatan	117	364	3.915	386	97	53.915	44	437	6.114	4	477	312	1	480	125
7	Bengkulu	33	1.180	1.042	84	1.130	4.469	2	1.212	148	1.209	4	373.440	16	1.198	1.450
8	Lampung	89	302	3.801	280	110	25.452	41	350	3.526	38	353	15.336	43	348	2.959
9	Kep. Bangka Belitung	2	32	64	12	22	1.881	1	33	124	0	34	0	8	26	494
10	Kep. Riau	6	24	1.109	12	18	1.225	1	29	85	0	30	0	7	23	433
	Sumatera	978	8.337	40.115	3.412	5.906	359.048	379	8.935	36.231	6.595	2.719	1.675.279	306	9.002	19.611
11	D.K.I Jakarta	0	114	0	113	3	82.408	2	112	1.579	0	114	0	0	114	0
12	Jawa Barat	1.250	556	86.570	675	1.136	123.146	75	1.736	6.996	63	1.748	14.752	25	1.786	4.118
13	Jawa Tengah	969	882	50.282	868	985	130.796	83	1.770	12.339	8	1.845	6.689	32	1.821	1.581
14	D.I Yogyakarta	65	59	7.987	71	53	7.658	3	121	1.744	1	123	104	1	123	35
15	Jawa Timur	478	926	38.821	894	511	126.462	111	1.289	26.368	35	1.367	20.961	47	1.355	3.810
16	Banten	83	347	4.097	310	114	43.056	12	417	3.938	79	350	61.611	20	409	912
17	Bali	26	54	778	23	57	2.083	1	79	21	1	79	90	28	52	746
	Jawa dan Bali	2.871	2.938	188.535	2.954	2.859	515.609	287	5.524	52.985	187	5.626	104.207	153	5.660	11.202
18	Nusa Tenggara Barat	26	121	1.382	95	53	9.946	1	146	160	10	137	6.195	16	131	1.508
19	Nusa Tenggara Timur	255	574	8.324	354	474	18.589	31	797	1.630	263	565	60.552	133	696	5.701
	Nusa Tenggara	281	695	9.706	449	527	28.535	32	943	1.790	273	702	66.747	149	827	7.209
20	Kalimantan Barat	21	425	1.033	412	35	64.431	15	431	1.721	0	446	0	22	424	1.739
21	Kalimantan Tengah	16	286	2.001	283	20	51.436	14	289	2.781	0	303	0	6	297	518
22	Kalimantan Selatan	33	357	954	353	37	45.957	1	389	0	0	390	0	10	380	680
23	Kalimantan Timur	37	311	1.154	299	52	50.760	9	338	612	0	347	0	17	329	5.511
	Kalimantan	107	1.379	5.142	1.347	144	212.584	39	1.447	5.114	0	1.486	0	55	1.430	8.448
24	Sulawesi Utara	226	277	6.660	218	285	11.703	18	485	2.090	23	480	6.210	133	370	6.542
25	Sulawesi Tengah	81	1.366	3.871	468	979	37.762	56	1.391	6.062	1.362	85	528.703	242	1.205	15.009
26	Sulawesi Selatan	345	616	14.694	597	365	66.502	34	927	3.807	2	959	1.036	97	864	8.161
27	Sulawesi Tenggara	68	378	1.557	235	211	9.641	6	440	98	115	331	46.173	87	359	3.349
28	Gorontalo	19	136	393	123	32	11.465	10	145	229	5	150	2.878	22	133	1.801
	Sulawesi	739	2.773	27.175	1.641	1.872	137.073	124	3.388	12.286	1.507	2.005	585.000	581	2.931	34.862
29	Maluku	28	154	1.213	60	122	2.903	2	179	366	11	171	1.755	122	60	4.550
30	Maluku Utara	12	189	503	91	110	2.736	6	195	113	27	174	3.427	118	83	6.337
	Maluku	40	343	1.716	151	222	5.639	8	374	479	38	345	5.182	240	143	10.887
31	Papua	181	489	8.085	227	443	12.867	19	651	1.239	222	448	40.385	128	548	7.632
	Indonesia	5.197	16.954	280.474	10.181	11.983	1.271.355	888	21.262	110.124	8.822	13.331	2.476.800	1.612	20.541	99.851

Sumber: BPS, Potensi Desa 2005

Tabel 2.31
Rekapitulasi Kejadian Bencana Alam Musim Hujan
Tahun 2005 - 2006
 (Status per 15 Juni 2006)

No.	Provinsi	Kejadian (Frekuensi)	Meninggal (Orang)	Hilang (Orang)	Mengungsi (Orang)	Tergenang										Rusak/Roboh/Hanyut					
						Peremukiman (Ha)	Rumah (Buah)	Fasum (Buah)	Jalan (Km)	Jembatan (Buah)	Sawah (Ha)	Perkebunan (Ha)	Perikanan (Ha)	Rumah (Buah)	Fasum (Buah)	Jalan (Km)	Jembatan (Buah)	Bendung (Buah)	Saluran (m)	Tanggul (m)	Bang SDA (Buah)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Wilayah Barat		90	27	8	29.215	1.171	6.335	13	93	3	7.106,5	3.860	315	6.021	82	707,76	35	0	5.250	1.000	0
1	N A D	24	18	0	21.345	0	1.120	0	0	0	2.160,0	130	0	509	33	20,00	18	0	5.000	0	0
2	Sumatera Utara	16	1	0	5.880	15	1.790	0	8	0	200,0	0	0	113	0	0,00	0	0	0	0	0
3	Sumatera Barat	22	5	3	715	806	1.325	10	52	3	3.396,0	3.730	315	406	1	674,26	16	0	250	1.000	0
4	Sumatera Selatan	4	0	0	0	0	250	3	0	0	700,5	0	0	60	0	0,00	0	0	0	0	0
5	Riau	8	3	5	1.100	0	750	0	30	0	650,0	0	0	4.892	47	13,50	0	0	0	0	0
6	Kepulauan Riau	2	0	0	0	350	0	0	3	0	0,0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
7	Jambi	3	0	0	0	0	100	0	0	0	0,0	0	0	0	1	0,00	0	0	0	0	0
8	Bengkulu	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
9	Lampung	8	0	0	0	0	1.000	0	0	0	0,0	0	0	41	0	0,00	1	0	0	0	0
10	Bangka Belitung	1	0	0	175	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
Wilayah Tengah		273	6.088	240	441.864	7.520	54.280	86	1.303	11	89.538,5	1.059	7.110	188.791	412	125,12	76	49	5.225	14.480	0
11	DKI Jakarta	8	3	0	1.210	0	500	0	0	0	0,0	0	0	13	0	0,00	0	0	0	75	0
12	Banten	15	1	0	0	17	3.311	0	1	0	1.743,0	192	0	775	0	0,00	0	0	0	0	0
13	Jawa Barat	51	30	42	132	2.972	11.252	37	5	1	48.249,5	0	5.150	959	15	0,06	7	0	0	475	0
14	Jawa Tengah	78	1.166	177	203.198	2.232	9.301	10	564	4	6.622,0	305	1.230	88.884	80	71,49	12	10	0	6.073	0
15	D.I.Y.	8	4.772	0	215.408	40	1.356	0	0	0	1.990,0	0	0	96.450	261	2,50	35	2	35	2.100	0
16	Jawa Timur	94	110	21	13.716	1.529	26.250	39	664	6	27.859,0	562	730	1.690	55	49,07	22	37	5.190	5.757	0
17	Kalimantan Timur	8	0	0	8.200	0	160	0	2	0	3.075,0	0	0	20	0	2,00	0	0	0	0	0
18	Kalimantan Tengah	5	6	0	0	730	1.450	0	67	0	0,0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
19	Kalimantan Barat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
20	Kalimantan Selatan	6	0	0	0	0	700	0	0	0	0,0	0	0	0	1	0,00	0	0	0	0	0
Wilayah Timur		98	171	38	54.568	245	13.916	187	34	1	38.524,7	6.508	530	5.917	39	347,71	43	20	73.482	13.835	3
21	Bali	3	1	0	0	0	0	130	0	0	0,0	0	0	87	0	0,00	0	0	0	0	0
22	NTB	18	9	0	8.989	200	2.577	13	12	1	30.219,7	211	330	3.852	22	307,51	19	8	51.972	0	3
23	NTT	17	14	0	772	0	2.162	33	0	0	4.870,0	47	0	152	0	3,80	1	10	600	0	0
24	Sulawesi Selatan	17	10	22	5.000	0	3.360	4	0	0	2.270,0	1.150	200	117	1	20,00	6	0	0	200	0
25	Sulawesi Tengah	3	0	0	1.000	45	500	0	1	0	200,0	4.700	0	0	0	0,00	0	0	2.410	0	0
26	Sulawesi Tenggara	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0	25	3	0,00	0	0	0	0	0
27	Gorontalo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
28	Sulawesi Utara	11	33	12	30.043	0	3.526	0	21	0	965,0	0	0	1.408	12	16,41	16	2	18.500	13.335	0
29	Sulawesi Barat	1	0	0	0	0	300	0	0	0	0,0	200	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
30	Maluku	15	3	2	4.400	0	191	2	0	0	0,0	0	0	276	1	0,00	1	0	0	0	0
31	Maluku Utara	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
32	Papua	7	98	2	4.364	0	700	5	0	0	0,0	200	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
33	Irian Jaya Barat	2	3	0	0	0	600	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	300	0
Indonesia		461	6.286	286	525.647	8.936	74.531	286	1.430	15	135.169,7	11.427	7.955	200.729	533	1.180,59	154	69	83.957	29.315	3

Sumber : sda.kimpraswil.go.id (Direktorat Sungai, Danau dan Waduk, Dirjen Sumber Daya Air)

Tabel 2.32
Kendaraan Bermotor menurut Polda dan Jenis Kendaraan
Tahun 2002 - 2004, (Unit)

No	Polda	Akhir Tahun	Mobil Penumpang	Bis	Truk	Sepeda Motor	Jumlah
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Nanggroe Aceh D	2002	38.839	18.997	39.455	405.071	502.362
		2003	44.069	19.555	42.240	493.970	599.834
		2004	57.352	28.872	51.517	592.810	730.551
2	Sumatera Utara	2002	182.333	26.301	134.502	1.025.187	1.368.323
		2003	285.314	26.570	140.255	1.300.995	1.753.134
		2004	326.015	27.011	146.703	1.461.760	1.961.489
3	Sumatera Barat	2002	26.519	42.905	48.140	260.363	377.927
		2003	27.857	48.035	52.340	289.067	417.299
		2004	33.354	61.518	59.441	366.445	520.758
4	Riau	2002	86.098	32.904	51.727	518.262	688.991
		2003	94.885	37.343	58.892	606.523	797.643
		2004	139.689	41.029	69.520	704.423	954.661
5	Jambi	2002	25.169	9.364	20.420	224.033	278.986
		2003	28.922	9.427	22.240	252.216	312.805
		2004	34.280	9.678	30.394	344.585	418.937
6	Sumatera Selatan	2002	73.913	15.589	66.644	325.757	481.903
		2003	79.721	16.627	67.788	334.395	498.531
		2004	94.866	19.747	69.120	364.998	548.731
7	Bengkulu	2002	11.439	914	11.327	59.166	82.846
		2003	12.591	1.048	12.799	75.428	101.866
		2004	13.554	1.141	15.381	98.014	128.090
8	Lampung	2002	45.027	3.392	42.916	250.586	341.921
		2003	49.397	3.489	49.446	328.944	431.276
		2004	54.411	3.961	52.366	415.449	526.187
9	Kep. Bangka Belitung	2002	0	0	0	0	0
		2003	0	0	0	0	0
		2004	8.127	14.833	13.777	190.535	227.272
10	DKI Jakarta	2002	1.470.516	312.606	435.010	2.645.597	4.863.729
		2003	1.596.298	367.215	455.709	3.516.900	5.936.122
		2004	1.747.921	389.311	495.464	3.894.457	6.527.153
11	Jawa Barat	2002	377.644	94.431	221.734	1.237.775	1.931.584
		2003	389.339	98.189	239.259	1.285.648	2.012.435
		2004	411.250	103.385	264.767	1.343.902	2.123.304
12	Jawa Tengah	2002	112.061	30.445	223.967	2.984.637	3.351.110
		2003	146.266	30.982	264.189	3.516.900	3.958.337
		2004	153.550	31.761	284.313	4.091.542	4.561.166
13	DI Yogyakarta	2002	71.791	7.096	27.498	590.872	697.257
		2003	74.728	8.039	33.520	666.941	783.228
		2004	80.960	9.785	37.447	762.517	890.709
14	Jawa Timur	2002	460.851	10.904	223.170	3.394.448	4.089.373
		2003	508.611	13.201	267.742	3.944.098	4.733.652
		2004	556.595	14.010	284.915	4.326.336	5.181.856
15	Banten	2002	0	0	0	0	0
		2003	0	0	0	0	0
		2004	25.146	15.516	17.988	187.705	246.355

Lanjutan Tabel 2.32

No	Polda	Akhir Tahun	Mobil Penumpang	Bis	Truk	Sepeda Motor	Jumlah
1	2	3	4	5	6	7	8
16	Bali	2002	126.039	7.871	53.181	871.790	1.058.881
		2003	177.571	8.617	54.868	902.465	1.143.521
		2004	239.587	10.307	69.580	1.018.230	1.337.704
17	Nusa Tenggara Barat	2002	15.035	3.888	16.896	180.854	216.673
		2003	15.636	4.005	17.551	203.066	240.258
		2004	19.366	5.516	19.469	245.606	289.957
18	Nusa Tenggara Timur	2002	9.126	8.366	7.452	59.013	83.957
		2003	11.130	8.857	7.626	59.848	87.461
		2004	19.348	11.989	6.528	71.169	109.034
19	Kalimantan Barat	2002	25.420	3.712	20.595	292.625	342.352
		2003	26.905	3.847	22.071	334.401	387.224
		2004	43.563	4.856	28.735	410.041	487.195
20	Kalimantan Tengah	2002	7.008	4.222	7.703	119.246	138.179
		2003	14.435	4.679	8.458	152.731	180.303
		2004	29.111	7.507	13.534	183.244	233.396
21	Kalimantan Selatan	2002	35.191	8.130	34.128	367.419	444.868
		2003	46.773	8.933	36.707	406.701	499.114
		2004	57.728	16.552	44.272	476.203	594.755
22	Kalimantan Timur	2002	46.960	8.617	43.341	343.655	442.573
		2003	49.997	9.331	50.579	394.995	504.902
		2004	62.998	11.776	73.846	489.981	638.601
23	Sulawesi Utara	2002	25.625	17.298	21.080	71.818	135.821
		2003	27.032	19.613	22.555	78.953	148.153
		2004	27.540	21.825	23.073	103.746	176.184
24	Sulawesi Tengah	2002	22.342	9.641	30.899	232.437	295.319
		2003	36.815	9.863	31.217	260.446	338.341
		2004	58.547	15.466	38.292	321.824	434.129
25	Sulawesi Selatan	2002	69.625	17.092	51.185	328.173	466.075
		2003	98.595	17.729	53.779	326.535	496.638
		2004	123.609	26.778	66.191	311.514	528.092
26	Sulawesi Tenggara	2002	3.148	8.279	7.454	54.617	73.498
		2003	4.657	8.905	7.951	62.562	84.075
		2004	5.246	14.652	9.917	66.632	96.447
27	Gorontalo	2002	0	0	0	0	0
		2003	0	0	0	0	0
		2004	320	22	633	5.676	6.651
28	Maluku	2002	24.292	3.274	14.837	60.275	102.678
		2003	26.015	3.281	15.585	69.441	114.322
		2004	27.102	3.316	15.590	77.835	123.843
29	Maluku Utara	2002	0	0	0	0	0
		2003	0	0	0	0	0
		2004	69	17	129	538	753
30	Papua	2002	11.422	7.984	10.137	98.464	128.007
		2003	11.669	10.699	11.656	112.207	146.231
		2004	13.077	11.059	12.879	128.115	165.130

Sumber : BPS, Statistik Indonesia 2005/2006

Tabel 3.1
Daftar Bendungan Indonesia Berdasarkan Provinsi

No.	Provinsi	Jumlah Bendungan	Tinggi Bendungan		Volume Tubuh Bendungan			Total	
			< 15 m	≥ 15 m	< 100.000 m ³	100.000 ≤ x < 500.000 m ³	≥ 500.000 m ³	Kapasitas Tampung (juta m ³)	Daerah Tangkapan Air (km ²)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Sumatera Utara	3	3	0	3	0	0	0	11.224,00
2	Riau	6	2	4	3	1	2	525	423,22
3	Bengkulu	1	0	1	1	0	0		
4	Lampung	4	2	2	2	0	2	777	882,00
5	Jawa Barat	28	22	6	20	4	4	9.482	11.120,00
6	Jawa Tengah	37	15	22	23	9	5	2.933	3.818,39
7	DI Yogyakarta	1	0	1	0	1	0	33	22,00
8	Jawa Timur	85	70	15	75	3	7	1.041	8.296,75
9	Bali	3	1	2	1	1	1	14	62,30
10	Nusa Tenggara Barat	39	23	16	34	2	3	1.809	785,19
11	Nusa Tenggara Timur	11	6	5	11	0	0		74,00
12	Kalimantan Selatan	1	0	1	0	0	1	600	1.043,00
13	Kalimantan Timur	5	4	1	4	1	0	4	77,00
14	Sulawesi Selatan	9	4	5	7	1	1	552	5.871,40
15	Maluku	1	1	0	1	0	0		
16	Gorontalo	3	3	0	3	0	0		
Indonesia		237	156	81	188	23	26	17.770	43.699,25

Sumber : sda.pu.go.id/SDA/sdainfo_summary.asp?pilih=WIL&prop=&kab=

Tabel 3.2
Rekapitulasi Daerah Irigasi
Tahun 2006

No.	Provinsi	Tingkatan	Jumlah	Ada Jaringan Utama - Ha					Jumlah
				Sudah Sawah		Belum Sawah	Alih Fungsi		
				Optimal	Belum Optimal		Sawah	Blm Sawah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	NANGROE ACEH DARUSSALAM	Teknis	101	97.676,00	28.665,00	103			126.444,00
		Semi Teknis	138	43.716,00	11.595,00	520			55.831,00
		Sederhana	455	42.768,00	45.337,00				88.105,00
		Total	694	184.160,00	85.597,00	623			270.380,00
2	SUMATERA UTARA	Teknis	639	292.952,00	70				292.952,00
		Semi Teknis	293	98.784,00					98.784,00
		Sederhana	159	45.203,00					45.203,00
		Total	1.091	436.939,00	70				436.939,00
3	SUMATERA BARAT	Teknis	1.126	256.261,00					256.260,99
		Semi Teknis	85	10.381,20	190	522			10.101,20
		Sederhana	70	7.237,00	240	339	20		5.817,00
		Total	1.281	273.879,20	430	861	20		272.179,19
4	RIAU	Teknis	4	3.778,00	105	174		200	4.257,00
		Semi Teknis	94	49.846,00	569	3.586,00	260	300	54.561,00
		Sederhana	32	1.868,00	1.419,00	300			3.587,00
		Total	130	55.492,00	2.093,00	4.060,00	260	500	62.405,00
5	JAMBI	Teknis	482	102.906,00	243				103.149,00
		Semi Teknis	49	11.206,00	152	262			11.620,00
		Sederhana	40	4.273,00	20	2.304,00	746		7.343,00
		Total	571	118.385,00	415	2.566,00	746		122.112,00
6	SUMATERA SELATAN	Teknis	13	17.907,00	1.750,00	5.711,00			25.368,00
		Semi Teknis	109	72.265,00	6.909,00	1.833,00			81.007,00
		Sederhana	19	5.005,00	50	50			5.105,00
		Total	141	95.177,00	8.709,00	7.594,00			111.480,00
7	BENGKULU	Teknis	258	7.695,00	3.367,00	1.249,00	1.131,00		13.442,00
		Semi Teknis	212	5.189,00	2.186,00	2.599,00	35		10.009,00
		Sederhana	120	380		219	4		603,000
		Total	590	13.264,00	5.553,00	4.067,00	1.170,00		24.054,00
8	LAMPUNG	Teknis	783	140.920,00	6.122,00	3.284,00		10	150.430,00
		Semi Teknis	21	15.339,00		7.702,00			23.153,00
		Sederhana	1						0,000
		Total	805	156.259,00	6.122,00	10.986,00		10	173.583,00
9	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	Teknis	20						15.332,000
		Semi Teknis	4						1.978,000
		Sederhana	14						5.957,000
		Total	38						23.267,000
10	DKI JAKARTA	Teknis							
		Semi Teknis							
		Sederhana							
		Total							

Lanjutan Tabel 3.2

No.	Provinsi	Tingkatan	Jumlah	Ada Jaringan Utama - Ha					Jumlah	
				Sudah Sawah		Belum Sawah	Alih Fungsi			
				Optimal	Belum Optimal		Sawah	Blm Sawah		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
11	JAWA BARAT	Teknis								
		Semi Teknis								
		Sederhana								
		Total								
12	JAWA TENGAH	Teknis	710	582.002,00		0	0			582.002,000
		Semi Teknis	832	59.860,00		0				59.860,000
		Sederhana	5.462	227.113,00	34		0			227.147,000
		Total	7.004	868.975,00	34	0	0			869.009,000
13	DI YOGYAKARTA	Teknis	1.981							50.725,489
		Semi Teknis	133							11.536,600
		Sederhana	64							1.521,550
		Total	2.178							63.783,639
14	JAWA TIMUR	Teknis	5.718	788.688,00						788.692,0
		Semi Teknis	620	62.134,00						62.137,0
		Sederhana	1.350	53.089,00	6					53.095,0
		Total	7.688	903.911,00	6					903.924,0
15	BANTEN	Teknis	772	149.088,00	10.894,00					160.331,00
		Semi Teknis	87	21.620,00						21.620,00
		Sederhana	195	21.553,00						21.553,00
		Total	1.054	192.261,00	10.894,00					203.504,00
16	BALI	Teknis	89	27.349,70	6.282,30					33.632,00
		Semi Teknis	265	48.827,90	6.486,10					55.314,00
		Sederhana	0							0,000
		Total	354	76.177,60	12.768,40					88.946,00
17	NUSA TENGGARA BARAT	Teknis					5			115.015,000
		Semi Teknis								88.569,000
		Sederhana								1.808,000
		Total						5		205.392,000
18	NUSA TENGGARA TIMUR	Teknis								120.094,000
		Semi Teknis								16.600,000
		Sederhana								8.163,000
		Total								144.857,000
19	KALIMANTAN BARAT	Teknis	8	50						50
		Semi Teknis	129	2.614,00						2.614,00
		Sederhana	385	4.637,00						4.637,00
		Total	522	7.301,00						7.301,00
20	KALIMANTAN TENGAH	Teknis	58	23.689,00	500					24.591,00
		Semi Teknis	1	40						40
		Sederhana	9	1.857,00	265					2.292,00
		Total	68	25.586,00	765					26.923,00
21	KALIMANTAN SELATAN	Teknis	121	50.147,00						50.147,00
		Semi Teknis	11							0,000
		Sederhana	23	1.037,00	63	63				1.100,00
		Total	155	51.184,00	63	63				51.247,00

Lanjutan Tabel 3.2

No.	Provinsi	Tingkatan	Jumlah	Ada Jaringan Utama - Ha						
				Sudah Sawah		Belum Sawah	Alih Fungsi		Jumlah	
				Optimal	Belum Optimal		Sawah	Blm Sawah		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
22	KALIMANTAN TIMUR	Teknis	1	300						300
		Semi Teknis	429	153.774,00	314	342				154.713,00
		Sederhana	14	265	1.605,00	1.507,00				3.819,00
		Total	444	154.339,00	1.919,00	1.849,00				158.832,00
23	SULAWESI UTARA	Teknis	6	11.385,00	221	4.651,00				16.643,00
		Semi Teknis	106	26.544,00	1.067,00	11.432,80		9		39.430,75
		Sederhana	42	2.766,00	110	3.106,40				5.982,40
		Total	154	40.695,00	1.398,00	19.190,20		9		62.056,15
24	SULAWESI TENGAH	Teknis	116	68.107,20	998	40.724,80		395		111.384,99
		Semi Teknis	64	20.932,00		11.227,00		12		32.338,00
		Sederhana	54	8.744,00		3.186,00		4		11.938,00
		Total	234	97.783,20	998	55.137,80		411		155.660,99
25	SULAWESI SELATAN	Teknis	1.473	575.781,00	2.491,00	842	6.661,00			585.775,00
		Semi Teknis	111	51.968,00	772		938			53.678,00
		Sederhana	35	17.286,00	50	1.036,00	425			18.797,00
		Total	1.619	645.035,00	3.313,00	1.878,00	8.024,00			658.250,00
26	SULAWESI TENGGARA	Teknis	65	31.037,00	12.560,00	853				44.450,00
		Semi Teknis	53	12.305,00	3.739,00	1.323,00	5	22		17.394,00
		Sederhana	27	1.320,00	20					1.340,00
		Total	145	44.662,00	16.319,00	2.176,00	5	22		63.184,00
27	GORONTALO	Teknis	12	7.438,00	58	3.802,00				11.240,00
		Semi Teknis	12	4.504,00		1.865,00				6.427,00
		Sederhana	0							0,000
		Total	24	11.942,00	58	5.667,00				17.667,00
28	MALUKU	Teknis	42	25.089,00	2.025,00	3.126,00	3.126,00			30.240,00
		Semi Teknis	5	692	645					1.337,00
		Sederhana	15	8.286,00	4.086,00	1.447,00	1.447,00			14.350,00
		Total	62	34.067,00	6.756,00	4.573,00	4.573,00			45.927,00
29	MALUKU UTARA	Teknis	34	4.797,30	5.471,00					10.268,30
		Semi Teknis	3	350	650					1.000,00
		Sederhana	13							0,000
		Total	50	5.147,30	6.121,00					11.268,30
30	PAPUA	Teknis								
		Semi Teknis								
		Sederhana								
		Total								
Indonesia		Teknis	29.264	3.235.042,70	79.789,30	59.382,80	10.923,00	615,00		2.061.949,30
		Semi Teknis	9.814	772.891,10	35.274,10	42.429,80	1.238,00	343,00		690.899,00
		Sederhana	17.176	454.687,00	53.305,00	12.207,40	3.114,00	4,00		158.500,00
		Total	25.016	4.275.823,00	170.401,40	121.291,00	14.803,00	952,00		2.910.348,00

Tabel 3.3
Skala Irigasi dari Berbagai Tingkatan di Seluruh Provinsi Indonesia
Tahun 2005

No.	Provinsi	Tingkatan	SKALA IRIGASI							
			Kecil (<1000Ha)		Sedang (1000-3000 Ha)		Besar (>3000 Ha)		TOTAL	
			Jumlah	Luas (Ha)	Jumlah	Luas (Ha)	Jumlah	Luas (Ha)	Jumlah	Luas (Ha)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	NANGROE ACEH DARUSSALAM	Teknis	205	40.528,0	34	64.443,0	15	124.888,0	254	229.859,0
		Semi Teknis	106	26.192,0	10	14.753,0	1	9.880,0	117	50.825,0
		Sederhana	280	59.946,0	17	29.593,0	5	52.784,0	302	142.323,0
		Total	591	126.666,0	61	108.789,0	21	187.552,0	673	423.007,0
2	SUMATERA UTARA	Teknis	202	68.656,0	34	57.562,0	15	76.252,0	251	202.470,0
		Semi Teknis	597	144.924,0	20	29.773,0	4	15.330,0	621	190.027,0
		Sederhana	34	6.208,0	1	1.100,0	1	4.000,0	36	11.308,0
		Total	833	219.788,0	55	88.435,0	20	95.582,0	908	403.805,0
3	SUMATERA BARAT	Teknis	846	106.009,0	23	38.007,7	15	108.661,0	884	252.677,7
		Semi Teknis	400	66.315,0	6	7.291,0			406	73.606,0
		Sederhana	461	59.346,0	9	15.757,0			470	75.103,0
		Total	1.707	231.670,0	38	61.055,7	15	108.661,0	1.760	401.386,7
4	RIAU	Teknis	69	16.716,0	8	13.552,0	1	5.363,0	78	35.631,0
		Semi Teknis	76	24.450,0	6	10.968,0	1	5.182,0	83	40.600,0
		Sederhana	33	3.962,0					33	3.962,0
		Total	178	45.128,0	14	24.520,0	2	10.545,0	194	80.193,0
5	JAMBI	Teknis	425	41.681,0	26	48.267,0	12	81.937,0	463	171.885,0
		Semi Teknis	47	9.388,0	1	1.036,0			48	10.424,0
		Sederhana	40	7.511,0					40	7.511,0
		Total	512	58.580,0	27	49.303,0	12	81.937,0	551	189.820,0
6	SUMATERA SELATAN	Teknis	128	21.761,0	14	25.028,0	32	346.780,0	174	393.569,0
		Semi Teknis	98	28.055,0	7	11.236,0	5	29.690,0	110	68.981,0
		Sederhana	103	14.406,0	2	4.000,0	2	10.058,0	107	28.464,0
		Total	329	64.222,0	23	40.264,0	39	386.528,0	391	491.014,0
7	BENGKULU	Teknis	19	6.461,0	10	15.988,0	9	56.419,0	38	78.868,0
		Semi Teknis	328	46.662,0	4	5.524,0			332	52.186,0
		Sederhana	218	22.006,0	3	5.600,0			221	27.606,0
		Total	565	75.129,0	17	27.112,0	9	56.419,0	591	158.660,0

Lanjutan Tabel 3.3

No.	Provinsi	Tingkatan	SKALA IRIGASI							
			Kecil (<1000Ha)		Sedang (1000-3000 Ha)		Besar (>3000 Ha)		TOTAL	
			Jumlah	Luas (Ha)	Jumlah	Luas (Ha)	Jumlah	Luas (Ha)	Jumlah	Luas (Ha)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	LAMPUNG	Teknis	92	30.446,0	23	36.616,0	47	334.078,0	162	401.140,0
		Semi Teknis	80	17.179,0	5	10.484,0	4	38.927,0	89	66.590,0
		Sederhana	14	3.723,0					14	3.723,0
		Total	186	51.348,0	28	47.100,0	51	373.005,0	265	471.453,0
9	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	Teknis	25	8.270,0	4	6.286,0	1	4.500,0	30	19.056,0
		Semi Teknis	8	1.888,0	1	2.017,0			9	3.905,0
		Sederhana								
		Total	33	10.158,0	5	8.303,0	1	4.500,0	39	22.961,0
10	DKI JAKARTA	Teknis			1	1.468,0			1	1.468,0
		Semi Teknis	20	3.442,0	3	3.250,0			23	6.692,0
		Sederhana	4	252,0					4	252,0
		Total	24	3.694,0	4	4.718,0			28	8.412,0
11	JAWA BARAT	Teknis	365	115.156,0	57	94.352,0	40	955.974,0	462	1.165.482,0
		Semi Teknis	245	53.860,0	15	20.835,0	2	7.543,0	262	82.238,0
		Sederhana	459	49.951,0	3	3.612,0			462	53.563,0
		Total	1.069	218.967,0	75	118.799,0	42	963.517,0	1.186	1.301.283,0
12	JAWA TENGAH	Teknis	692	164.676,0	61	99.318,0	54	434.511,0	807	698.505,0
		Semi Teknis	763	65.787,9	4	7.202,0			767	72.989,9
		Sederhana	4.431	158.002,4	5	7.884,0	2	12.490,0	4.438	178.376,4
		Total	5.886	388.466,3	70	114.404,0	56	447.001,0	6.012	949.871,3
13	DI YOGYAKARTA	Teknis	287	16.781,0	12	18.212,0	1	5.818,0	300	40.811,0
		Semi Teknis	225	17.798,0	3	4.610,0			228	22.408,0
		Sederhana	93	2.457,0			1	9.911,0	94	12.368,0
		Total	605	37.036,0	15	22.822,0	2	15.729,0	622	75.587,0
14	JAWA TIMUR	Teknis	1.823	253.348,0	103	173.067,0	36	208.340,0	1.962	634.755,0
		Semi Teknis	911	76.723,0	13	19.392,0	2	52.461,0	926	148.576,0
		Sederhana	1.984	60.416,0	5	8.472,0	1	10.448,0	1.990	79.336,0
		Total	4.718	390.487,0	121	200.931,0	39	271.249,0	4.878	862.667,0
15	BANTEN	Teknis	724	80.590,0	14	24.141,0	7	78.592,0	745	183.323,0
		Semi Teknis	49	13.439,0	2	2.959,0	1	33.881,0	52	50.279,0
		Sederhana	10	2.880,0	1	2.112,0			11	4.992,0
		Total	783	96.909,0	17	29.212,0	8	112.473,0	808	238.594,0

Lanjutan Tabel 3.3

No.	Provinsi	Tingkatan	SKALA IRIGASI							
			Kecil (<1000Ha)		Sedang (1000-3000 Ha)		Besar (>3000 Ha)		TOTAL	
			Jumlah	Luas (Ha)	Jumlah	Luas (Ha)	Jumlah	Luas (Ha)	Jumlah	Luas (Ha)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	BALI	Teknis	143	19.597,0	5	5.574,0	3	23.814,0	151	48.985,0
		Semi Teknis	299	43.088,0	9	13.237,0	1	5.964,0	309	62.289,0
		Sederhana								
		Total	442	62.685,0	14	18.811,0	4	29.778,0	460	111.274,0
17	NUSA TENGGARA BARAT	Teknis	57	25.320,0	42	71.049,0	23	134.056,0	122	230.425,0
		Semi Teknis	210	97.615,0	44	62.897,0	6	30.833,0	260	191.345,0
		Sederhana	10	2.632,0	1	1.150,0			11	3.782,0
		Total	277	125.567,0	87	135.096,0	29	164.889,0	393	425.552,0
18	NUSA TENGGARA TIMUR	Teknis	92	30.500,0	19	32.409,0	2	10.287,0	113	73.196,0
		Semi Teknis	90	26.227,0	9	11.414,0			99	37.641,0
		Sederhana	198	40.456,0	5	6.662,0			203	47.118,0
		Total	380	97.183,0	33	50.485,0	2	10.287,0	415	157.955,0
19	KALIMANTAN BARAT	Teknis	24	7.150,0	5	7.547,0			29	14.697,0
		Semi Teknis	214	39.407,0					214	39.407,0
		Sederhana	357	39.365,0	1	1.000,0			358	40.365,0
		Total	595	85.922,0	6	8.547,0			601	94.469,0
20	KALIMANTAN TENGAH	Teknis	12	5.865,0	4	6.074,0	1	7.135,0	17	19.074,0
		Semi Teknis	3	891,0					3	891,0
		Sederhana	12	3.327,0	2	2.400,0	1	6.036,0	15	11.763,0
		Total	27	10.083,0	6	8.474,0	2	13.171,0	35	31.728,0
21	KALIMANTAN SELATAN	Teknis	4	2.039,0	10	20.298,0	15	126.811,0	29	149.148,0
		Semi Teknis	7	1.781,0	1	1.165,0			8	2.946,0
		Sederhana	46	14.063,0	12	20.735,0	2	8.766,0	60	43.564,0
		Total	57	17.883,0	23	42.198,0	17	135.577,0	97	195.658,0
22	KALIMANTAN TIMUR	Teknis	3		1	1.500,0			4	1.500,0
		Semi Teknis	31	7.525,0	1	1.167,0			32	8.692,0
		Sederhana	80	17.618,0	4	5.564,0			84	23.182,0
		Total	114	25.143,0	6	8.231,0			120	33.374,0
23	SULAWESI UTARA	Teknis	92	24.175,0	8	14.959,0	5	24.227,0	105	63.361,0
		Semi Teknis	56	17.321,0	3	5.216,0			59	22.537,0
		Sederhana	32	3.280,0					32	3.280,0
		Total	180	44.776,0	11	20.175,0	5	24.227,0	196	89.178,0

Lanjutan Tabel 3.3

No.	Provinsi	Tingkatan	SKALA IRIGASI							
			Kecil (<1000Ha)		Sedang (1000-3000 Ha)		Besar (>3000 Ha)		TOTAL	
			Jumlah	Luas (Ha)	Jumlah	Luas (Ha)	Jumlah	Luas (Ha)	Jumlah	Luas (Ha)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	SULAWESI TENGAH	Teknis	79	35.841,0	40	69.725,0	13	72.337,0	132	177.903,0
		Semi Teknis	58	22.794,0	6	8.906,0			64	31.700,0
		Sederhana	42	14.499,0					42	14.499,0
		Total	179	73.134,0	46	78.631,0	13	72.337,0	238	224.102,0
25	SULAWESI SELATAN	Teknis	18	7.986,0	15	29.954,0	31	183.655,0	64	221.595,0
		Semi Teknis	120	44.052,0	8	10.327,0	1	5.030,0	129	59.409,0
		Sederhana	28	9.600,0	7	10.292,0	6	31.004,0	41	50.896,0
		Total	166	61.638,0	30	50.573,0	38	219.689,0	234	331.900,0
26	SULAWESI TENGGARA	Teknis	83	39.219,0	22	37.553,0	4	52.044,0	109	128.816,0
		Semi Teknis	64	23.958,0	5	8.519,0			69	32.477,0
		Sederhana	74	8.490,0	1	1.200,0			75	9.690,0
		Total	221	71.667,0	28	47.272,0	4	52.044,0	253	170.983,0
27	GORONTALO	Teknis	4	2.264,0	8	13.285,0	2	13.648,0	14	29.197,0
		Semi Teknis	10	4.057,0	3	4.572,0	1	3.370,0	14	11.999,0
		Sederhana			1	1.195,0			1	1.195,0
		Total	14	6.321,0	12	19.052,0	3	17.018,0	29	42.391,0
28	MALUKU	Teknis	6	4.336,0	6	12.378,0	1	4.000,0	13	20.714,0
		Semi Teknis	1	900,0					1	900,0
		Sederhana	8	4.014,0	5	6.423,0	1	4.926,0	14	15.363,0
		Total	15	9.250,0	11	18.801,0	2	8.926,0	28	36.977,0
29	MALUKU UTARA	Teknis	1	600,0	2	3.725,0			3	4.325,0
		Semi Teknis								
		Sederhana								
		Total	1	600,0	2	3.725,0			3	4.325,0
30	PAPUA	Teknis	1	210,0	1	2.500,0	2	9.450,0	4	12.160,0
		Semi Teknis	1	959,0	1	3.000,0			2	3.959,0
		Sederhana	7	1.531,0	2	4.500,0			9	6.031,0
		Total	9	2.700,0	4	10.000,0	2	9.450,0	15	22.150,0
		Teknis	6.521	1.176.181,0	612	1.044.837,7	387	3.483.577,0	7.520	5.704.595,7
Indonesia	Semi Teknis	5.117	926.677,9	190	281.750,0	29	238.091,0	5.336	1.446.518,9	
	Sederhana	9.058	609.941,4	87	139.251,0	22	150.423,0	9.167	899.615,4	
	Total	20.696	2.712.800,3	889	1.465.838,7	438	3.872.091,0	22.023	8.050.730,0	

Sumber : sda.kimpraswil.go.id (Unit Data Sumber Daya Air)

Tabel 3.4
Resume Luasan Irigasi dan Rawa di Seluruh Indonesia
Tahun 2006

No.	Provinsi	< 1000 Ha				(1000 - 3000) Ha				>3000 Ha				Luas Total	Luas Total > 3000 dan lintas Prop.
		UTUH KAB/KOTA	LINTAS KAB/KOTA	LINTAS PROP	JUMLAH	UTUH KAB/KOTA	LINTAS KAB/KOTA	LINTAS PROP	JUMLAH	UTUH KAB/KOTA	LINTAS KAB/KOTA	LINTAS PROP	JUMLAH		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 = 5 + 9 + 11 + 12 + 13
1	Nanggroe Aceh Darussalam*	186.608	306	0	186.914	74.376	3.138	0	77.514	112.953	20.260	0	133.213	397.641	133.213
2	Sumatra Utara*	206.948	3.865	0	210.813	128.088	2.846	0	130.934	88.646	6.300	0	94.946	436.693	94.946
3	Sumatra Barat	157.205,91	6.275,00	0,00	163.481	32.633	0	0	32.633	74.570	3.193	0	77.763	273.877	77.763
4	Riau*	64.386	0	0	64.386	168.315	0	0	168.315	61.558	0	0	61.558	294.259	61.558
5	Jambi*	19.401	0	0	19.401	19.733	0	0	19.733	172.338	0	0	172.338	211.472	172.338
6	Sumatera Selatan*	53.159	0	0	53.159	85.091	0	0	85.091	539.153	0	0	539.153	677.403	539.153
7	Bengkulu	45.451	0	0	45.451	12.733	514	0	13.247	18.657	0	0	18.657	77.355	18.657
8	Lampung*	122.458	250	0	122.708	20.559	3.601	0	24.160	111.506	94.547	8.100	214.153	361.021	214.153
9	Kepulauan Bangka Belitung*	8.240	0	0	8.240	8.595	0	0	8.595	3.108	0	0	3.108	19.943	3.108
10	Jawa Barat*	97.339	6.964	947	105.250	64.339	8.720	0	73.059	47.701	114.136	242.523	404.360	582.669	405.307
11	Jawa Tengah*	456.069	21.787	1.189	479.045	61.553	25.682	61	87.296	131.431	145.885	49.204	326.520	892.861	327.770
12	DI Yogyakarta*	39.382	4.541	40	43.964	14.716	0	0	14.716	0	5.158	0	5.158	63.838	5.198
13	Jawa Timur*	434.401	22.271	537	457.209	144.833	20.341	0	165.174	142.870	142.094	39	285.003	907.386	285.540
14	Banten*	87.075	1.359	0	88.434	13.673	5.442	0	19.115	14.560	51.104	0	65.664	173.213	65.664
15	Bali	64.893	0	0	64.893	7.450	0	0	7.450	0	0	0	0	72.343	0
16	Nusa Tenggara Barat	82.833	0	0	82.833	56.625	0	0	56.625	33.802	0	0	33.802	173.260	33.802
17	Nusa Tenggara Timur	29.631	0	0	29.631	37.353	0	0	37.353	36.071	0	0	36.071	103.055	36.071
18	Kalimantan Barat*	107.325	0	0	107.325	77.766	0	0	77.766	119.680	0	0	119.680	304.771	119.680
19	Kalimantan Tengah*	71.108	0	0	71.108	99.168	0	0	99.168	68.602	0	11.531	80.133	250.409	80.133
20	Kalimantan Selatan*	120.050	0	0	120.050	93.425	0	0	93.425	115.063	0	0	115.063	328.538	115.063
21	Kalimantan Timur*	39.891	0	0	39.891	38.766	0	0	38.766	4.000	0	0	4.000	82.657	4.000
22	Sulawesi Utara*	31.532	0	824	32.356	11.866	0	0	11.866	13.181	0	0	13.181	57.403	14.005
23	Gorontalo	7.838	425	0	8.263	5.545,54	2.263,00	0,00	7.809	0	0	0	0	16.072	0
24	Sulawesi Tengah*	52.728	0	0	52.728	34.139	0	0	34.139	17.568	0	0	17.568	104.435	17.568
25	Sulawesi Tenggara*	27.768	0	0	27.768	32.303	0	0	32.303	22.671	0	0	22.671	82.742	22.671
26	Sulawesi Selatan*	227.741	0	0	227.741	99.502	5.016	0	104.518	285.032	51.977	0	337.009	669.268	337.009
27	Sulawesi Barat*	28.210	0	5.500	33.710	2.800	0	0	2.800	40.082	0	0	40.082	76.592	45.582
28	Maluku*	7.499	0	0	7.499	37.157	0	0	37.157	12.500	0	0	12.500	57.156	12.500
29	Maluku Utara	4.802,43	0,00	0,00	4.802	3.708,40	0,00	0,00	3.708	0	0	0	0	8.511	0
30	Papua	1.700	0	0	1.700	4.700	0	0	4.700	3.450	0	0	3.450	9.850	3.450
Indonesia		2.883.672	68.043	9.037	2.960.753	1.491.511	77.563	61	1.569.135	2.290.753	634.654	311.397	3.236.804	7.766.692	3.245.902

Sumber : sda.kimpraswil.go.id (Unit Data Sumber Daya Air)

Catatan : * Data hasil revisi

Tabel : 3.5
Data Sungai Berdasarkan Wilayah Sungai di Indonesia

Wilayah Sungai	Jumlah Sungai	Luas DPS km2	Anak Sungai (buah)	Panjang S.Induk (km)	Lebar S.Induk (rata-rata) m	Q-100 S.Induk (rata-rata) m3/det
1	2	3	4	5	6	7
Krueng Aceh	20	2.526,50	121	315,1	22,21	359
Meureudu-Ureun	10	1.998,60	92	279,3	52,25	162
Pase-Peusangan	27	6.599,60	341	740,1	30,93	0
Jambu Aye	17	7.296,90	240	834,8	45,12	1.008
Tamiyang-Langsa	16	5.898,70	238	446	125,94	0
Woyla-Lambesi	26	7.812,80	407	770,1	26,52	0
Singkulat-Tripa	40	11.242,30	764	1107,2	37,20	0
Singkil	22	14.754,30	930	751,8	36,05	0
Wampu-Besitang	14	7.941,70	363	713,4	79,29	983
Belawan-Belumai-Ular	17	5.637,00	248	562,7	31,00	1.068
Bahbolon	5	3.728,00	232	289,7	48,00	0
Asahan	2	3.741,10	92	147	230,00	122
Barumun-Kualuh	4	24.865,90	323	371,7	33,00	640
Batang Gadis-Batang Toru	60	15.518,30	854	1164,3	21,63	1
Rokan	2	19.445,60	669	498	210,00	0
Siak	13	16.221,90	401	592,5	28,46	0
Kampar	8	27.835,20	661	1144,3	76,05	1.189
Indragiri	8	28.047,80	681	748,3	286,75	0
Silaut	37	7.084,90	192	825,23	17,46	0
Anai-Sualang	27	6.728,20	391	705,69	32,52	1.148
Batang Hari	7	49.336,70	1.437	1283,9	161,29	1.792
Sugihan	45	6.611,50	137	654,5	19,33	0
Baturusa-Cerucut	11	0,00	0	0	0,00	0
Musi	12	73.060,40	2.689	1120,5	315,33	5.754
Mesuji-Tulang Bawang	12	15.957,70	1.195	718,6	32,25	0
Seputih-Sekampung	111	14.761,50	1.067	1236,5	11,66	631
Semangko	95	5.736,70	196	1278,6	19,41	0
Kanal Alas-Talo	35	6.884,30	313	920,3	15,34	0
Lais-Bintunan-Ketahun	24	5.982,10	241	765,7	12,42	0
Ipuh-Teramang-Majunto	19	5.023,10	161	575,2	14,37	0
Cisadane-Ciliwung	7	4.288,24	652	471,1	29,29	4.114
Cisadeg-Cikuningan	91	8.972,43	2.894	1527,4	14,18	22.757
Citarum	14	9.841,12	3.204	881,8	25,36	6.294
Cimanuk	29	7.623,88	1.401	1189,73	17,93	11.702
Ciwulan	46	4.804,96	1.900	980,3	18,91	13.139
Citanduy	7	3.679,54	1.169	341,4	55,71	2.924
Pemali-Comal	32	8.468,55	1.461	1055,9	15,38	10.873
Serayu	17	6.742,07	2.893	543,6	32,94	7.024
Jratun-Seluna	54	9.590,31	2.387	1674,8	7,95	18.348
Progo-Opak-Oyo	2	4.637,07	1.266	203	31,00	1.855
Bengawan Solo	25	17.240,03	3.849	1017,4	14,80	6.617
Kali Brantas	3	16.009,30	1.565	167,5	41,67	1.238
Pekalen-Sampean	156	12.329,79	5.085	2792,25	19,22	42.942
Madura	65	3.719,00	1.416	764,5	22,19	14.744
Bali	167	4.859,60	184	2474	9,71	0
Sumbawa	350	11.261,10	522	3317,5	8,06	0
Sumba	114	9.807,60	240	1696,9	10,19	0
Flores	286	12.501,40	546	2624,6	8,04	0
Timor Barat	357	17.236,10	588	3255,1	9,56	3
Timor Timur	118	12.837,50	556	1760,3	22,01	0
Cengal-Batulicin	75	16.487,90	506	1595	57,84	0
Barito	11	95.257,10	0	1160	104,36	0
Kahayan	8	1.390,60	0	756,1	21,38	0
Mendawai	8	23.971,60	275	791,6	82,00	0

Lanjutan Tabel 3.5

Wilayah Sungai	Jumlah Sungai	Luas DPS km2	Anak Sungai (buah)	Panjang S.Induk (km)	Lebar S.Induk (rata-rata) m	Q-100 S.Induk (rata-rata) m3/det
1	2	3	4	5	6	7
Sampit	14	14.694,90	186	460,2	33,71	0
Pembuang	40	38.164,80	515	1294,3	56,65	0
Pawan	57	24.220,70	860	1436,3	41,44	0
Kapuas	44	98.452,20	3.336	1674,2	133,64	0
Mempawah-Sambas	92	15.728,10	473	1297,6	21,07	0
Sesayap	14	28.760,00	292	1047,6	301,43	0
Kayan	17	35.210,00	250	871,3	419,12	0
Berau-Kelai	53	21.503,40	415	1111,6	89,81	0
Karangan	32	16.124,40	203	978,6	27,69	0
Mahakam	49	90.352,90	858	1985,8	215,94	0
Ranowangko-Tondano	72	3.306,70	88	775,9	10,26	0
Limboto-Bone	25	3.483,70	110	214,8	6,60	0
Paguyaman-Randangan	46	7.491,90	255	705,4	12,11	1
Lambunu-Bual	81	8.718,40	384	1191,8	11,40	0
Parigi-Poso	98	6.978,90	409	1213,8	6,89	0
Bongka-Malik	115	8.152,70	491	1224,7	8,90	0
Lombok-Mantawa	66	4.403,90	190	861,9	13,03	0
Laa-Tambalako	82	10.112,60	432	1083,1	16,81	0
Palu-Lariang	147	17.526,80	1.338	1992,2	9,25	0
Lasolo-Sampara	61	14.841,70	557	814,7	8,23	0
Paleang-Roraya	38	3.780,40	134	430,7	25,05	0
Towari-Susua	70	6.500,60	230	984,9	9,17	0
Kaluku-Karama	67	11.220,70	988	1010,6	8,87	0
Pompengan-Larona	69	12.774,90	645	1153,6	34,88	1.300
Sadang	39	12.107,20	494	835,2	23,33	0
Walanae-Cenranae	93	13.199,50	440	1377,4	22,29	1.650
Jeneberang	81	5.132,20	209	1278,2	21,37	625
Maluku Tenggara	4	0,00	0	0	0,00	0
Maluku Tengah	203	0,00	0	3081,8	0,00	0
Maluku Utara	99	0,00	0	366,9	0,00	0
Wasi-Kais-Omba	43	0,00	0	2150,7	0,00	0
Mamberamo	21	60.419,00	0	1547	0,00	0
Eilanden-Edera	102	45.320,00	0	1683,6	0,00	0
Digul-Bikuma	108	141934	0	1829	0,00	0

Sumber : http://sda.kimpraswil.go.id/SDA/sdainfo_sungaisumm.asp

Tabel : 3.6
Data Rawa Berdasarkan Provinsi di Indonesia

No.	Provinsi	Jumlah Rawa	Peningkatan Fungsi dan Manfaat	Rawa Potensial	Rawa Fungsional
1		2	3	4	5
1	Sumatera Utara	116	0	201.405	0
2	Sumatera Barat	178	0	450.105	0
3	Riau	749	1.071.021	1.078.069	666.234
4	Jambi	126	272.876	503.475	275.084
5	Sumatera Selatan	109	493.476	1.018.532	292.979
6	Lampung	22	178.567	162.536	100.505
7	Kalimantan Barat	551	377.049	314.288	0
8	Kalimantan Tengah	72	191.450	0	0
9	Kalimantan Timur	37	72.227	0	0
10	Sulawesi Tengah	12	19.000	0	0
11	Kepulauan Bangka Belitung	11	46.500	46.500	4.375
	Indonesia	1.983	2.722.166	3.774.910	1.339.177

Sumber : http://sda.pu.go.id/SDA/sdainfo_rawasumm.asp?pilih=WIL&prop=&kab=

Tabel : 3.7
Data Danau Berdasarkan Provinsi di Indonesia

No.	Provinsi	Jenis		Daerah Tangkapan Air	Luas	Volume Tampung
		Danau	Situ			
1	2	3	4	5	6	7
1	Nanggroe Aceh Darussalam	15	246	Belum Ada Data	6.844	7.826.523
2	Sumatera Utara	7	97	Belum Ada Data	1.084	3.570.725
3	Sumatera Barat	14	51	1.393	173.980	880.142.735
4	Riau	26	2	Belum Ada Data	10	221.000
5	Jambi	6	0	Belum Ada Data	5.000	Belum Ada Data
6	Sumatera Selatan	57	2	Belum Ada Data	29.815	262.531.250
7	Bengkulu	7	0	Belum Ada Data	309	2.100.000
8	Lampung	45	0	Belum Ada Data	2.023	6.014.588
9	DKI Jakarta	0	38	Belum Ada Data	25	Belum Ada Data
10	Jawa Barat	206	229	Belum Ada Data	1.459	758.342
11	Jawa Tengah	88	19	Belum Ada Data	7	386.960
12	DI Yogyakarta	69	48	Belum Ada Data	2.430	1.028.100
13	Jawa Timur	8	0	Belum Ada Data	Belum Ada Data	Belum Ada Data
14	Bali	4	14	Belum Ada Data	2.877	1.018
15	Nusa Tenggara Barat	2	0	8.008	31	25
16	Nusa Tenggara Timur	34	27	Belum Ada Data	35	1.120.963
17	Kalimantan Barat	0	1	82.082	306	Belum Ada Data
18	Kalimantan Tengah	0	0	94.094	3.683	Belum Ada Data
19	Kalimantan Selatan	2	0	Belum Ada Data	Belum Ada Data	Belum Ada Data
20	Kalimantan Timur	22	0	Belum Ada Data	Belum Ada Data	Belum Ada Data
21	Sulawesi Utara	24	2	Belum Ada Data	3	72.500
22	Sulawesi Tengah	19	0	Belum Ada Data	Belum Ada Data	Belum Ada Data
23	Sulawesi Selatan	26	30	Belum Ada Data	115	6.856.535
24	Sulawesi Tenggara	15	0	Belum Ada Data	340	776.230
25	Maluku	10	0	Belum Ada Data	Belum Ada Data	Belum Ada Data
26	Papua	51	2	Belum Ada Data	Belum Ada Data	Belum Ada Data
27	Gorontalo	5	5	Belum Ada Data	15	270.000
28	Banten	31	17	Belum Ada Data	1.594	2.902
29	Kepulauan Bangka Belitung	0	1	Belum Ada Data	100	3.000.000
30	Maluku Utara	8	0	Belum Ada Data	Belum Ada Data	Belum Ada Data
Indonesia		801	831	185.577	232.085	1.176.680.396

Sumber : http://sda.pu.go.id/SDA/sdainfo_danausumm.asp?pilih=WIL&prop=&kab=

Tabel 3.8
Panjang Jalan Negara Menurut Provinsi dan Jenis Permukaan
Tahun 2005

No	Provinsi	Aspal	Kerikil	Tanah	Lainnya	Jumlah
1	2	3	4	5	6	7
1	Nanggroe Aceh D	1.326	457	0	0	1.783
2	Sumatera Utara	1.233	865	0	0	2.098
3	Sumatera Barat	1.140	60	0	0	1.200
4	Riau	629	497	0	0	1.126
5	Jambi	598	222	0	0	820
6	Sumatera Selatan	1.009	281	0	0	1.290
7	Bengkulu	736	0	0	0	736
8	Lampung	758	246	0	0	1.004
9	Bangka Belitung	357	174	0	0	531
10	DKI Jakarta	122	0	0	0	122
11	Jawa Barat	611	530	0	0	1.141
12	Jawa Tengah	851	446	0	0	1.297
13	DI. Yogyakarta	146	23	0	0	169
14	Jawa Timur	1.229	670	0	0	1.899
15	Banten	484	6	0	0	490
16	Bali	350	151	0	0	501
17	Nusa Tenggara Barat	497	105	0	0	602
18	Nusa Tenggara Timur	1.153	120	0	0	1.273
19	Kalimantan Barat	901	674	0	0	1.575
20	Kalimantan Tengah	803	912	0	0	1.715
21	Kalimantan Selatan	766	110	0	0	876
22	Kalimantan Timur	831	709	0	0	1.540
23	Sulawesi Utara	1.260	8	0	0	1.268
24	Sulawesi Tengah	1.614	193	0	0	1.807
25	Sulawesi Selatan	1.221	887	0	0	2.108
26	Sulawesi Tenggara	928	366	0	0	1.294
27	Gorontalo	616	0	0	0	616
28	Maluku	733	252	0	0	985
29	Maluku Utara	458	0	0	0	458
30	Irian Jaya	1.404	899	0	0	2.303
Indonesia		24.764	9.863	0	0	34.627

Sumber : Statistik Perhubungan Tahun 2005

Tabel 3.9
Panjang Jalan Provinsi Menurut Provinsi dan Jenis Permukaan
Tahun 2005

No	Provinsi	Aspal	Kerikil	Tanah	Lainnya	Jumlah
1	2	3	4	5	6	7
1	Nanggroe Aceh D	919	618	157	8	1.702
2	Sumatera Utara	1.533	568	501	150	2.752
3	Sumatera Barat	908	155	68	0	1.131
4	Riau	980	816	0	0	1.796
5	Jambi	863	227	392	44	1.526
6	Sumatera Selatan	1.194	170	208	49	1.621
7	Bengkulu	1.357	0	0	0	1.357
8	Lampung	912	856	473	114	2.355
9	Bangka Belitung	337	119	42	14	512
10	DKI Jakarta	1.125	0	0	0	1.125
11	Jawa Barat	974	916	242	9	2.141
12	Jawa Tengah	1.199	1.040	275	37	2.551
13	DI. Yogyakarta	589	95	3	3	690
14	Jawa Timur	898	479	63	0	1.440
15	Banten	255	98	15	5	373
16	Bali	456	303	59	21	839
17	Nusa Tenggara Barat	912	185	260	59	1.416
18	Nusa Tenggara Timur	496	1.884	248	0	2.628
19	Kalimantan Barat	229	204	191	4	628
20	Kalimantan Tengah	332	234	195	11	772
21	Kalimantan Selatan	670	96	128	4	898
22	Kalimantan Timur	729	447	266	0	1.442
23	Sulawesi Utara	600	141	0	0	741
24	Sulawesi Tengah	1.438	360	174	5	1.977
25	Sulawesi Selatan	892	341	244	10	1.487
26	Sulawesi Tenggara	251	198	40	0	489
27	Gorontalo	273	12	0	0	285
28	Maluku	510	371	116	0	997
29	Maluku Utara	587	0	0	0	587
30	Irian Jaya	772	566	524	11	1.873
Indonesia		23.190	11.499	4.884	558	40.131

Sumber : Statistik Perhubungan Tahun 2005

Tabel 3.10
Panjang Jalan Kabupaten/Kota Menurut Provinsi dan Jenis Permukaan
Tahun 2005

No	Provinsi	Aspal	Kerikil	Tanah	Lainnya	Jumlah
1	2	3	4	5	6	7
1	Nanggroe Aceh D	5.815	5.557	3.548	111	15.031
2	Sumatera Utara	12.897	4.491	8.517	4.718	30.623
3	Sumatera Barat	7.053	6.327	3.299	217	16.896
4	Riau	5.455	5.680	6.858	0	17.993
5	Jambi	3.108	1.918	2.439	173	7.638
6	Sumatera Selatan	8.214	4.811	268	371	13.664
7	Bengkulu	1.789	586	997	28	3.400
8	Lampung	3.998	1.980	2.237	658	8.873
9	Bangka Belitung	1.700	165	392	0	2.257
10	DKI Jakarta	5.388	495	0	0	5.883
11	Jawa Barat	18.024	3.711	0	1.315	23.050
12	Jawa Tengah	20.057	3.891	1.021	239	25.208
13	DI. Yogyakarta	2.639	710	617	0	3.966
14	Jawa Timur	25.130	2.877	3.122	561	31.690
15	Banten	2.403	618	258	332	3.611
16	Bali	4.055	752	559	72	5.438
17	Nusa Tenggara Barat	3.044	1.507	453	220	5.224
18	Nusa Tenggara Timur	3.014	5.268	6.618	137	15.037
19	Kalimantan Barat	3.889	1.038	3.039	265	8.231
20	Kalimantan Tengah	2.575	1.136	5.730	0	9.441
21	Kalimantan Selatan	3.889	1.020	293	0	5.202
22	Kalimantan Timur	3.525	1.301	1.699	69	6.594
23	Sulawesi Utara	2.334	1.040	116	0	3.490
24	Sulawesi Tengah	2.924	2.853	1.920	309	8.006
25	Sulawesi Selatan	9.436	6.564	6.797	830	23.627
26	Sulawesi Tenggara	1.719	2.939	1.432	201	6.291
27	Gorontalo	1.514	340	470	126	2.450
28	Maluku	941	245	591	68	1.845
29	Maluku Utara	172	53	115	21	361
30	Irian Jaya	2.058	926	2.218	32	5.234
Indonesia		168.759	70.799	65.623	11.073	316.254

Sumber : Statistik Perhubungan Tahun 2005

Tabel 3.11
Panjang Jalan Negara Menurut Provinsi dan Kondisi Jalan
Tahun 2005

No	Provinsi	Baik	Sedang	Rusak	Rusak Berat	Jumlah
1	2	3	4	5	6	7
1	Nanggroe Aceh D	103	1.298	120	263	1.784
2	Sumatera Utara	783	945	251	119	2.098
3	Sumatera Barat	890	279	22	9	1.200
4	Riau	564	513	43	6	1.126
5	Jambi	786	34	1	0	821
6	Sumatera Selatan	611	487	147	45	1.290
7	Bengkulu	518	183	21	15	736
8	Lampung	603	290	68	44	1.004
9	Bangka Belitung	452	16	62	1	531
10	DKI Jakarta	122	0	0	0	122
11	Jawa Barat	614	419	96	12	1.141
12	Jawa Tengah	678	532	72	16	1.298
13	DI. Yogyakarta	112	56	0	0	169
14	Jawa Timur	1.245	627	26	1	1.899
15	Banten	238	156	44	53	490
16	Bali	382	118	2	0	502
17	Nusa Tenggara Barat	459	114	24	3	602
18	Nusa Tenggara Timur	403	555	272	43	1.273
19	Kalimantan Barat	528	311	257	479	1.575
20	Kalimantan Tengah	776	212	103	624	1.715
21	Kalimantan Selatan	565	225	77	8	876
22	Kalimantan Timur	631	521	105	282	1.540
23	Sulawesi Utara	486	363	228	191	1.267
24	Sulawesi Tengah	850	630	150	177	1.806
25	Sulawesi Selatan	1.509	446	84	69	2.108
26	Sulawesi Tenggara	482	499	98	215	1.294
27	Gorontalo	373	186	51	7	616
28	Maluku	468	85	110	323	985
29	Maluku Utara	176	96	91	94	458
30	Irian Jaya	550	330	344	1.079	2.303
Indonesia		16.957	10.526	2.969	4.178	34.629

Sumber : Statistik Perhubungan Tahun 2005

Tabel 3.12
Panjang Jalan Provinsi Menurut Provinsi dan Kondisi Jalan
Tahun 2005

No	Provinsi	Baik	Sedang	Rusak	Rusak Berat	Jumlah
1	2	3	4	5	6	7
1	Nanggroe Aceh D	407	377	105	813	1.702
2	Sumatera Utara	71	715	657	668	2.111
3	Sumatera Barat	91	684	147	209	1.131
4	Riau	387	490	105	814	1.796
5	Jambi	247	1.036	16	226	1.525
6	Sumatera Selatan	274	1.039	13	32	1.358
7	Bengkulu	605	620	168	228	1.621
8	Lampung	304	894	506	651	2.355
9	Bangka Belitung	292	95	98	27	512
10	DKI Jakarta	1.125	0	0	0	1.125
11	Jawa Barat	241	1.183	389	329	2.142
12	Jawa Tengah	149	1.025	651	725	2.550
13	DI. Yogyakarta	28	611	48	3	690
14	Jawa Timur	373	918	120	29	1.440
15	Banten	54	226	48	44	372
16	Bali	359	434	34	13	840
17	Nusa Tenggara Barat	588	366	187	276	1.417
18	Nusa Tenggara Timur	242	413	701	1.270	2.626
19	Kalimantan Barat	155	234	139	100	628
20	Kalimantan Tengah	224	49	47	452	772
21	Kalimantan Selatan	545	321	20	12	898
22	Kalimantan Timur	904	241	48	250	1.443
23	Sulawesi Utara	181	275	139	147	742
24	Sulawesi Tengah	896	458	380	243	1.977
25	Sulawesi Selatan	300	338	175	673	1.486
26	Sulawesi Tenggara	80	228	75	106	489
27	Gorontalo	79	46	23	135	283
28	Maluku	433	58	343	164	985
29	Maluku Utara	97	46	152	292	587
30	Irian Jaya	709	366	315	484	1.874
Indonesia		10.440	13.786	5.849	9.415	39.490

Sumber : Statistik Perhubungan Tahun 2005

Tabel 3.13
Panjang Jalan Kabupaten/Kota Menurut Provinsi dan Kondisi Jalan
Tahun 2005

No	Provinsi	Baik	Sedang	Rusak	Rusak Berat	Jumlah
1	2	3	4	5	6	7
1	Nanggroe Aceh D	3.611	8.242	3.025	153	15.031
2	Sumatera Utara	8.760	6.849	6.271	8.743	30.623
3	Sumatera Barat	5.800	4.333	2.870	3.893	16.896
4	Riau	4.831	5.697	7.445	20	17.993
5	Jambi	2.091	1.910	2.138	1.499	7.638
6	Sumatera Selatan	8.890	2.921	1.107	746	13.664
7	Bengkulu	1.152	821	606	821	3.400
8	Lampung	2.772	2.683	1.723	1.695	8.873
9	Bangka Belitung	846	632	492	288	2.258
10	DKI Jakarta	4.865	878	140	0	5.883
11	Jawa Barat	7.294	7.059	5.703	2.994	23.050
12	Jawa Tengah	11.812	7.089	4.024	2.284	25.209
13	DI. Yogyakarta	1.389	1.558	860	159	3.966
14	Jawa Timur	17.865	6.170	5.905	1.750	31.690
15	Banten	1.732	820	432	627	3.611
16	Bali	4.034	692	690	22	5.438
17	Nusa Tenggara Barat	2.980	1.101	733	410	5.224
18	Nusa Tenggara Timur	7.155	5.896	1.986	0	15.037
19	Kalimantan Barat	3.421	2.015	1.150	1.646	8.232
20	Kalimantan Tengah	3.449	2.724	1.348	1.920	9.441
21	Kalimantan Selatan	3.418	970	660	154	5.202
22	Kalimantan Timur	2.518	2.281	1.504	291	6.594
23	Sulawesi Utara	1.108	1.216	899	267	3.490
24	Sulawesi Tengah	3.085	1.825	1.410	1.686	8.006
25	Sulawesi Selatan	6.149	6.121	5.410	5.947	23.627
26	Sulawesi Tenggara	1.991	1.756	1.058	1.486	6.291
27	Gorontalo	1.114	140	448	748	2.450
28	Maluku	470	614	280	481	1.845
29	Maluku Utara	101	81	58	121	361
30	Irian Jaya	1.837	1.048	2.109	240	5.234
Indonesia		126.540	86.142	62.484	41.091	316.257

Sumber : Statistik Perhubungan Tahun 2005

Tabel 3.14
Kondisi Jalan Nasional Hasil Survei Tahun 2006
Berdasarkan Rata-Rata IRI Dalam Satu Ruas Jalan
Status 15 Januari 2007

No	Provinsi	Baik		Sedang		Rusak Ringan		Rusak Berat		Mantap		Tidak Mantap		Total (Km)
		(Km)	(%)	(Km)	(%)	(Km)	(%)	(Km)	(%)	(Km)	(%)	(Km)	(%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Nanggroe Aceh D	288,30	16,17	1.283,67	72,00	65,12	3,65	145,70	8,17	1.571,97	88,17	210,81	11,83	1.782,78
2	Sumatera Utara	662,63	31,58	1.336,28	63,69	99,13	4,73	-	-	1.998,92	95,27	99,13	4,73	2.098,05
3	Sumatera Barat	527,42	43,95	667,07	55,58	5,60	0,47	-	-	1.194,49	99,53	5,60	0,47	1.200,09
4	Riau	116,31	10,33	936,35	83,15	0,62	0,06	72,83	6,47	1.052,66	93,48	73,45	6,52	1.126,11
5	Kepulauan Riau ¹⁾													
6	Jambi	706,57	86,13	113,83	13,87	-	-	-	-	820,40	100,00	-	-	820,40
7	Bengkulu	225,79	30,66	510,65	69,34	-	-	-	-	736,44	100,00	-	-	736,44
8	Sumatera Selatan	519,71	40,28	743,52	57,63	27,01	2,09	-	-	1.263,23	97,91	27,01	2,09	1.290,24
9	Bangka Belitung	476,49	89,79	54,16	10,21	-	-	-	-	530,65	100,00	-	-	530,65
10	Lampung	289,20	28,80	610,22	60,77	104,74	10,43	-	-	899,42	89,57	104,74	10,43	1.004,16
11	DKI Jakarta ²⁾	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Jawa Barat	245,99	21,56	892,71	78,26	2,00	0,17	-	-	1.138,69	99,83	2,00	0,17	1.140,69
13	Banten	51,39	10,48	361,61	73,74	33,48	6,83	43,92	8,96	413,00	84,22	77,40	15,78	490,40
14	Jawa Tengah	476,71	36,74	805,02	62,04	8,33	0,64	7,57	0,58	1.281,72	98,77	15,91	1,23	1.297,63
15	DI. Yogyakarta	47,84	28,34	120,97	71,66	-	-	-	-	168,81	100,00	-	-	168,81
16	Jawa Timur	511,11	26,91	1.328,34	69,94	55,90	2,94	3,85	0,20	1.839,46	96,85	59,75	3,15	1.899,21
17	Kalimantan Barat	613,53	38,95	189,43	12,02	612,83	38,90	159,52	10,13	802,97	50,97	772,35	49,03	1.575,32
18	Kalimantan Tengah	308,38	17,98	659,74	38,47	417,09	24,32	329,75	19,23	968,12	56,45	746,83	43,55	1.714,95
19	Kalimantan Timur	453,80	29,47	839,14	54,50	145,99	9,48	100,76	6,54	1.292,95	83,97	246,75	16,03	1.539,70
20	Kalimantan Selatan	125,57	14,33	443,47	50,62	206,46	23,57	100,50	11,47	569,04	64,96	306,96	35,04	876,00
21	Bali	409,49	81,63	90,60	18,06	0,74	0,15	0,81	0,16	500,09	99,69	1,55	0,31	501,64
22	Nusa Tenggara Barat	412,43	68,53	167,12	27,77	22,29	3,70	-	-	579,54	96,30	22,29	3,70	601,83
23	Nusa Tenggara Timur	177,06	13,91	958,77	75,31	137,19	10,78	-	-	1.135,83	89,22	137,19	10,78	1.273,02
24	Sulawesi Utara	332,61	26,24	709,17	55,96	97,00	7,65	128,61	10,15	1.041,78	82,20	225,61	17,80	1.267,39
25	Gorontalo	84,76	13,75	416,19	67,54	115,29	18,71	-	-	500,95	81,29	115,29	18,71	616,24
26	Sulawesi Tengah	390,41	21,61	1.075,33	59,53	199,78	11,06	140,94	7,80	1.465,74	81,14	340,72	18,86	1.806,46
27	Sulawesi Selatan	177,46	11,25	1.331,35	84,37	33,23	2,11	35,92	2,28	1.508,81	95,62	69,14	4,38	1.577,95
28	Sulawesi Barat	104,22	19,68	189,46	35,77	140,12	26,46	95,79	18,09	293,68	55,45	235,91	44,55	529,59
29	Sulawesi Tenggara	347,87	26,89	534,35	41,30	178,90	13,83	232,75	17,99	882,22	68,18	411,65	31,82	1.293,87
30	Maluku	241,75	24,53	146,64	14,88	297,78	30,22	299,30	30,37	388,38	39,41	597,08	60,59	985,46
31	Maluku Utara	221,54	48,35	143,08	31,23	-	-	93,59	20,43	364,62	79,57	93,59	20,43	458,21
32	Papua	30,58	1,70	674,41	37,57	553,47	30,83	536,49	29,89	704,99	39,28	1.089,96	60,72	1.794,95
33	Irian Jaya Barat	-	-	239,85	47,20	268,36	52,80	-	-	239,85	47,20	268,36	52,80	508,21
Total Indonesia - DKI Jakarta		9.576,92	27,75	18.572,50	53,82	3.828,45	11,09	2.528,60	7,33	28.149,42	81,58	6.357,03	18,42	34.506,45
11	DKI Jakarta ²⁾													122,38
Total Indonesia + DKI Jakarta														34.628,83

Sumber: http://www.pu.go.id/Ditjen_Prasarana%20Wil/kondisi_jalan.asp?jenis_kondisi=1&tahun=2006&action=+lihat++

¹⁾ Jalan nasional di Kepulauan Riau belum ditetapkan dengan SK Menteri

²⁾ DKI Jakarta menggunakan URMS

Tabel 3.15
Kondisi Jalan Provinsi Tahun 2006 (Status 1 Maret 2006)
Berdasarkan Kriteria IRI

No	Provinsi	Panjang Kondisi (Km)												Total (Km)
		Baik		Sedang		Rusak Ringan		Rusak Berat		Mantap		Tidak Mantap		
		Km	%	Km	%	Km	%	Km	%	Km	%	Km	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 (3+5)	12	13 (7+9)	14	15 (11+13)
1	Nanggroe Aceh D	135,247	9,5%	376,681	26,3%	105,452	7,4%	812,695	56,8%	511,9	35,8%	918,1	64,2%	1.430,1
2	Sumatra Utara	105,219	4,9%	715,284	33,3%	657,151	30,6%	667,907	31,1%	820,5	38,2%	1.325,1	61,8%	2.145,6
3	Sumatra Barat	64,617	5,9%	683,836	61,9%	146,874	13,3%	209,047	18,9%	748,5	67,8%	355,9	32,2%	1.104,4
4	Riau	111,707	7,3%	489,947	32,2%	104,834	6,9%	814,266	53,5%	601,7	39,6%	919,1	60,4%	1.520,8
5	Jambi	98,745	7,2%	1.035,548	75,2%	16,338	1,2%	226,347	16,4%	1.134,3	82,4%	242,7	17,6%	1.377,0
6	Bengkulu	56,776	5,3%	619,697	57,8%	168,317	15,7%	227,707	21,2%	676,5	5,3%	396,0	36,9%	1.072,5
7	Sumatra Selatan	38,845	2,5%	1.461,630	94,6%	12,912	0,8%	31,569	2,0%	1.500,5	63,1%	44,5	36,9%	1.545,0
8	Bangka Belitung	5,550	1,1%	395,100	75,3%	97,605	18,6%	26,528	5,1%	400,7	97,1%	124,1	2,9%	524,8
9	Lampung	288,416	12,3%	893,795	38,2%	506,489	21,6%	650,803	27,8%	1.182,2	50,5%	1.157,3	49,5%	2.339,5
10	Jawa Barat	82,899	4,2%	1.182,526	59,6%	388,576	19,6%	328,830	16,6%	1.265,4	63,8%	717,4	36,2%	1.982,8
11	Banten	30,964	8,9%	226,102	64,9%	47,687	13,7%	43,826	12,6%	257,1	73,7%	91,5	26,3%	348,6
12	Jawa Tengah	78,965	3,2%	1.024,711	41,3%	650,884	26,3%	724,966	29,2%	1.103,7	44,5%	1.375,9	55,5%	2.479,5
13	DI Yogyakarta	28,157	4,1%	610,674	88,5%	48,382	7,0%	2,590	0,4%	638,8	92,6%	51,0	7,4%	689,8
14	Jawa Timur	452,206	29,8%	917,807	60,4%	119,950	7,9%	28,599	1,9%	1.370,0	90,2%	148,5	9,8%	1.518,6
15	Kalimantan Barat	68,429	12,6%	234,093	43,2%	139,411	25,7%	99,746	18,4%	302,5	55,8%	239,2	44,2%	541,7
16	Kalimantan Tengah	114,267	17,2%	49,082	7,4%	47,271	7,1%	452,121	68,2%	163,3	24,6%	499,4	75,4%	662,7
17	Kalimantan Timur	107,507	16,7%	240,507	37,3%	47,788	7,4%	249,567	38,7%	348,0	53,9%	297,4	46,1%	645,4
18	Kalimantan Selatan	372,535	40,2%	320,765	34,6%	20,478	2,2%	212,450	22,9%	693,3	74,9%	232,9	25,1%	926,2
19	Bali	257,040	34,8%	434,391	58,8%	33,904	4,6%	13,053	1,8%	691,4	93,6%	47,0	6,4%	738,4
20	NTB	284,502	25,6%	365,602	32,9%	186,747	16,8%	275,744	24,8%	650,1	58,4%	462,5	41,6%	1.112,6
21	NTT	108,615	4,4%	413,049	16,6%	700,524	28,1%	1.271,163	51,0%	521,7	20,9%	1.971,7	79,1%	2.493,4
22	Sulawesi Utara	83,819	13,0%	275,135	42,7%	138,569	21,5%	146,644	22,8%	359,0	55,7%	285,2	44,3%	644,2
23	Gorontalo	20,396	9,1%	46,331	20,6%	23,400	10,4%	134,900	59,9%	66,7	29,7%	158,3	70,3%	225,0
24	Sulawesi Tengah	260,898	19,4%	458,426	34,2%	380,184	28,3%	242,699	18,1%	719,3	53,6%	622,9	46,4%	1.342,2
25	Sulawesi Selatan	158,713	11,8%	337,673	25,1%	174,660	13,0%	673,492	50,1%	496,4	36,9%	848,2	63,1%	1.344,5
26	Sulawesi Tenggara	28,201	6,5%	227,854	52,1%	75,464	17,3%	105,608	24,2%	256,1	58,6%	181,1	41,4%	437,1
27	Maluku	79,330	12,3%	57,830	9,0%	343,220	53,3%	163,650	25,4%	137,2	21,3%	506,9	78,7%	644,0
28	Maluku Utara	75,500	13,3%	46,000	8,1%	152,310	26,9%	291,910	51,6%	121,5	21,5%	444,2	78,5%	565,7
29	Papua	46,010	3,8%	365,600	30,2%	314,690	26,0%	483,880	40,0%	411,6	34,0%	798,6	66,0%	1.210,2
Indonesia		3.644,1	10,8%	14.505,7	43,2%	5.850,1	17,4%	9.612,3	28,6%	18.149,8	54,0%	15.462,4	46,0%	33.612,1

Sumber : Subdit Data dan Informasi, Direktorat Bina Program, Bina Marga, Dep. PU (31-08-2006)

Tabel 3.16
Kondisi Jalan Kabupaten Tahun 2006 (Status 1 Maret 2006)
 Berdasarkan Kriteria IRI

No	Provinsi	Panjang Kondisi (Km)												Total (Km)
		Baik		Sedang		Rusak Ringan		Rusak Berat		Mantap		Tidak Mantap		
		Km	%	Km	%	Km	%	Km	%	Km	%	Km	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 (3+5)	12	13 (7+9)	14	15 (11+13)
1	Nanggroe Aceh D	2.978,920	28,8%	2.995,440	29,0%	3.337,250	32,3%	1.024,930	9,9%	5.974,4	57,8%	4.362,2	42,2%	10.336,5
2	Sumatra Utara	2.709,490	12,2%	5.153,275	23,1%	9.974,790	44,8%	4.435,470	19,9%	7.862,8	35,3%	14.410,3	64,7%	22.273,0
3	Sumatra Barat	2.989,500	24,6%	2.373,000	19,6%	3.485,500	28,7%	3.289,150	27,1%	5.362,5	44,2%	6.774,7	55,8%	12.137,2
4	Riau	1.105,100	11,6%	3.248,400	34,0%	4.158,900	43,5%	1.045,600	10,9%	4.353,5	45,5%	5.204,5	54,5%	9.558,0
5	Jambi	961,864	13,5%	1.335,252	18,7%	2.653,088	37,2%	2.189,630	30,7%	2.297,1	32,2%	4.842,7	67,8%	7.139,8
6	Bengkulu	244,450	6,5%	283,140	7,5%	3.218,710	85,6%	15,380	0,4%	527,6	14,0%	3.234,1	86,0%	3.761,7
7	Sumatra Selatan	1.583,128	22,5%	2.429,336	34,6%	2.588,745	36,8%	429,100	6,1%	4.012,5	57,1%	3.017,8	42,9%	7.030,3
8	Bangka Belitung	460,400	20,4%	611,080	27,1%	954,540	42,3%	232,100	10,3%	1.071,5	47,5%	1.186,6	52,5%	2.258,1
9	Lampung	2.034,670	20,8%	3.394,700	34,7%	2.481,090	25,4%	1.872,050	19,1%	5.429,4	55,5%	4.353,1	44,5%	9.782,5
10	Jawa Barat	2.094,408	15,7%	4.592,556	34,3%	5.581,273	41,7%	1.106,802	8,3%	6.687,0	50,0%	6.688,1	50,0%	13.375,0
11	Banten	740,400	22,5%	1.049,360	31,9%	1.253,830	38,2%	240,900	7,3%	1.789,8	54,5%	1.494,7	45,5%	3.284,5
12	Jawa Tengah	4.754,830	24,1%	5.853,706	29,7%	7.433,305	37,7%	1.665,877	8,5%	10.608,5	53,8%	9.099,2	46,2%	19.707,7
13	DI Yogyakarta	1.404,636	37,6%	1.411,921	37,8%	661,566	17,7%	261,700	7,0%	2.816,6	75,3%	923,3	24,7%	3.739,8
14	Jawa Timur	6.974,888	30,5%	7.411,997	32,4%	6.656,340	29,1%	1.821,275	8,0%	14.386,9	62,9%	8.477,6	37,1%	22.864,5
15	Kalimantan Barat	1.318,340	18,0%	1.451,113	19,8%	2.559,090	35,0%	1.982,538	27,1%	2.769,5	37,9%	4.541,6	62,1%	7.311,1
16	Kalimantan Tengah	1.923,060	30,5%	1.736,990	27,6%	1.951,680	31,0%	691,010	11,0%	3.660,1	58,1%	2.642,7	41,9%	6.302,7
17	Kalimantan Timur	678,740	19,0%	1.077,130	30,2%	1.376,180	38,5%	439,400	12,3%	1.755,9	49,2%	1.815,6	50,8%	3.571,5
18	Kalimantan Selatan	1.428,606	22,7%	1.787,701	28,5%	2.086,772	33,2%	977,904	15,6%	3.216,3	51,2%	3.064,7	48,8%	6.281,0
19	Bali	1.991,565	39,5%	1.630,864	32,3%	1.288,888	25,5%	136,233	2,7%	3.622,4	71,8%	1.425,1	28,2%	5.047,6
20	NTB	917,612	19,0%	1.195,128	24,7%	1.861,940	38,5%	865,770	17,9%	2.112,7	43,6%	2.727,7	56,4%	4.840,5
21	NTT	1.485,900	12,7%	3.233,660	27,7%	4.438,720	38,0%	2.529,500	21,6%	4.719,6	40,4%	6.968,2	59,6%	11.687,8
22	Sulawesi Utara	773,700	21,9%	802,720	22,7%	1.117,270	31,7%	836,100	23,7%	1.576,4	44,7%	1.953,4	55,3%	3.529,8
23	Gorontalo	458,670	9,2%	254,920	5,1%	2.635,750	52,7%	1.647,800	33,0%	713,6	14,3%	4.283,6	85,7%	4.997,1
24	Sulawesi Tengah	1.268,814	18,6%	1.389,573	20,3%	1.535,546	22,5%	2.643,790	38,7%	2.658,4	38,9%	4.179,3	61,1%	6.837,7
25	Sulawesi Selatan	3.522,588	25,1%	3.961,134	28,3%	3.948,730	28,2%	2.585,750	18,4%	7.483,7	53,4%	6.534,5	46,6%	14.018,2
26	Sulawesi Tenggara	950,800	25,1%	746,100	19,7%	1.414,380	37,4%	675,000	17,8%	1.696,9	44,8%	2.089,4	55,2%	3.786,3
27	Maluku	442,300	11,1%	790,200	19,8%	1.474,610	36,9%	1.287,690	32,2%	1.232,5	30,9%	2.762,3	69,1%	3.994,8
28	Maluku Utara	33,400	1,1%	594,450	20,0%	1.570,700	52,9%	771,540	26,0%	627,9	21,1%	2.342,2	78,9%	2.970,1
29	Papua	976,630	10,9%	1.505,020	16,9%	2.382,310	26,7%	4.065,110	45,5%	2.481,7	27,8%	6.447,4	72,2%	8.929,1
30	Kepulauan Riau	406,500	15,4%	733,700	27,9%	1.262,600	48,0%	229,700	8,7%	1.140,2	43,3%	1.492,3	56,7%	2.632,5
31	Sulawesi Barat	418,325	26,4%	480,385	30,3%	373,700	23,6%	312,600	19,7%	898,7	56,7%	686,3	43,3%	1.585,0
32	Irian Jaya Barat	311,420	8,9%	843,690	24,0%	1.352,690	38,6%	1.000,860	28,5%	1.155,1	32,9%	2.353,6	67,1%	3.508,7
Indonesia		50.343,7	20,2%	66.357,6	26,6%	89.070,5	35,8%	43.308,3	17,4%	116.701,3	46,9%	132.378,7	53,1%	249.080,0

Sumber : Subdit Data dan Informasi, Direktorat Bina Program, Bina Marga, Dep. PU (31-08-2006)

Tabel 3.17
Jalan Nasional Jalan Tol

No	Provinsi	Panjang	
		Operasi (km)	Rencana (km)
1	2	3	4
1	Sumatera Utara	4.270	7.580
2	Riau	-	9.000
3	Sumatera Selatan	-	2.200
4	Lampung	-	15.000
5	DKI Jakarta		
6	Banten		
7	Jawa Barat		
8	Jawa Tengah	600,37	1.612
9	D.I. Yogyakarta		
10	Jawa Timur		
11	Bali	-	750
12	Sulawesi Utara	-	4.600
13	Sulawesi Selatan	605	1.160
	Total Indonesia	649,12	2.015.35

Sumber : www.praswil.go.id (Lampiran B : Keputusan Menteri Pekerjaan Umum

Nomor : 369/KPTS/M/2005

Tanggal : 18 Agustus 2005)

Tabel 3.18 A
Jalan Nasional Jalan Tol Pulau Jawa
Tahun 2005 - 2010

No	Nama Ruas Jalan Tol	Panjang (km)		
		Operasi		Rencana
		Utama	Akses	
1	2	3	4	5
1	Tangerang Merak	73,00		
2	Cilegon			8,80
3	Jakarta - Tangerang	27,00	6,00	
4	Jalan Tol Dalam Kota Jakarta			
	Tomang-Grogol-Pluit	7,55		
	Tomang-Cawang	16,00		
	Ir. Wiyoto Wiyono.Msc (Cawang - Tj.Priok)	15,50		
	Harbour Road (Tanjung Priok-Pluit)	11,55		
5	Prof. DR. Sedyanto	14,30		
6	Jakarta Outer Ring Road (JORR) I			
	Seksi S (Pd. Pinang-Taman mini)	14,25		
	Seksi E1 Selatan (Taman Mini IC - Hankam Raya)	4,00		
	Seksi E2 (Cikunir-Cakung)	9,07		
	Seksi W2 Selatan (Pd. Pinang - Ulujami)	3,70		
	Seksi W2 Utara (Ulujami-Kebon Jeruk)			7,00
	Seksi E3 (Cakung-Cilincing)			3,10
	Seksi E1 Utara (Hankam raya-Cikunir)			8,40
	Seksi W1 (Kebun Jeruk-Penjaringan)			9,80
7	Pondok Aren-Serpong	7,25		
8	Pondok Aren-Ulujami	5,55		
9	Akses Tanjung Priok			12,10
10	Bekasi-Cawang-Kampung Melayu			21,00
11	Depok Antasari			21,70
12	Jakarta Outer Ring Road (JORR) II			
	Tol Tangerang/Merak -Tangerang -Teluk Naga-Sedyatmo			25,00
	Tol Tangerang/Merak -Tol Serpong			24,81
	Tol Serpong - Cinere			12,39
	Tol Jagorawi - Cinere			14,70
	Tol Jagorawi - Tol Jakarta/Cikampek			27,10
	Cikarang - Tanjung Periok			34,00
13	Bogor Ring Road			11,00
14	Jagorawi	50,00	9,00	
15	Ciawi Sukabumi			54,00
16	Sukabumi - Ciranjang			31,00
17	Ciranjang - Padalarang			33,00
18	Terusan Pasteur - Ujung Berung - Cilenyi			20,85
19	Ujung Berung - Gedebage - Majalaya			19,20
20	Soreang - Pasir Koja			15,00
21	Jakarta - Cikampek	72,00	11,00	
22	Cikampek - Padalarang	58,50		
23	PadangLarang - Cileunyi	35,63	28,77	
24	Cileunyi - Sumedang - Dawuan			58,50
25	Cikampek - Padalarang			114,00

Lanjutan Tabel 3.18 A

No	Nama Ruas Jalan Tol	Panjang (km)		
		Operasi		Rencana
		Utama	Akses	
1	2	3	4	5
26	Palimanan - Cirebon/Kanci	26,30		
27	Kanci - Pejagan			34,00
28	Pejagan - Pemalang			56,00
29	Pemalang - Batang			35,00
30	Semarang - Batang			75,00
31	Semarang - Seksi A, B, dan C	24,75		
32	Semarang - Demak			25,00
33	Semarang - Solo			75,70
34	Yogyakarta - Bawean			104,00
35	Yogyakarta - Solo			45,00
36	Solo - Mantingan			58,00
37	Mantingan - Ngawi			27,00
38	Ngawi - Kertosono			84,00
39	Kertosono - Mojokerto			38,00
40	Mojokerto - Surabaya			37,00
41	Waru (Aloha) - Wonokromo - Tj. Perak			18,40
42	SS Waru - Bandara Juanda			13,50
43	Bandara Juanda - Tj Perak			23,00
44	Surabaya - Gresik	20,70		
45	Surabaya - Madura			5,40
46	Surabaya - Gempol	43,00	6,00	
47	Gempol - Pandaan			14,00
48	Pandaan - Malang			30,00
49	Gempol - Pasuruan			32,00
50	Pusuruan - Probolinggo			40,00
51	Probolinggo - Banyuwangi			156,00
		542,60	64,77	
	Total Pulau Jawa	607,37		1.612,45

Sumber : www.praswil.go.id (Lampiran I.1.B : Keputusan Menteri Pekerjaan Umum

Nomor : 369/KPTS/M/2005

Tanggal : 18 Agustus 2005)

Tabel 3.18B
Jalan Nasional Jalan Tol, Pulau Sumatera
Tahun 2005 - 2010

No	Nama Ruas Jalan Tol	Panjang (km)		Rencana
		Operasi		
		Utama	Akses	
1	2	3	4	5
Antar Kota				
1	Binjai - Medan			15,80
2	Medan-Kualanamu-Tebing Tinggi			60,00
3	Pekanbaru-Dumai			90,00
4	Bakauheni-Terbanggi Besar			150,00
	Sub Total			315,80
Dalam Kota				
5	Balmera (Belawan-Medan-Tj. Morawa)	33,70	9,00	
6	Palembang-Indralaya			22,00
	Sub Total	33,70	9,00	22,00
	Total Sumut,Riau,Sumsel dan Lampung	42,70		337,80

Sumber : www.praswil.go.id (Lampiran I.1.B : Keputusan Menteri Pekerjaan Umum

Nomor : 369/KPTS/M/2005

Tanggal : 18 Agustus 2005)

Tabel 3.18C
Jaringan Jalan Tol Pulau Sulawesi
Tahun 2005 - 2010

No	Nama Ruas Jalan Tol	Panjang (km)		Rencana
		Operasi		
		Utama	Akses	
1	2	3	4	5
Antar Kota				
1	Menado			46,00
	Sub Total			46,00
Dalam Kota				
2	Ujung Pandang I	6,05		
3	Makasar Seksi IV			11,60
	Sub Total	6,05		11,60
	Total Sulawesi Utara dan Sulawesi Selatan	6,05		57,60

Sumber : www.praswil.go.id (Lampiran I.1.B : Keputusan Menteri Pekerjaan Umum

Nomor : 369/KPTS/M/2005

Tanggal : 18 Agustus 2005)

Tabel 3.18 D
Jaringan Jalan Tol Pulau Bali
Tahun 2005 - 2010

No	Nama Ruas JalanTol	Panjang (km)		
		Operasi		Rencana
		Utama	Akses	
1	2	3	4	5
Dalam Kota				
1	Serangan-Tanjung Benoa			7,50
	Sub Total	0	-	7,50
	Total Pulau Bali	0		7,50

Sumber : www.praswil.go.id (Lampiran I.1.B : Keputusan Menteri Pekerjaan Umum

Nomor : 369/KPTS/M/2005

Tanggal : 18 Agustus 2005)

Tabel 3.19
Statistik Jembatan di Pulau Jawa

Status Jalan	Jumlah Jembatan	Panjang (m)	Kondisi (%)				
			Baik	Sedang	Rusak Ringan	Rusak	Kritis
1	2	3	4	5	6	7	8
Nasional	9.701	245.144	48,97	15,91	13,74	7,22	14,16
Provinsi	12.789	267.012	40,59	16,32	13,94	9,22	19,93

Sumber : Proyek Induk Pembangunan Jalan Jalur Pantura Jawa, 2005

Tabel 3.20
Perkembangan Perusahaan Air Minum (PAM)
Tahun 2001 - 2005

No	Perincian	Satuan	2001	2002	2003	2004	2005
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Banyaknya Perusahaan	Perusahaan	454	469	477	478	478
2	Banyaknya Pekerja	Orang	40.750	44.693	45.356	45.782	45.910
3	Pengeluaran untuk pekerja	000 000	438.707	506.515	775.054	747.928	739.790
4	Air bersih yang disalurkan	000 000 M ³ *)	1.835	2.095	2.286	2.343	2.360
5	Biaya Input	000 000	1.051.894	1.748.270	2.245.757	2.365.460	2.401.371
6	Nilai Output	000 000	2.323.006	3.900.975	4.462.863	4.857.892	4.976.401

Sumber : BPS, Statistik Indonesia 2005/2006 (Diolah dari hasil Survei Tahunan Perusahaan Air Bersih)

Catatan : *) Koreksi setelah klarifikasi

Tabel 3.21
Persentase Rumah tangga menurut Provinsi dan Sumber Air Minum
Tahun 2005

No	Provinsi	Ledeng	Pompa	Air dlm Kemasan	Sumur Terlindung	Sumur Tak Terlindung	Mata Air Terlindung	Mata Air Tak Terlindung	Air Sungai	Air Hujan	Lainnya	Jumlah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Nanggroe Aceh D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Sumatera Utara	23,48	9,80	1,92	33,21	12,19	6,65	5,86	3,80	2,13	0,95	100,00
3	Sumatera Barat	21,15	3,79	1,44	37,25	12,59	10,41	7,57	3,76	1,71	0,33	100,00
4	Riau	3,79	3,28	4,30	33,43	19,19	1,78	0,96	2,66	30,07	0,54	100,00
5	Jambi	16,40	1,84	1,42	35,29	18,89	1,77	1,72	9,30	13,22	0,15	100,00
6	Sumatera Selatan	17,29	1,30	2,36	42,50	15,12	1,91	1,01	12,64	5,57	0,30	100,00
7	Bengkulu	14,23	1,64	1,58	35,21	36,47	3,93	4,20	2,27	0,33	0,14	100,00
8	Lampung	5,69	3,04	1,76	54,59	24,71	2,98	3,09	1,73	1,92	0,50	100,01
9	Kep. Bangka Belitung	3,74	7,36	3,43	55,56	25,03	0,85	1,13	2,05	0,71	0,14	100,00
10	Kepulauan Riau	39,36	0,83	4,72	32,95	10,81	3,77	1,92	0,48	1,99	3,18	100,01
11	DKI Jakarta	46,90	28,15	17,97	5,13	0,49	0,13	0,02	0,00	0,17	1,04	100,00
12	Jawa Barat	12,91	22,95	3,84	36,79	8,46	8,75	5,04	0,76	0,20	0,29	100,00
13	Jawa Tengah	14,86	11,29	1,97	46,20	7,66	12,20	4,05	0,79	0,70	0,28	100,00
14	DI Yogyakarta	8,82	10,46	7,42	56,23	7,12	3,28	2,09	0,13	4,41	0,02	100,00
15	Jawa Timur	16,82	16,15	4,80	39,86	6,34	11,30	3,37	0,36	0,43	0,58	100,00
16	Banten	13,78	31,36	7,79	27,18	8,62	5,22	2,42	2,40	1,09	0,14	100,00
17	Bali	40,19	3,93	11,12	19,91	2,16	13,15	3,17	2,11	4,03	0,22	100,00
18	Nusa Tenggara Barat	14,68	7,22	2,41	43,28	14,30	14,93	1,62	0,77	-	0,79	100,00
19	Nusa Tenggara Timur	19,53	0,45	0,77	18,28	8,59	21,57	20,36	6,83	2,91	0,72	100,00
20	Kalimantan Barat	8,94	0,90	2,66	7,21	8,06	2,74	3,22	27,06	39,08	0,12	100,00
21	Kalimantan Tengah	17,63	9,43	0,98	18,31	7,28	2,68	0,53	37,94	4,83	0,40	100,00
22	Kalimantan Selatan	32,49	8,37	2,26	14,80	16,03	3,36	1,30	19,50	1,73	0,16	100,00
23	Kalimantan Timur	43,11	3,44	5,26	13,13	8,25	2,07	1,25	13,59	8,84	1,07	100,00
24	Sulawesi Utara	23,59	4,21	1,20	39,94	12,10	14,42	3,21	0,17	0,72	0,44	100,00
25	Sulawesi Tengah	22,40	13,10	1,47	23,76	12,08	14,61	3,45	7,74	1,04	0,36	100,00
26	Sulawesi Selatan	24,19	8,70	1,55	33,82	13,90	9,03	5,25	2,49	0,77	0,30	100,00
27	Sulawesi Tenggara	27,79	1,88	0,81	32,32	17,91	11,24	2,33	2,94	2,55	0,22	100,00
28	Gorontalo	15,94	1,43	0,82	53,38	17,96	2,59	2,03	5,26	-	0,59	100,00
29	Maluku	25,77	1,75	0,59	36,55	9,87	18,33	3,90	1,93	1,04	0,28	100,00
30	Maluku Utara	22,02	1,00	0,94	40,79	20,30	3,83	2,24	3,23	5,65	-	100,00
31	Papua	16,77	2,62	4,58	8,69	8,67	10,87	19,81	12,99	14,41	0,60	100,00
	Indonesia	17,97	13,70	4,06	35,61	9,78	8,56	3,97	3,21	2,70	0,45	100,00

Sumber : BPS, Statistik Indonesia 2005/2006 (Diolah dari hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2005)

Tabel 3.22
Lokasi IPA Hingga Tahun 2007 PDAM

No.	Provinsi	Kapasitas	
		Terpasang (L/dt)	Produksi (L/dt)
1	2	3	4
1	Nanggroe Aceh Darussalam	1.930	1.423
2	Sumatera Utara	9.666	7.910
3	Sumatera Barat	3.160	2.265
4	Riau	1.563	1.043
5	Kepulauan Riau	2.590	2.169
6	Jambi	2.291	1.727
7	Sumatera Selatan	4.432	4.157
8	Bangka Belitung	467	403
9	Bengkulu	1.394	1.253
10	Lampung	1.408	908
11	DKI Jakarta	16.275	14.482
12	Jawa Barat	14.514	10.991
13	Jawa Tengah	16.166	11.123
14	DI Yogyakarta	2.156	1.632
15	Jawa Timur	20.551	17.008
16	Banten	5.835	5.410
17	Bali	4.692	3.999
18	Nusa Tenggara Barat	3.293	1.113
19	Nusa Tenggara Timur	1.760	1.226
20	Kalimantan Barat	2.755	2.273
21	Kalimantan Tengah	1.116	815
22	Kalimantan Selatan	2.348	1.966
23	Kalimantan Timur	3.784	2.999
24	Sulawesi Utara	2.360	1.810
25	Sulawesi Tengah	755	512
26	Sulawesi Selatan	4.744	3.623
27	Sulawesi Tenggara	951	627
28	Gorontalo	473	291
29	Sulawesi Barat	237	206
30	Maluku	347	306
31	Maluku Utara	64	39
32	Papua	436	366
33	Irian Jaya Barat	534	308
Indonesia		135.044	106.380

Sumber : Ditjen Cipta Karya, 2007

Tabel 3.23
Lokasi IPAL Hingga Tahun 2007

No.	Provinsi	Kap. Pengolahan (M3/HARI)
1	2	3
1	Nanggroe Aceh Darussalam	
2	Sumatera Utara	32.010
3	Sumatera Barat	
4	Riau	
5	Kepulauan Riau	
6	Jambi	
7	Sumatera Selatan	
8	Bangka Belitung	
9	Bengkulu	
10	Lampung	
11	DKI Jakarta	48.400
12	Jawa Barat	261.500
13	Jawa Tengah	4.666
14	DI Yogyakarta	15.000
15	Jawa Timur	
16	Banten	5.617
17	Bali	61.000
18	Nusa Tenggara Barat	
19	Nusa Tenggara Timur	
20	Kalimantan Barat	
21	Kalimantan Tengah	
22	Kalimantan Selatan	1.000
23	Kalimantan Timur	800
24	Sulawesi Utara	
25	Sulawesi Tengah	
26	Sulawesi Selatan	
27	Sulawesi Tenggara	
28	Gorontalo	
29	Sulawesi Barat	
30	Maluku	
31	Maluku Utara	
32	Papua	
33	Irian Jaya Barat	
Indonesia		429.993

Sumber : Ditjen Cipta Karya, 2007

Tabel 3.24
Lokasi IPLT Hingga Tahun 2007

No.	Provinsi	Kap. Pengolahan (M3/HARI)
1	2	3
1	Nanggroe Aceh Darussalam	
2	Sumatera Utara	
3	Sumatera Barat	
4	Riau	
5	Kepulauan Riau	82,00
6	Jambi	196,60
7	Sumatera Selatan	42,00
8	Bangka Belitung	
9	Bengkulu	
10	Lampung	
11	DKI Jakarta	
12	Jawa Barat	
13	Jawa Tengah	
14	DI Yogyakarta	
15	Jawa Timur	
16	Banten	
17	Bali	78,40
18	Nusa Tenggara Barat	
19	Nusa Tenggara Timur	
20	Kalimantan Barat	
21	Kalimantan Tengah	
22	Kalimantan Selatan	
23	Kalimantan Timur	333,40
24	Sulawesi Utara	
25	Sulawesi Tengah	
26	Sulawesi Selatan	700,00
27	Sulawesi Tenggara	27,00
28	Gorontalo	
29	Sulawesi Barat	
30	Maluku	39,00
31	Maluku Utara	30,49
32	Papua	
33	Irian Jaya Barat	
Indonesia		1.528,89

Sumber : Ditjen Cipta Karya, 2007

Tabel 3.25
Banyaknya Desa Menurut Provinsi Dan Jenis Tempat
Membuang Air Besar Sebagian Besar Keluarga

Perkotaan+Perdesaan						
No	Provinsi	Jamban Sendiri	Jamban Bersama	Jamban Umum	Bukan Jamban	Jumlah
1	2	3	4	5	6	7
1	Nanggroe Aceh D	2.041	270	907	2.750	5.968
2	Sumatera Utara	2.198	106	676	1.935	4.915
3	Sumatera Barat	464	55	62	320	901
4	Riau	1.045	75	43	314	1.477
5	Jambi	662	79	52	442	1.235
6	Sumatera Selatan	1.213	97	127	1.341	2.778
7	Bengkulu	576	27	19	602	1.224
8	Lampung	1.624	19	16	532	2.191
9	Kep. Bangka Belitung	206	3	5	107	321
10	Kep. Riau	168	7	9	71	255
11	DKI Jakarta	259	0	2	6	267
12	Jawa Barat	3.814	423	361	1.210	5.808
13	Jawa Tengah	5.597	129	242	2.596	8.564
14	DI Yogyakarta	337	7	1	93	438
15	Jawa Timur	4.970	338	83	3.086	8.477
16	Banten	639	49	79	715	1.482
17	Bali	597	30	0	74	701
18	Nusa Tenggara Barat	334	10	15	461	820
19	Nusa Tenggara Timur	1.185	62	24	1.467	2.738
20	Kalimantan Barat	604	36	23	867	1.530
21	Kalimantan Tengah	394	53	27	877	1.351
22	Kalimantan Selatan	783	77	80	1.019	1.959
23	Kalimantan Timur	728	86	67	463	1.344
24	Sulawesi Utara	1.030	39	48	152	1.269
25	Sulawesi Tengah	814	37	64	615	1.530
26	Sulawesi Selatan	2.012	73	29	1.172	3.286
27	Sulawesi Tenggara	840	20	8	817	1.685
28	Gorontalo	161	45	31	213	450
29	Maluku	265	19	63	526	873
30	Maluku Utara	263	57	151	310	781
31	Papua	684	67	119	2.469	3.339
	Indonesia	36.507	2.395	3.433	27.622	69.957

Sumber : BPS, Statistik Potensi Desa Indonesia 2005

Tabel 3.26
Lokasi TPA Hingga Tahun 2007

No.	Provinsi	Luas (HA)
1	2	3
1	Nanggroe Aceh Darussalam	28,00
2	Sumatera Utara	
3	Sumatera Barat	54,84
4	Riau	20,00
5	Kepulauan Riau	
6	Jambi	145,25
7	Sumatera Selatan	102,00
8	Bangka Belitung	9,50
9	Bengkulu	25,00
10	Lampung	52,40
11	DKI Jakarta	
12	Jawa Barat	445,90
13	Jawa Tengah	181,82
14	DI Yogyakarta	14,60
15	Jawa Timur	197,82
16	Banten	48,90
17	Bali	57,50
18	Nusa Tenggara Barat	
19	Nusa Tenggara Timur	
20	Kalimantan Barat	54,55
21	Kalimantan Tengah	
22	Kalimantan Selatan	88,26
23	Kalimantan Timur	115,95
24	Sulawesi Utara	
25	Sulawesi Tengah	50,00
26	Sulawesi Selatan	110,20
27	Sulawesi Tenggara	27,00
28	Gorontalo	4,00
29	Sulawesi Barat	3,50
30	Maluku	5,00
31	Maluku Utara	7,00
32	Papua	
33	Irian Jaya Barat	38,00
	Indonesia	1.886,99

Sumber : Ditjen Cipta Karya, 2007

Tabel 3.27
Banyaknya Desa Menurut Provinsi Dan Jenis Tempat
Membuang Sampah Sebagian Besar Keluarga

Perkotaan+Perdesaan						
No	Provinsi	Tempat Sampah Kemudian Diangkut	Dalam Lubang Bakar	Sungai	Lainnya	Jumlah
1	2	3	4	5	6	7
1	Nanggroe Aceh D	219	4.767	303	679	5.968
2	Sumatera Utara	485	3.234	208	988	4.915
3	Sumatera Barat	157	547	65	132	901
4	Riau	170	1.232	129	201	1.732
5	Jambi	97	768	207	163	1.235
6	Sumatera Selatan	254	1.405	411	708	2.778
7	Bengkulu	163	575	73	413	1.224
8	Lampung	130	1.623	59	379	2.191
9	Kep. Bangka Belitung	26	215	2	78	321
10	Kep. Riau	63	113	6	73	255
11	DKI Jakarta	256	11	-	-	267
12	Jawa Barat	689	4.277	233	609	5.808
13	Jawa Tengah	711	6.729	188	936	8.564
14	DI Yogyakarta	54	378	2	4	438
15	Jawa Timur	810	6.901	91	675	8.477
16	Banten	174	807	44	457	1.482
17	Bali	166	185	11	339	701
18	Nusa Tenggara Barat	74	355	95	296	820
19	Nusa Tenggara Timur	104	1.452	26	1.156	2.738
20	Kalimantan Barat	89	646	203	592	1.530
21	Kalimantan Tengah	39	664	507	141	1.351
22	Kalimantan Selatan	143	933	380	503	1.959
23	Kalimantan Timur	145	527	467	205	1.344
24	Sulawesi Utara	165	940	30	134	1.269
25	Sulawesi Tengah	78	1.001	52	399	1.530
26	Sulawesi Selatan	338	2.002	122	824	3.286
27	Sulawesi Tenggara	68	1.013	26	578	1.685
28	Gorontalo	32	350	6	62	450
29	Maluku	33	240	19	581	873
30	Maluku Utara	37	245	22	477	781
31	Papua	72	1.032	223	2.012	3.339
	Indonesia	6.041	45.167	4.210	14.794	70.212

Sumber : BPS, Statistik Potensi Desa Indonesia 2005

STATISTIK
PEKERJAAN UMUM
<http://www.pu.go.id/infostatistik>

Pusat Pengolahan Data (PUSDATA) Departemen Pekerjaan Umum Republik Indonesia
Jl. Pattimura No. 20 Kebayoran Baru, Jakarta 12110 - Telp: 021-7392262

 Kolek
Perpu
<http://pus>
31